



**TUGAS AKHIR - DK 184802**

# **UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH KABUPATEN BANGKALAN**

**UMMU BARIROH  
NRP 0821154000034**

**Dosen Pembimbing  
Ir. Sardjito, MT.**

**Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas Arsitektur Desain dan Perencanaan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya  
2019**





**TUGAS AKHIR - DK 184802**

# **UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH KABUPATEN BANGKALAN**

**UMMU BARIROH  
NRP 0821154000034**

**Dosen Pembimbing  
Ir. Sardjito, MT.**

**Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas Arsitektur Desain dan Perencanaan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya  
2019**



**FINAL PROJECT - DK 184802**

## **EFFORTS TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF BANGKALAN REGENCY**

**UMMU BARIROH  
NRP 0821154000034**

**Supervisor  
Ir. Sardjito, MT.**

**Departement Urban and Regional Planning  
Faculty of Architecture, Design, Planning  
Sepuluh Nopember Institute of Technology  
Surabaya  
2019**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH  
KABUPATEN BANGKALAN**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota  
Pada

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh:

**UMMU BARIROH**  
NRP. 08211540000034

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir :

~~Ir. *[Signature]*, MT~~

~~NIP. 195807151987011001~~



iii



## **UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH KABUPATEN BANGKALAN**

Nama : Ummu Bariroh  
NRP : 08211540000034  
Departemen : Perencanaan Wilayah dan Kota  
Dosen Pembimbing : Ir. Sardjito, MT

### **ABSTRAK**

*Daya saing daerah merupakan suatu konsep yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan penelitian terdahulu tahun 2014 yaitu “Pengembangan Daya Saing Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Potensinya” dihasilkan bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki daya saing daerah rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan.*

*Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan tiga sasaran yaitu sasaran pertama, mengeksplorasi karakteristik variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif. Sasaran kedua, menentukan urutan variabel penanganan dalam peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan menggunakan alat analisis Analytic Hierarchy Process. Sasaran ketiga, merumuskan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan menggunakan alat analisis metode komparatif dan triangulasi.*

*Hasil penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian ini menunjukkan terdapat 16 bidang atau variabel yang menyebabkan rendahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2014, telah mengalami perkembangan dari tahun 2014 hingga 2018. Dalam urutan variabel penanganan untuk meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan, urutan pertama adalah rata-rata lama sekolah untuk indikator input dan produktivitas tenaga kerja untuk indikator output. Variabel-variabel penyebab lemahnya daya*

*saing daerah berdasarkan penelitian terdahulu yang berjumlah 16 dibandingkan dengan data pada tahun 2018, dengan asumsi standar yang digunakan menggunakan standar data daya saing tahun 2014 didapatkan hasil bahwa beberapa variabel telah mengalami peningkatan menjadi kelompok rata-rata dan keunggulan, namun masih terdapat variabel yang termasuk dalam kelompok kelemahan. Oleh karena itu upaya peningkatan daya saing daerah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kinerja pada variabel-variabel yang masih termasuk dalam kelompok kelemahan dan rata-rata.*

***Kata Kunci: Bangkalan, Daya Saing Daerah, Peningkatan***

## **EFFORTS TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF BANGKALAN REGENCY**

Name : Ummu Bariroh  
NRP : 08211540000034  
Departement : Urban and Regional Planning  
Supervisor : Ir. Sardjito, MT.

### **ABSTRACT**

*Regional competitiveness is a concept that shows the ability of a region compared to other regions in establishing the right strategy to improve the welfare of its people. Based on previous research in 2014, "Development of District / City Competitiveness in East Java Based on Its Potential" resulted in Bangkalan Regency having low regional competitiveness. The purpose of this study is to formulate efforts to improve the competitiveness of Bangkalan Regency.*

*To achieve the objectives of the study three targets were carried out. The first target is exploring the variable characteristics of the weakness of the Bangkalan Regency regional competitiveness using a qualitative descriptive analysis tool. The second target is determining the order of handling variables in improving the competitiveness of Bangkalan Regency using Analytic Hierarchy Process analysis tools. The third target is formulating efforts to improve the competitiveness of the Bangkalan Regency area using comparative and triangulation method analysis tools.*

*The results of previous studies that form the basis of this study indicate that there are 16 fields or variables that cause the low competitiveness of Bangkalan Regency in 2014, have experienced developments from 2014 to 2018. In the order of handling variables to improve the competitiveness of Bangkalan Regency, the first order is average school length for input indicators and labor productivity for output indicators. The variables that cause weakness in regional competitiveness based on previous research are 16 compared to the*

*data in 2018, with the standard assumptions used using the 2014 competitiveness data standard. It was found that several variables had increased to mean and excellence groups, but there are still variables included in the group of weaknesses. Therefore, efforts to increase regional competitiveness that need to be done are to improve performance on variables that are still included in the group of weaknesses and averages.*

***Keywords: Bangkalan, Improvement, Regional Competitiveness***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan”. Dengan terselesainya tugas akhir ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Sardjito, MT., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, masukan, dukungan serta motivasi yang positif dalam penyusunan tugas akhir ini.
2. Bapak Mochammad Cholil dan ibu Sudyati selaku orang tua penulis yang selalu memberikan do'a dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kakak-kakak penulis yang telah memberikan dorongan maupun bantuan tenaga dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Teman-teman penulis angkatan 2015 departemen PWK ITS, “Alektroana”, yang telah memberikan semangat, dukungan, serta motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini,
5. Semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu, mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan masukan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu adanya masukan, kritik, dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi pengembangan selanjutnya. Semoga melalui penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya wawasan keilmuan dan pengetahuan.

Surabaya, Juli 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian .....	6
1.4. Ruang Lingkup.....	6
1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah .....	6
1.4.2. Ruang Lingkup Pembahasan.....	9
1.4.3. Ruang Lingkup Substansi .....	9
1.5. Manfaat .....	9
1.5.1. Manfaat Teoritis .....	9
1.5.2. Manfaat Praktis .....	9
1.6. Sistematika Penulisan .....	9
1.7. Kerangka Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Pengembangan Wilayah.....	13
2.2 Ekonomi Wilayah .....	14
2.3 Daya Saing Daerah.....	15
2.3.1 Konsep Daya Saing Daerah .....	16
2.3.2 Indikator Daya Saing Daerah .....	18
2.3.3 Upaya-Upaya Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah .....	32
2.4 Penelitian Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur .....	35
2.5 Sintesa Tinjauan Pustaka .....	40
2.5.1. Indikator dan Variabel Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Penelitian Terdahulu .....	40

2.5.2. Indikator dan Variabel yang Digunakan dalam Penelitian....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	67
3.2. Jenis Penelitian.....	67
3.3. Variabel Penelitian.....	68
3.4. Populasi dan Sampel Penelitian .....	72
3.5. Metode Penelitian .....	73
3.5.1 Metode Pengumpulan Data.....	73
3.5.2 Metode Analisis Data.....	76
3.6. Tahapan Penelitian.....	82
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>84</b>
4.1. Gambaran Umum Wilayah .....	84
4.1.1. Indikator Input.....	84
4.1.2. Indikator Output.....	106
4.2. Analisis dan Pembahasan.....	108
4.2.1. Mengeksplorasi Karakteristik Variabel Lemahnya Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan.....	108
4.2.2. Menentukan Urutan Variabel Penanganan dalam Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan .....	131
4.2.3. Merumuskan Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan .....	139
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>151</b>
5.1. Kesimpulan.....	151
5.2. Rekomendasi .....	153
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>155</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>163</b>
Lampiran 1. Analisis Stakeholder .....	163
Lampiran 2. Desain Survei Penelitian .....	170
Lampiran 3. Pengumpulan Data .....	172
Lampiran 4. Kuisisioner AHP.....	174
Lampiran 5. Hasil Wawancara dengan Stakeholder.....	184
Lampiran 6. Posisi Variabel Lemahnya Daya Saing Kabupaten Bangkalan terhadap Penelitian Terdahulu .....	218

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Variabel-Variabel Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan yang digunakan dalam penelitian ini.....	69
Tabel 3.2	Metode Analisis Data yang Digunakan dalam Penelitian .....	76
Tabel 3.3	Skala Preferensi untuk Kuisisioner AHP.....	78
Tabel 4.1	Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bangkalan 2014-2018 .....	85
Tabel 4.2	Government Size Kabupaten Bangkalan 2014-2017 ....	87
Tabel 4.3	Belanja Pelayanan Publik per Kapita Kabupaten Bangkalan 2014-2018 .....	89
Tabel 4.4	Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bangkalan 2014-2017 .....	90
Tabel 4.5	Prosentase Perbandingan Penduduk Umur 15-64 tahun (Usia Produktif) dengan Penduduk yang Sudah Bekerja.....	90
Tabel 4.6	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Bangkalan 2014-2017 .....	92
Tabel 4.7	Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangkalan 2014-2017 .....	93
Tabel 4.8	Nilai Tambah Sektor Pengangkutan per Kapita Kabupaten Bangkalan 2014-2017 .....	94
Tabel 4.9	Kondisi Jalan dengan Kategori Baik Kabupaten Bangkalan 2014-2017 (kilometer) .....	96
Tabel 4.10	Total Investasi per Kapita Kabupaten Bangkalan 2014-2018 .....	97
Tabel 4.11	Firm Density Kabupaten Bangkalan 2014-2018.....	98
Tabel 4.12	Presentase Penduduk dengan Pendidikan Tinggi Universitas Kabupaten Bangkalan 2014-2018.....	100
Tabel 4.13	Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangkalan 2014-2018 .....	101
Tabel 4.14	Jenis Koperasi di Kabupaten Bangkalan.....	102

Tabel 4.15	Rasio Volume Usaha terhadap Koperasi Aktif di Kabupaten Bangkalan .....	103
Tabel 4.16	Nilai Tambah Sektor Keuangan Kabupaten Bangkalan 2014-2017 .....	105
Tabel 4.17	PDRB per Kapita Kabupaten Bangkalan 2014-2017..	106
Tabel 4.18	Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan 2014-2017 .....	107
Tabel 4.19	Urutan Variabel Penanganan dalam Indikator Perekonomian dan Keuangan Daerah.....	134
Tabel 4.20	Urutan Penanganan Variabel Indikator Output dalam Peningkatan Daya Saing Kabupaten Bangkalan .....	139
Tabel 4.21	Rumusan Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan .....	143
Tabel L.1	Kepentingan dan Pengaruh Stakehlder dalam Penyusunan Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan .....	163
Tabel L.2	Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Kepentingan dan Pengaruh dalam Penyusunan Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan .....	169
Tabel L.3	Pengumpulan Data .....	172

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Bangkalan.....	8
Gambar 2.1 Piramida Daya Saing Daerah.....	18
Gambar 4.1 Grafik Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bangkalan 2014-2018.....	86
Gambar 4.2 Grafik Government Size Kabupaten Bangkalan 2014-2017 .....	88
Gambar 4.3 Grafik Belanja Pelayanan Publik per Kapita Kabupaten Bangkalan 2014-2018.....	89
Gambar 4.4 Grafik Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bangkalan 2014-2017 .....	91
Gambar 4.5 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Bangkalan 2014-2017.....	92
Gambar 4.6 Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangkalan 2014-2017 .....	93
Gambar 4.7 Grafik Nilai Tambah Sektor Pengangkutan per Kapita Kabupaten Bangkalan 2014-2017 .....	95
Gambar 4.8 Grafik Kondisi Jalan dengan Kategori Baik Kabupaten Bangkalan 2014-2017 (kilometer).....	96
Gambar 4.9 Grafik Total Investasi per Kapita Kabupaten Bangkalan 2014-2017 .....	98
Gambar 4.10 .Grafik Firm Density Kabupaten Bangkalan 2014-2018	99
Gambar 4.11 Grafik Presentase Penduduk dengan Pendidikan Tinggi Universitas Kabupaten Bangkalan 2014-2018.....	100
Gambar 4.12 Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangkalan 2014-2018.....	101
Gambar 4.13 Grafik Rasio Volume Usaha terhadap Koperasi Aktif di Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2018 ....	104
Gambar 4.14 Grafik Nilai Tambah Sektor Keuangan Kabupaten Bangkalan 2014-2017 .....	105
Gambar 4.15 Grafik PDRB per Kapita Kabupaten Bangkalan 2014-2017.....	106
Gambar 4.16 Grafik Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan 2014-2017.....	108

Gambar 4.17	Bobot Indikator Input .....	132
Gambar 4.18	Bobot Variabel dalam Indikator Perekonomian dan Keuangan Daerah.....	133
Gambar 4.19	Bobot Variabel dalam Indikator SDM dan Ketenagakerjaan .....	134
Gambar 4.20	Bobot Variabel dalam Indikator Infrastruktur, SDA, dan Lingkungan .....	135
Gambar 4.21	Bobot Variabel dalam Indikator Lingkungan Usaha Produktif .....	136
Gambar 4.22	Bobot Variabel dalam Indikator Perbankan dan Lembaga Keuangan .....	137
Gambar 4.23	Bobot Variabel Secara Keseluruhan dalam Indikator Input .....	138
Gambar 4.24	Bobot Variabel dalam Indikator Output .....	139

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya, menyeimbangkan pembangunan nasional, meningkatkan keserasian dan keterpaduan antar kawasan maupun antar sektor pembangunan melalui penataan ruang untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Nurana dkk, 2012). Pengembangan wilayah yang dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Huda, 2014). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, telah dinyatakan bahwa fungsi dan tujuan Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah melalui pemerataan pembangunan (Husna dkk, 2013).

Pelaksanaan pemerataan pembangunan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilakukan melalui otonomi daerah. Menurut KPPOD atau Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (2005), otonomi daerah dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Otonomi daerah dalam penataan ruang memiliki peran salah satunya menjawab isu kesenjangan perkembangan antar wilayah serta kawasan (Hariyanto dkk, 2007). Namun, pelaksanaan pemerataan pembangunan melalui otonomi daerah belum terlaksana sesuai yang diharapkan. Menurut Ulfie dalam Husna dkk (2013), kebijakan otonomi daerah pada kenyataannya tidak menjadikan seluruh daerah otonom memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara bersamaan. Persaingan antar daerah dalam era otonomi menyebabkan kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, yang pada akhirnya menuntut setiap daerah untuk meningkatkan daya saingnya (Husna dalam Widi, 2015).

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis di daerah maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu sehingga

hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Proses menuju kemandirian suatu daerah dalam era globalisasi saat ini tidaklah terlepas dari perlu adanya daya saing dalam membentuknya. Daya saing tidaklah hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja, tetapi lebih jauh lagi yaitu daya saing tersebut diartikan sebagai kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup rakyat yang nyata dan berkelanjutan serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Secara konsep, daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah harus mencari dan mengenal potensi yang akan dikembangkan dan dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. Apalagi dengan semakin terbukanya pasar bebas yang memungkinkan produk impor masuk ke daerah-daerah, tentunya usaha-usaha yang dilakukan daerah harus lebih nyata dan terukur. Ukuran keberhasilannya adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Setiap daerah dituntut untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat menciptakan ide-ide baru, perbaikan-perbaikan yang dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, industri baru, lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Daya saing daerah merupakan kunci utama untuk mencapai kinerja pembangunan daerah berkelanjutan di era otonomi dan globalisasi ekonomi (Suliswanto, 2017). Parameter dalam pembangunan daerah berkelanjutan salah satunya adalah tingkat daya saing, semakin tinggi daya saing suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya (Huda, 2014). Daerah yang tidak berdaya saing lama-kelamaan pertumbuhan ekonomi daerahnya akan menurun (Santoso, 2009).

Wilayah Propinsi Jawa Timur yang terdiri atas 38 Kabupaten Kota, dalam hal pengukuran tingkat daya saingnya telah banyak dilakukan penelitiannya. Salah satunya adalah hasil penelitian

Huda, M. & Santoso, E. B. dalam Tugas Akhirnya yang berjudul. *“Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Potensinya.”*. tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menghasilkan posisi daya saing daerah seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan skor daya saing indikator input-output. Ditinjau dari indikator daya saing input yaitu perekonomian dan keuangan daerah; sumber daya manusia dan ketenagakerjaan; lingkungan usaha produktif; infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan; perbankan dan lembaga keuangan; serta indikator output yaitu produktivitas tenaga kerja, PDRB perkapita, dan tingkat kesempatan kerja

Posisi daya saing kabupaten/kota tersebut diklasifikasikan kedalam 4 kelompok, pengelompokan dilakukan dengan membandingkan antara skor indikator kabupaten/kota dengan skor indikator rata-rata Jawa Timur.

Ke empat klasifikasi tersebut diklasifikasikan sesuai dengan skor kabupaten/kota.

- 1) Kabupaten/kota yang memiliki daya saing tinggi dari sisi input, maupun output;
- 2) kabupaten/kota yang memiliki skor input daya saing lebih besar dari rata-rata skor indikator input, tapi skor output lebih kecil dari rata-rata skor indikator output;
- 3) kabupaten/kota yang memiliki skor output diatas rata-rata, tetapi skor input dibawah rata-rata;
- 4) serta kabupaten/kota yang memiliki skor input dan output dibawah rata-rata.

Huda, M. & Santoso, E.B. dalam penelitiannya melakukan pemetaan terhadap 38 wilayah Kabupaten/kota di Jawa Timur. Daya saing dilakukan dengan penentuan peringkat berdasarkan faktor-faktor utama. Pemetaan daya saing Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara mengelompokkan Kabupaten/Kota berdasarkan kinerja indikator input dan indikator output. Dari hasil pengelompokkan tersebut diperoleh tingkat daya saing daerah Kabupaten/Kota. Kabupaten/kota yang berdaya saing rendah memerlukan perhatian khusus, ada hal-hal khusus yang harus dilakukan terhadap indikator

penyebab rendahnya daya saing wilayah, sehingga dapat mempersempit jarak daya saing dengan kabupaten/kota yang berdaya saing tinggi (Huda, 2014).

Memperhatikan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh saudara Huda, M. penulis tertarik untuk melanjutkan hasil penelitiannya, khususnya upaya-upaya apa yang perlu dilakukan guna peningkatan daya saing wilayah, dari wilayah yang berdaya saing rendah, ke wilayah yang memiliki tingkat daya saing yang lebih tinggi.

Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu wilayah yang menjadi ruang lingkup wilayah penelitiannya, hasilnya ternyata berada pada posisi yang berdaya saing lemah. Artinya, Kabupaten Bangkalan memiliki skor input maupun skor output dibawah rata-rata Jawa Timur. Dalam rangka meningkatkan daya saing wilayah perlu menggali potensi Kabupaten Bangkalan, guna peningkatan daya saing daerah, perlu upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan.

Sebagaimana informasi yang diperoleh, bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan cenderung meningkat, namun masih lambat dan walaupun menunjukkan peningkatan, angka tersebut masih dibawah laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan tahun 2014 sebesar 7,16% kemudian turun pada angka terendah pada tahun 2015 sebesar -2,66%. Angka laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,66%, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,53%. Disisi lain, Kabupaten Bangkalan memiliki potensi sumber daya alam seperti sektor pertanian, kehutanan, perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan (BPS, 2019).

Selain itu Kabupaten Bangkalan termasuk salah satu kabupaten tertinggal di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 131 tahun 2015 (mediajatim.com, Mei 2019). Berdasarkan peraturan tersebut kabupaten tertinggal di Jawa Timur

adalah Bangkalan, Bondowoso, Situbondo, dan Sampang. Bangkalan dibandingkan dengan empat kabupaten tertinggal lainnya tersebut, memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling rendah selama empat tahun terakhir (BPS, 2019). Agar suatu daerah berkembang dari daerah tertinggal menjadi daerah tidak tertinggal diperlukan daya saing yang harus dimiliki setiap daerah (Keban, 2012).

Upaya yang telah dilakukan Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan daya saing daerah dilakukan dengan pembangunan infrastruktur dan SDM (Sumber Daya Manusia). Menurut wakil bupati Kabupaten Bangkalan Ir. Mondir A Rofii, kedua hal tersebut sebagai pondasi atau penguatan potensi ekonomi yang ada. Selain pembangunan infrastruktur dan SDM, pemerintah Kabupaten Bangkalan juga memprioritaskan pada penurunan angka kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan, memperkecil kesenjangan desa dan kota, serta membuka investasi berskala besar di Kabupaten Bangkalan (surya.co.id, Maret 2016).

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan kepada upaya dalam peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan bidang lemahnya daya saing daerah kabupaten tersebut yang sesuai dengan hasil penelitian Huda, M. & Santoso, E. B. Berdasarkan pemaparan di atas dan hasil penelitian sebelumnya terkait daya saing daerah kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa daya saing daerah Kabupaten Bangkalan rendah. Daerah yang tidak berdaya saing, lama kelamaan pertumbuhan ekonomi daerah akan terus menurun. Oleh sebab itu diperlukan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan dengan memperhatikan indikator-indikator daya saingnya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berawal dari adanya konsep daya saing, secara konsep daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian Huda, M. telah melakukan penelitian tentang daya saing wilayah

Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dari hasil penelitian tersebut menghasilkan pemetaan daya saing wilayah kabupaten/Kota di Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Bangkalan, sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Timur, dari hasil penelitian berada pada kelompok Kabupaten/Kota yang daya saingnya rendah. Menurut catatan yang ada (BPS Kabupaten Bangkalan) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan cenderung meningkat namun lambat dan masih dibawah laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian tentang upaya apa yang perlu dilakukan terhadap wilayah Kabupaten Bangkalan agar daya saingnya meningkat. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam sebuah pertanyaan : “Upaya apa yang perlu dilakukan untuk menaikkan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan?”.

### **1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah merumuskan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan.

Adapun sasaran dari penelitian ini antara lain:

1. Mengeksplorasi karakteristik variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan
2. Menentukan urutan variabel penanganan dalam peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan
3. Merumuskan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan

### **1.4. Ruang Lingkup**

#### **1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah**

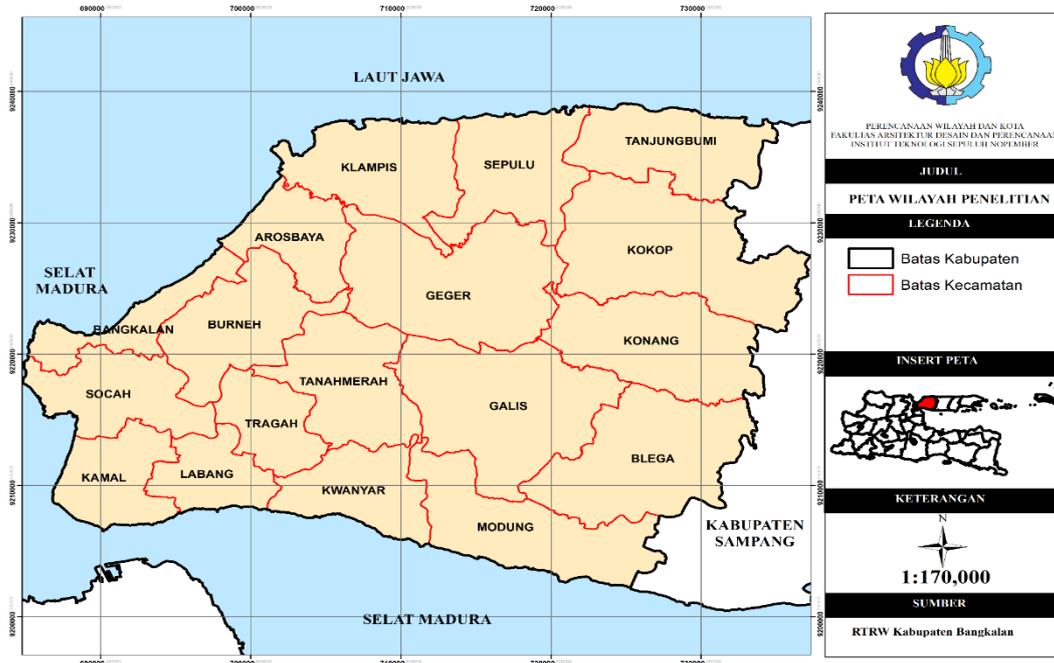
Ruang lingkup wilayah penelitian adalah Kabupaten Bangkalan. Secara astronomis, Kabupaten Bangkalan terletak antara  $6^{\circ} 51'$  –  $7^{\circ} 11'$  LS dan antara  $112^{\circ} 40'$  –  $113^{\circ} 08'$  BT. Adapun batas-batas wilayah penelitian sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa  
Sebelah Timur : Kabupaten Sampang

Sebelah Selatan : Selat Madura

Sebelah Barat : Selat Madura

Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Bangkalan adalah 126.014 Ha yang terbagi dalam 18 kecamatan.



**Gambar 1. Peta Kabupaten Bangkalan**  
*Sumber: Penulis, 2019*

### **1.4.2. Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini membahas terkait upaya dalam peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan variabel-variabel yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan penelitian terdahulu oleh Huda, M. & Santoso, E. B. (2014).

### **1.4.3. Ruang Lingkup Substansi**

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah terkait merumuskan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut dilakukan dengan telaah indikator dan variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan penelitian terdahulu, mengeksplorasi karakteristik variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan, analisis untuk menentukan urutan variabel penanganan dalam peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan, serta analisis untuk merumuskan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan.

## **1.5. Manfaat**

### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perencanaan wilayah dan kota terkait peningkatan daya saing daerah berdasarkan indikator-indikator daya saing daerah.

### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan, mengingat daya saing daerah tersebut rendah.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, manfaat penelitian, sistematika penulisan, serta kerangka penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, berisi studi literatur terkait teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Dalam bab ini akan dieksplorasi terkait teori pengembangan wilayah, ekonomi wilayah, dan daya saing daerah.

**BAB III METODE PENELITIAN**, berisi mengenai metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**, berisi gambaran umum wilayah studi serta analisis dan pembahasan terkait penelitian.

**BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**, berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

## 1.7. Kerangka Penelitian

### LATAR BELAKANG

Konsep daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Huda, M. & Santoso, E. B. (2014), Kabupaten Bangkalan masuk kelompok yang berdaya saing rendah.

#### RUMUSAN MASALAH

“Upaya apa yang perlu dilakukan dalam peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan?”

#### TUJUAN

Merumuskan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan.

#### SASARAN

1. Mengeksplorasi karakteristik variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan
2. Menentukan urutan variabel penanganan dalam peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan
3. Merumuskan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan

#### OUTPUT

Upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan

*“Halaman sengaja dikosongkan”*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengembangan Wilayah**

Pengembangan wilayah merupakan salah satu program pembangunan yang bertujuan untuk mendorong laju pertumbuhan suatu daerah yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah (Harun dalam Huda, 2014). Pengembangan wilayah merupakan bagian dari strategi pembangunan wilayah yaitu sebagai proses perumusan dan pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan (Myrdal dalam Widi, 2015).

Santoso (2006), menyatakan pengembangan wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial yang mempertimbangkan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang terpadu. Pada dasarnya pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi potensi, dan permasalahan wilayah yang bersangkutan, karena kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya (Riyadi dalam Ambardi dan Socia, 2002).

Konsep pengembangan wilayah dilaksanakan melalui optimasi pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya secara harmonis, serasi, dan terpadu melalui pendekatan yang bersifat komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan (Djakapermana dalam Huda, 2014). Pengembangan wilayah yang mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumber daya alam, buatan, manusia, dan sistem aktivitas), perlu didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya. Percepatan pengembangan wilayah

dapat dilakukan dengan mengutamakan peningkatan daya saing (Sukanto, 2009).

## **2.2 Ekonomi Wilayah**

Ekonomi wilayah membahas suatu wilayah secara keseluruhan atau melihat berbagai wilayah dengan potensi yang beragam, dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah artinya kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut (Tarigan, 2004). Pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan dampak dari kebijakan ekonomi pemerintah yang dibentuk oleh berbagai macam sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya lokal dan menggambarkan perkembangan pendapatan masyarakat pada suatu tahun tertentu dengan tahun sebelumnya (Widi, 2015).

Menurut Bhinadi (2003), terdapat tiga macam ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output, digunakan untuk menilai pertumbuhan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan tenaga kerja dan modal pada wilayah tersebut. Selain itu pertumbuhan output per tenaga kerja, sering digunakan sebagai indikator adanya perubahan daya saing wilayah tersebut (melalui pertumbuhan produktivitas). Serta pertumbuhan output per kapita, digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi. Daerah yang tidak berdaya saing lama-kelamaan pertumbuhan ekonomi daerahnya akan menurun (Santoso, 2009).

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan absolut kaya akan sumber daya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan (Sirojuzilam, 2008). Setiap daerah atau wilayah mempunyai potensi lokal berbeda-beda, sehingga dari potensi lokal inilah daerah atau

wilayah tersebut menggerakkan perekonomiannya, khususnya dari sudut keunggulan yang dimilikinya (Miraza, 2010).

### **2.3 Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah berkembang dari daya saing yang digunakan untuk perusahaan dan negara. Kemudian dalam publikasi *European Competitiveness Index* yaitu terkait pemeringkatan daya saing yang tidak hanya antar negara, tapi juga antar daerah. Sejalan dengan hal tersebut, meningkatnya konsensus yang menyatakan bahwa daerah sebagai unit spasial yang bersaing untuk menarik masuknya investasi dan tingkat dimana transfer pengetahuan menyebar, sehingga menghasilkan aglomerasi, atau klaster dari perusahaan-perusahaan jasa dan industri (PPSK Bank Indonesia-LP3E FE UNPAD, 2008). Daya saing suatu perusahaan akan menentukan daya saing negara atau daerah dan sebaliknya daya saing negara atau daerah akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan suatu perusahaan (Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Huda, 2014).

Daya saing daerah menurut definisi yang dibuat oleh UK-DTI (Departemen Perdagangan dan Industri Inggris) adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Sementara CURDS (*Centre for Urban and Regional Studies*) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.

Studi yang pernah dilakukan oleh Bank Indonesia dan FE Unpad pada tahun 2001, menyebutkan bahwa daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Selain itu, Huggins (2007) dalam publikasi

“*UK Competitiveness Index*” mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan dari perekonomian untuk menarik dan mempertahankan perusahaan-perusahaan dengan kondisi yang stabil atau dengan pangsa pasar yang meningkat dalam aktivitasnya, dengan tetap mempertahankan atau meningkatkan standar kehidupan bagi semua yang terlibat di dalamnya.

Menurut Frinces (2011), mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan daerah untuk menumbuh kembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah bersangkutan dalam menghasilkan outputnya (produk dan jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk dan jasa) yang dihasilkan pihak lain di lain daerah secara global.

Berdasarkan pemaparan mengenai definisi daya saing daerah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa daya saing daerah adalah kemampuan suatu daerah yang menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dan berkelanjutan namun tetap terbuka pada persaingan domestik maupun global, yang direfleksikan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tingginya daya tarik investasi pada daerah tersebut.

### **2.3.1 Konsep Daya Saing Daerah**

Konsep daya saing daerah merupakan konsep pengembangan daya saing untuk perusahaan dan negara. Pengembangan aplikasi dan konsep daya saing untuk di tingkat perusahaan banyak dipengaruhi oleh pemikiran Michael Porter, kemudian diadopsi dan dikembangkan untuk tingkat negara sebagai daya saing global melalui lembaga *World Economic Forum (Global Competitiveness Report)* dan

*International Institute for Management Development (World Competitive Yearbook).*

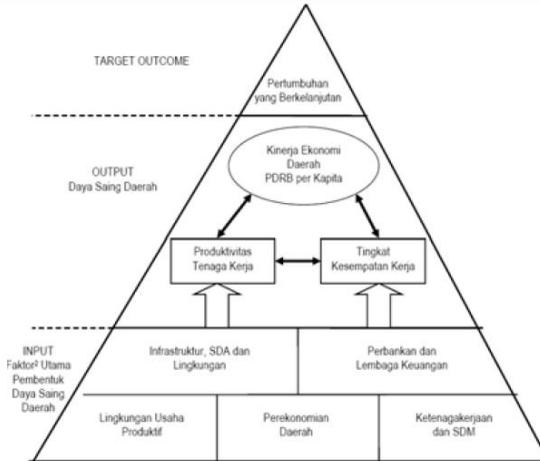
Menurut Porter (2000), menjelaskan pentingnya daya saing karena tiga hal yaitu mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri; dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, baik dalam konteks regional ekonomi maupun entitas pelaku ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat; serta kepercayaan bahwa mekanisme pasar lebih menciptakan efisiensi.

Menurut Martin dan Tyler (2003) daerah maupun negara saling berkompetisi karena beberapa hal antara lain untuk investasi, melalui kemampuan daerah untuk menarik masuknya modal asing, swasta, dan modal publik; untuk tenaga kerja, dengan kemampuan untuk menarik masuknya tenaga kerja yang terampil, *entrepreneur-entrepreneur* dan tenaga kerja yang kreatif, dengan cara menyediakan lingkungan yang kondusif dan pasar tenaga kerja domestik; serta untuk teknologi, melalui kemampuan daerah untuk menarik aktivasi inovasi dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Huggins (2003), konsep daya saing daerah dihasilkan oleh interaksi yang kompleks antara input, output, dan outcome. Sehingga keberhasilan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain ditentukan oleh keterkaitan antar tiga hal tersebut. Daya saing daerah terkait juga dengan faktor-faktor nonekonomi, seperti parameter kondisi politik, sosial dan budaya masyarakat.

Konsep daya saing daerah digambarkan dalam sebuah bentuk piramida yang dapat dilihat pada gambar 2.1. Gambar tersebut memperlihatkan daya saing daerah dibentuk oleh indikator-indikator utama (input) baik yang bersifat *endowment* maupun yang diakibatkan oleh interaksi aktivitas kegiatan masyarakatnya seperti adanya perbedaan dalam lingkungan usaha produktif, struktur dan kondisi perekonomian daerah, perbedaan dalam kualitas dan kuantitas sum-

ber daya manusia di masing-masing daerah, seperti adanya perbedaan pada tingkat kesempatan kerja yang tercipta serta produktivitas tenaga kerja. Perbedaan-perbedaan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan pada tingkat keberlanjutan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dari masing-masing daerah.



**Gambar 3.1 Piramida Daya Saing Daerah**

*Sumber: PPSK Bank Indonesia-LP3E FE UNPAD (2008)*

### 2.3.2 Indikator Daya Saing Daerah

Daya saing daerah dapat diukur dengan beberapa kategori indikator. Penentuan indikator daya saing daerah merupakan bagian yang penting dalam analisis daya saing daerah (Hidayat, 2012).

Berdasarkan Munir (2002), dalam mengukur daya saing daerah setidaknya ada empat kategori penilaian antara lain (1) struktur ekonomi yaitu komposisi ekonomi, produktivitas, output dan nilai tambah, serta tingkat investasi asing atau domestik, (2) potensi wilayah yaitu yang *non-tradeable* seperti lokasi, prasarana, sumber daya alam, *amenity*, biaya hidup dan bisnis, citra daerah, (3) Sumber

Daya Manusia yaitu kualitas SDM yang mendukung kegiatan ekonomi, (4) kelembagaan yaitu konsistensi kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat yang pro-PEL, serta budaya yang mendukung produktivitas.

Sementara itu menurut Pitter Abdullah (2002) dalam studinya yang berjudul “Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia”, menyatakan bahwa indikator-indikator utama penentu daya saing daerah antara lain: (1) Perekonomian Daerah, (2) Keterbukaan, (3) Sistem Keuangan, (4) Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, (5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (6) Sumber Daya Manusia, (7) Kelembagaan, (8) *Governance* dan Kebijakan Pemerintah, serta (9) Manajemen dan Ekonomi Makro.

Selain itu menurut Gardiner, Martin, Tyler (2004) yang membuat model piramida daya saing daerah dengan mencari hubungan beberapa indikator utama yang dapat membangun daya saing daerah yaitu mencakup indikator input, output, dan outcome. Indikator input pembentuk daya saing terdiri dari 5 indikator utama antara lain:

a. Lingkungan Usaha Produktif

Merupakan ukuran seberapa besar daerah dapat menarik minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan usaha di daerah tersebut dengan cara menciptakan kondisi ideal bagi dunia usaha dalam melakukan aktivitasnya. Lingkungan usaha produktif mempengaruhi daya saing daerah berdasarkan prinsip berikut:

- Iklim usaha yang kondusif merupakan syarat mutlak bagi masuknya investasi sehingga dapat mendorong naiknya posisi daya saing daerah.
- Iklim usaha yang kondusif dibentuk oleh kebijakan dan peraturan daerah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat
- Standar kehidupan masyarakat daerah semakin tinggi sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha di daerah

- Keterbukaan mengukur seberapa besar perekonomian daerah terbuka terhadap perdagangan internasional ataupun antar daerah. Keberhasilan suatu daerah dalam perdagangan internasional merefleksikan daya saing perekonomian daerah tersebut.

b. Perekonomian Daerah

Perekonomian dan keuangan daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari perekonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Indikator kinerja perekonomian daerah mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip sebagai berikut:

- Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya dalam jangka pendek
- Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi masa lalu
- Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi pada suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu daerah, maka perusahaan-perusahaan akan bersaing semakin kompetitif
- Peran pemerintah daerah dari sisi anggaran dapat menjadi faktor pendorong meningkatnya daya saing daerah

c. Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia

SDM dan ketenagakerjaan mengukur ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang mendukung terciptanya daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi. SDM dan ketenagakerjaan mempengaruhi daya saing daerah berdasarkan prinsip berikut:

- Angkatan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu daerah
- Pendidikan adalah cara paling baik dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas

- Sikap dan nilai yang dianut oleh tenaga kerja juga menentukan daya saing suatu daerah
  - Kualitas hidup masyarakat suatu daerah menentukan daya saing daerah tersebut
- d. **Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan**  
Infrastruktur dalam hal ini merupakan indikator seberapa besar sumber daya seperti modal fisik, geografi, dan sumber daya alam dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah. Indikator ini mendukung daya saing daerah melalui prinsip sebagai berikut:
- Modal fisik berupa infrastruktur baik ketersediaan maupun kualitasnya mendukung aktivitas ekonomi daerah
  - Modal alamiah baik berupa kondisi geografi maupun kekayaan alam yang terkandung didalamnya juga mendorong aktivitas perekonomian daerah
  - Teknologi informasi yang maju merupakan infrastruktur yang mendukung berjalannya aktivitas bisnis di daerah yang berdaya saing
- e. **Perbankan dan Lembaga Keuangan**  
Mengukur seberapa baik sistem finansial perbankan maupun non-perbankan dapat memfasilitasi aktivitas perekonomian yang memberikan nilai tambah. Sistem keuangan suatu daerah akan mempengaruhi alokasi faktor produksi yang terjadi di perekonomian daerah tersebut. Indikator ini mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip sebagai berikut:
- Sistem keuangan yang baik mutlak diperlukan dalam memfasilitasi aktivitas perekonomian daerah
  - Sektor keuangan yang efisien dan terintegrasi secara nasional mendukung daya saing daerah
  - Ketersediaan dana bagi dunia usaha diperlukan bagi memfasilitasi aktivitas perekonomian daerah yang digerakkan sektor swasta

Untuk indikator output yang membangun daya saing mencakup produktivitas tenaga kerja, tingkat kesempatan kerja, dan PDRB per kapita.

Menurut Lengyel (2007), faktor-faktor yang menentukan daya saing daerah ada dua yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari faktor-faktor pembangunan antara lain (1) sumber daya alam, (2) penelitian dan pengembangan teknologi, (3) infrastruktur dan modal usaha, (4) investasi, (5) UMKM, dan (6) kelembagaan dan modal sosial. Faktor-faktor pembangunan tersebut dalam jangka pendek dapat mempengaruhi output ekonomi (PDRB), produktivitas tenaga kerja maupun laju pertumbuhan penduduk yang bekerja. Sedangkan faktor tidak langsung adalah faktor yang mempengaruhi daya saing daerah dan dalam jangka panjang antara lain faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan proses budaya.

Menurut Tambunan (2011), faktor penentu yang membedakan tingkat daya saing suatu daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya antara lain (1) Infrastruktur. Infrastruktur merupakan faktor penentu dari kelancaran proses pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi. Terbatasnya jumlah dan kualitas infrastruktur dapat menghambat kelancaran dan mengurangi tingkat efisiensi dalam distribusi faktor produksi maupun *output*. Akibatnya biaya produksi meningkat yang selanjutnya mengurangi tingkat daya saing, terutama daya saing terhadap harga.

Faktor penentu selanjutnya adalah, (2) Iklim Berusaha. Iklim berusaha suatu negara mempengaruhi daya saing negara terutama adanya kehadiran penanam modal asing (PMA). Iklim usaha yang tidak kondusif berarti iklim berinvestasi yang tidak baik, artinya kemungkinan mendapatkan keuntungan dalam melakukan bisnis akan berkurang dan dapat mengurangi niat PMA untuk masuk ke negara tersebut.

Selain itu terdapat faktor, (3) Teknologi dan Inovasi. Dengan adanya teknologi dan inovasi, yang perlu untuk

diamati yaitu sumber teknologi baru dan kemampuan perusahaan atau negara dalam menyerap dan memanfaatkan teknologi yang baru secara optimal dalam menciptakan produk-produk dan proses-proses produksi yang efisien, lebih ramah lingkungan, lebih aman, dan menghasilkan output lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik.

Faktor penentu daya saing daerah menurut Tambunan (2011) selanjutnya adalah, (4) Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu dalam menentukan daya saing negara. SDM merupakan hal penting karena teknologi baru dan inovasi serta penemuan baru tidak akan terjadi jika tidak terdapat SDM yang berkualitas tinggi. SDM dalam hal ini tidak hanya pekerja, tetapi juga pengusaha dan peneliti atau masyarakat umum.

Selain itu terdapat penelitian-penelitian terkait daya saing yang dalam penelitian tersebut menggunakan indikator-indikator tertentu.

*European Competitiveness Index* (2006) merupakan publikasi tentang pemeringkatan daya saing yang mengukur, membandingkan, dan meneliti daya saing bukan hanya antar negara tetapi juga antar daerah di Eropa. Penelitian tersebut menggunakan Model Tiga Faktor (*Three Factor Model*) yang merupakan kerangka kinerja linear untuk menganalisis daya saing berdasarkan faktor input, output, dan outcome. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut antara lain kreativitas (*creativity*), kinerja ekonomi (*economic performance*), infrastruktur dan aksesibilitas, tenaga kerja terdidik (*knowledge employment*), serta pendidikan (*education*).

Studi mengenai daya saing juga dilakukan di Cina oleh World Bank pada tahun 2006. Studi ini menggunakan indikator-indikator untuk melihat iklim investasi. indikator tersebut antara lain potensi pasar (*market potential*), fleksibilitas pasar tenaga kerja (*labor market flexibility*), sumber daya teknologi dan karakteristik keahlian (*skill and*

*technology endowments*), partisipasi sektor swasta (*private sector participation*), efisiensi birokrasi pemerintah (*government efficiency*), kepastian dan perlindungan perjanjian usaha serta hak cipta (*contract enforcement*), akses terhadap lembaga keuangan (*access to finance*), dan kualitas hidup masyarakat (*harmonious society*).

Sementara itu studi yang pernah dilakukan di Indonesia pernah dilakukan oleh Bank Indonesia dan FE Unpad tahun 2001. Studi tersebut mencakup tingkat provinsi. Indikator-indikator utama yang dianggap menentukan daya saing daerah adalah perekonomian daerah; keterbukaan; sistem keuangan; infrastruktur dan sumber daya alam; ilmu pengetahuan dan teknologi; sumber daya manusia; institusi, tata pemerintahan (*governance*) dan kebijakan pemerintah; serta manajemen dan ekonomi mikro.

Studi mengenai daya saing daerah di Indonesia juga dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Penelitian tersebut lebih fokus kepada daya saing investasi untuk tingkat kabupaten/kota. Penelitian tersebut telah dilakukan beberapa kali yaitu pada tahun 2002 hingga 2005. Penelitian yang dilakukan oleh KPPOD selama beberapa tahun tersebut menggunakan faktor yang sama. faktor yang digunakan antara lain kelembagaan; keamanan, sosial, dan politik, ekonomi daerah; tenaga kerja; dan infrastruktur fisik.

PPSK Bank Indonesia bekerja sama dengan LP3E FE Unpad pada tahun 2008 melakukan studi terkait daya saing daerah dalam publikasinya yang berjudul “Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”. Indikator-indikator yang digunakan merupakan aplikasi dari model piramida daya saing daerah yang dirumuskan oleh Gardiner, Martin, Tyler (2004).

Penelitian terkait daya saing lainnya dilakukan oleh Irawati dkk (2012). Penelitian tersebut mengenai pengukuran tingkat daya saing daerah di wilayah Provinsi Sulawesi

Tenggara. Indikator yang digunakan antara lain perekonomian daerah; infrastruktur dan sumber daya alam; serta sumber daya manusia.

Penelitian lain terkait daya saing daerah juga dilakukan oleh Anita Nur Millah dan Hadi Sasana (2013). Penelitian tersebut digunakan untuk mengukur tingkat daya saing kota di Jawa Tengah. Faktor yang digunakan antara lain perekonomian daerah; infrastruktur dan sumber daya alam; serta sumber daya manusia.

Penelitian daya saing daerah juga dilakukan oleh Miftakhul Huda (2014). Penelitian tersebut terkait pengembangan daya saing daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Indikator yang digunakan dalam mengukur daya saing daerah pada penelitian tersebut antara lain indikator input yaitu perekonomian daerah; sumber daya manusia dan ketenagakerjaan; lingkungan usaha produktif; infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan; perbankan dan lembaga keuangan. Serta indikator output yaitu produktivitas tenaga kerja; PDRB per kapita; dan tingkat kesempatan kerja.

Studi terkait daya saing juga dilakukan oleh Tengku Siti Fatimah (2015). Studi tersebut bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi penentu daya saing ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai. Indikator yang digunakan dalam studi tersebut antara lain kelembagaan; perekonomian daerah; sosial politik; tenaga kerja dan produktivitas; dan infrastruktur fisik.

Penelitian terkait daya saing daerah juga dilakukan oleh Eka Putri Anugrahing Widi (2015). Penelitian tersebut menganalisis daya saing daerah Kabupaten Kediri berdasarkan empat faktor antara lain faktor perekonomian dan keuangan daerah; SDM dan ketenagakerjaan; infrastruktur dan SDA; serta lingkungan usaha produktif.

Selain itu pada tahun 2017 juga dilakukan penelitian terkait daya saing daerah yang dilakukan oleh Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto. Penelitian tersebut bertujuan menga-

nalisis tipologi daya saing kabupaten/kota di Jawa Timur. Indikator yang digunakan antara lain kekuatan daerah, pelayanan umum, dan iklim investasi.

Selengkapnya penyajian indikator-indikator daya saing daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table 3.1 Kajian Indikator Daya Saing Daerah**

<b>No</b>	<b>Sumber</b>	<b>Indikator</b>
1	Munir (2002)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur Ekonomi</li> <li>• Potensi Wilayah</li> <li>• Sumber Daya Manusia</li> <li>• Kelembagaan</li> </ul>
2	Pitter Abdullah (2002)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perekonomian Daerah</li> <li>• Keterbukaan</li> <li>• Sistem Keuangan</li> <li>• Infrastruktur dan Sumber Daya Alam</li> <li>• Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</li> <li>• Sumber Daya Manusia</li> <li>• Kelembagaan</li> <li>• <i>Governance</i> dan Kebijakan Pemerintah</li> <li>• Manajemen dan Ekonomi Makro</li> </ul>
3	Gardiner, Martin, Tyler (2004)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Input Lingkungan Usaha Produktif; Perekonomian Daerah; Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia; Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan; Perbankan dan Lembaga Keuangan.</li> <li>• Ouput</li> </ul>

No	Sumber	Indikator
		Produktivitas tenaga kerja, Tingkat kesempatan kerja, dan PDRB per kapita.
4	Imro Lengyel (2007)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Langsung Sumber daya alam, penelitian dan pengembangan teknologi, infrstruktur dan modal manusia, investasi, UMKM, Kelembagaan dan modal sosial</li> <li>• Tidak Langsung Sosial, ekonomi, lingkungan, dan proses budaya</li> </ul>
5	Tambunan (2011)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur</li> <li>• Iklim Usaha</li> <li>• Teknologi dan Inovasi</li> <li>• Sumber Daya Manusia</li> </ul>
6	<i>European Competitiveness Index (2006)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreativitas (<i>Creativity</i>)</li> <li>• Kinerja Ekonomi (<i>Economic Performance</i>)</li> <li>• Infrastruktur dan Aksesibilitas</li> <li>• Tenaga Kerja Terdidik (<i>Knowledge Employment</i>)</li> <li>• Pendidikan (<i>Education</i>)</li> </ul>
7	World Bank (2006)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi Pasar (<i>Market Potential</i>)</li> <li>• Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja (<i>Labor Market Flexibility</i>)</li> </ul>

No	Sumber	Indikator
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Daya Teknologi dan Karakteristik Keahlian (<i>Skill And Technology Endowments</i>)</li> <li>• Partisipasi Sektor Swasta (<i>Private Sector Participation</i>)</li> <li>• Efisiensi Birokrasi Pemerintah (<i>Government Efficiency</i>)</li> <li>• Kepastian dan Perlindungan Perjanjian Usaha serta Hak Cipta (<i>Contract Enforcement</i>)</li> <li>• Akses Terhadap Lembaga Keuangan (<i>Access To Finance</i>)</li> <li>• Kualitas Hidup Masyarakat (<i>Harmonious Society</i>)</li> </ul>
8	Bank Indonesia dan FE Unpad (2001)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perekonomian Daerah</li> <li>• Keterbukaan</li> <li>• Sistem Keuangan</li> <li>• Infrastruktur dan Sumber Daya Alam</li> <li>• Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</li> <li>• Sumber Daya Manusia</li> <li>• Institusi, Tata Pemerintahan (Governance) dan Kebijakan Pemerintah</li> <li>• Manajemen dan Ekonomi Mikro</li> </ul>
9	Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan</li> <li>• Keamanan, Sosial, dan Politik</li> <li>• Ekonomi Daerah</li> </ul>

No	Sumber	Indikator
	(KPPOD), 2002-2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenaga Kerja</li> <li>• Infrastruktur Fisik</li> </ul>
10	PPSK Bank Indonesia-LP3E FE Unpad (2008)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Input Lingkungan Usaha Produktif; Perekonomian Daerah; Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia; Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan; Perbankan dan Lembaga Keuangan.</li> <li>• Ouput Produktivitas tenaga kerja, Tingkat kesempatan kerja, dan PDRB per kapita.</li> </ul>
11	Ira Irawati dkk (2012)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perekonomian Daerah</li> <li>• Infrastruktur dan Sumber Daya Alam</li> <li>• Sumber Daya Manusia</li> </ul>
12	Anita Nur Millah dan Hadi Sasana (2013)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perekonomian Daerah</li> <li>• Infrastruktur dan Sumber Daya Alam</li> <li>• Sumber Daya Manusia</li> </ul>
13	Miftakhul Huda (2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Input Perekonomian Daerah; Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan; Lingkungan Usaha Produktif; Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan; Perbankan dan Lembaga Keuangan.</li> </ul>

No	Sumber	Indikator
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Output Produktivitas Tenaga Kerja; PDRB Per Kapita; dan Tingkat Kesempatan Kerja.</li> </ul>
14	Tengku Siti Fatimah (2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelembagaan</li> <li>• Perekonomian Daerah</li> <li>• Sosial Politik</li> <li>• Tenaga Kerja dan Produktivitas</li> <li>• Infrastruktur Fisik</li> </ul>
15	Eka Anugrahing Putri Widi (2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perekonomian dan Keuangan Daerah</li> <li>• SDM dan Ketenagakerjaan</li> <li>• Infrastruktur dan SDA</li> <li>• Lingkungan Usaha Produktif</li> </ul>
16	Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekuatan Daerah</li> <li>• Pelayanan Umum</li> <li>• Iklim Investasi</li> </ul>

*Sumber: Telusur Pustaka, 2019*

### **2.3.3 Upaya-Upaya Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah**

Dalam penjelasan pada sub bab-sub bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa daya saing daerah merupakan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi secara berkelanjutan namun tetap terbuka pada persaingan nasional maupun internasional. Jika suatu daerah memiliki daya saing yang rendah, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dapat terus menurun yang mengakibatkan daerah tersebut tidak dapat berkembang. Maka diperlukan upaya-upaya dalam meningkatkan daya saing daerah.

Upaya meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan sekaligus faktor yang berpengaruh terhadap daya saingnya telah dirumuskan dengan pendekatan Porter's Diamond berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Selvionita Daiman Putri, Teguh Hadi Priyono, dan P. Edi Suwanto (2016) dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Sektor Basis dan Potensi Daya Saing Wilayah Kabupaten Bangkalan Paska Berdirinya Jembatan Suramadu". Upaya-upaya tersebut dilihat dari empat elemen antara lain kondisi faktor, kondisi permintaan, industri pendukung, dan industri terkait.

Upaya meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan dilihat dari kondisi faktor oleh Selvionita dkk (2016), berupa (1) peningkatan dalam hal IPM. Dimana IPM merupakan cerminan dari kualitas manusia yang ditinjau dari aspek pendidikan, kesehatan, dan penghasilan. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Bangkalan merupakan daerah relatif tertinggal dibandingkan kondisi kabupaten/kota lain dalam lingkup Jawa Timur maupun nasional. Selain itu adanya jembatan Suramadu, sebagai media yang diharapkan mampu mengintegrasikan pembangunan di Pulau Madura dan Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan. Dengan adanya jembatan Suramadu, merupakan langkah awal dalam meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan, (2)

kelancaran arus transportasi, yang dapat memicu terjadinya pertumbuhan wilayah industri maupun permukiman sehingga pada gilirannya dapat memicu pertumbuhan ekonomi.

Upaya meningkatkan daya saing daerah berdasarkan Selvionita dkk (2016) selanjutnya dilihat dari kondisi permintaan adalah terkait konektivitas. Dalam peningkatan daya saing daerah, perlu adanya (3) peningkatan konektivitas antar wilayah dan konektivitas dari lokasi produksi ke outlet pemasaran dalam hal pengembangan sektor ekonomi yang potensial pada daerah tersebut. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM terutama untuk pengembangan ekonomi lokal.

Selain kondisi faktor dan kondisi permintaan, dalam meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan Selvionita dkk (2016) adalah terkait industri pendukung dan industri terkait. Industri yang dimaksud adalah industri sektor pertanian, dikarenakan sektor pertanian berdasarkan hasil analisis penelitian tersebut adalah sektor basis Kabupaten Bangkalan. Upaya yang dilakukan berupa (4) program penjualan bibit berkualitas dengan harga murah dari pemerintah untuk para petani, (5) penyediaan pestisida dan insektisida yang ramah lingkungan, dan (6) pengembangan pengetahuan sistem pertanian bagi petani.

Ukuran keberhasilan meningkatnya daya saing daerah adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu ([keuda.kemendagri.go.id](http://keuda.kemendagri.go.id), 2013). Dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, prioritas yang perlu dilakukan pemerintah adalah dukungan tatakelola dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang menjadi hal dasar untuk meningkatkan daya saing daerah.

Usaha dalam meningkatkan tata kelola dan sinergi antara pemerintan pusat dan daerah berdasarkan yang disebutkan dalam laman kemendagri tersebut adalah melalui (1) membenahi kapabilitas pemerintah daerah, (2) kualitas sumber daya manusia, (3) pengembangan kualitas aparatur

pemerintah daerah, (4) pengelolaan anggaran, dan (5) pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan publik. Selain kelima hal mendasar tersebut, upaya yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka membangun daya saing daerah adalah (6) memetakan potensi daerah berikut *supply* dan *demand*, (7) memperkuat seluruh infrastruktur ekonomi untuk mendorong potensi daerah (termasuk SDM), (8) menguasai rantai pasokan (hulu-hilir) untuk menekan inefisiensi (sinergi provinsi dan kabupaten/kota), (9) menciptakan inovasi produk, serta (10) mendorong ekonomi rakyat dengan meningkatkan penggunaan produksi lokal.

Selain itu, upaya dalam meningkatkan daya saing daerah menurut Tulus Tambunan (2006) dalam artikelnya, menyebutkan bahwa dua prioritas antara lain pengembangan SDM dan infrastruktur. Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimaksud adalah menyangkut kualitasnya yaitu IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Selain itu juga menyangkut ketersediaan kesempatan kerja.

Upaya meningkatkan daya saing daerah menurut Kementerian Keuangan dalam “Kajian Atas Kebijakan Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” dilakukan dengan (1) menetapkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, (2) memperkuat kelembagaan dan tatakelola, serta (3) membangun infrastruktur.

Upaya meningkatkan daya saing daerah menurut Simanjuntak (2015) yang disampaikan dalam seminar Segmen Integrasi ECOSOC, upaya tersebut antara lain (1) menciptakan iklim investasi UMKM, (2) memberdayakan sektor informal, serta (3) peningkatan kinerja aparatur dalam tingkatan pusat maupun daerah.

## 2.4 Penelitian Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Penelitian yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Potensi Daerahnya” oleh Huda, M. & Santoso, E. B. (2014). Penelitian tersebut menentukan kemampuan daya saing daerah beserta pemetaannya. Sasaran dalam penelitian tersebut antara lain:

- Mengukur kemampuan daya saing kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan indikator daya saing daerah
- Melakukan pemetaan daya saing daerah berdasarkan indikator daya saing
- Merumuskan pengembangan daya saing berdasarkan potensi daya saing tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Dalam mengukur kemampuan daya saing kabupaten/kota di Jawa Timur, penelitian yang dilakukan oleh Huda, M. & Santoso, E. B. (2014) menggunakan sistem skor daya saing indikator input dan indikator output setiap kabupaten/kota yang dibandingkan dengan skor rata-rata indikator input dan skor rata-rata indikator output seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Penelitian tersebut menggunakan indikator dan variabel yang dapat dilihat pada **tabel 2.2**.

Hasil pengukuran daya saing daerah diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Klasifikasi tersebut dilakukan dengan membandingkan antara skor indikator kabupaten/kota dengan skor indikator rata-rata Jawa Timur. Empat kelompok tersebut yaitu kabupaten/kota yang memiliki daya saing tinggi dari sisi input, maupun output rata-rata Jawa Timur; kabupaten/kota yang memiliki skor input daya saing lebih besar dari rata-rata skor indikator input Jawa Timur, tapi skor output lebih kecil dari rata-rata skor indikator output Jawa Timur; kabupaten/kota yang memiliki skor output diatas rata-rata Jawa Timur, tetapi skor input dibawah rata-rata Jawa Timur;

serta kabupaten/kota yang memiliki skor input dan output dibawah rata-rata Jawa Timur.

Hasil penelitian tersebut adalah tingkat daya saing beserta rumusan pengembangan daya saing daerah kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan kategori variabelnya. Kabupaten yang memiliki tingkat daya saing rendah yaitu skor input dan output dibawah rata-rata Jawa Timur salah satunya adalah Kabupaten Bangkalan yang akan menjadi ruang lingkup penelitian ini.

**Table 3.2 Indikator dan Variabel yang Digunakan pada Penelitian Sebelumnya**

No	Sub Indikator	Variabel
<b>Indikator Input</b>		
1	<b>Indikator Perekonomian dan Keuangan Daerah</b>	
	Produktivitas Sektoral	Produktivitas sektor primer
		Produktivitas sektor sekunder
		Produktivitas sektor tersier
	Keuangan Daerah	Kapasitas fiskal daerah
		<i>Government size</i>
Belanja pelayanan publik per kapita		
2	<b>Indikator Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan</b>	
	Sumber Daya Manusia	Jumlah penduduk
		Rasio ketergantungan
		Rata-rata lama sekolah
		Angka harapan hidup penduduk
	Ketenagakerjaan	Jumlah angkatan kerja
Laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja		
3	<b>Indikator Lingkungan Usaha Produktif</b>	
	Keterbukaan, Investasi, dan Kemahalan Daerah	Total investasi per kapita
		Indeks kemahalan daerah
		<i>Firm density</i>

No	Sub Indikator	Variabel
	Lingkungan Usaha Produktif oleh Masyarakat	Jumlah sektor basis daerah
		Presentase penduduk dengan pendidikan tertinggi universitas
		<i>Poverty Gap Indeks</i>
		Tingkat kepadatan penduduk
4	<b>Indikator Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan</b>	
	Kondisi Transportasi dan Komunikasi	Nilai tambah sektor pengangkutan per kapita
		Kondisi jalan dengan kategori baik
	Kondisi Energi	Presentase rumah tangga yang memakai penerangan utama
		Produksi listrik per kapita
	Kondisi Sumber Daya Alam, dan Lingkungan	Rasio luas lahan produktif
Sumber daya air per kapita		
Nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian per kapita		
5	<b>Indikator Perbankan dan Lembaga Keuangan</b>	
	Infrastruktur Perbankan dan Non Bank (Koperasi)	Jumlah kantor bank
		Rasio nilai volume usaha terhadap koperasi aktif
	Kinerja Perbankan dan Sektor Keuangan	Total kredit perbankan
Dana Pihak Ketiga (DPK)		

<b>No</b>	<b>Sub Indikator</b>	<b>Variabel</b>
<b>6</b>	<b>Indikator Output</b>	Nilai tambah sektor keuangan per kapita
		Produktivitas tenaga kerja
		PDRB per kapita
		Tingkat kesempatan kerja

*Sumber: Huda, 2014*

## 2.5 Sintesa Tinjauan Pustaka

### 2.5.1. Indikator dan Variabel Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pembahasan tinjauan pustaka sebelumnya dan sintesa indikator beserta variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu oleh Huda, M. & Santoso, E.B. (2014), dihasilkan bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki daya saing daerah yang rendah, yaitu termasuk klasifikasi kabupaten yang memiliki skor indikator input dan output dibawah rata-rata Jawa Timur.

Berdasarkan penelitian tersebut, dihasilkan tiga kelompok variabel yaitu keunggulan, rata-rata, dan kelemahan. Untuk lebih jelasnya variabel yang termasuk dalam kelompok keunggulan, rata-rata, dan kelemahan terhadap daya saing daerah Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada **tabel 2.3**. Pengelompokan variabel dalam kategori keunggulan, rata-rata, dan kelemahan didasarkan pada nilai setiap variabel per kabupaten/kota yang didasarkan pada perhitungan dengan rumus menggunakan metode perhitungan neraca daya saing yang dilakukan pada penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian ini yaitu oleh Huda, M. & Santoso, E. B. Sedangkan skor daya saing yang ditunjukkan pada tabel tidak menjadi dasar pengelompokan variabel menjadi kelompok keunggulan, rata-rata, dan kelemahan. Skor daya saing tersebut merupakan hasil perhitungan dari penelitian terdahulu yang menjadi dasar perhitungan peringkat daya saing berdasarkan indikator input dan indikator output.

**Table 3.3 Indikator dan Variabel Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan**

No	Sub Indikator	Variabel	Skor Daya Saing	Kategori		
				Keunggulan	Rata- Rata	Kelemahan
<b>Indikator Input</b>						
1	<b>Indikator Perekonomian dan Keuangan Daerah</b>					
	Produktivitas Sektoral	Produktivitas sektor primer	0,92		√	
		Produktivitas sektor sekunder	-0,19		√	
		Produktivitas sektor tersier	0,76		√	
	Keuangan Daerah	Kapasitas fiskal daerah	0,93			√
		<i>Government size</i>	0,87			√
		Belanja pelayanan publik per kapita	0,85			√
2	<b>Indikator Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan</b>					
	Sumber Daya Manusia	Jumlah penduduk	0,92		√	
		Rasio ketergantungan	-1,19			√
		Rata-rata lama sekolah	0,93			√
		Angka harapan hidup penduduk	0,93			√
	Ketenagakerjaan	Jumlah angkatan kerja	0,87		√	

No	Sub Indikator	Variabel	Skor Daya Saing	Kategori		
				Keunggulan	Rata- Rata	Kelemahan
		Laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja	0,85		√	
3	<b>Indikator Lingkungan Usaha Produktif</b>					
	Keterbukaan, Investasi, dan Kemahalan Daerah	Total investasi per kapita	0,43			√
		Indeks kemahalan daerah	-0,988		√	
		<i>Firm density</i>	0,45			√
	Lingkungan Usaha Produktif oleh Masyarakat	Jumlah sektor basis daerah	1,28	√		
		Presentase penduduk dengan pendidikan tertinggi universitas	0,41			√
		<i>Poverty Gap Indeks</i>	1,02		√	
Tingkat kepadatan penduduk		0,40			√	
4	<b>Indikator Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan</b>					
	Kondisi Transportasi dan Komunikasi	Nilai tambah sektor pengangkutan per kapita	0,194			√

No	Sub Indikator	Variabel	Skor Daya Saing	Kategori		
				Keunggulan	Rata- Rata	Kelemahan
	Kondisi Energi	Kondisi jalan dengan kategori baik	0,005			√
		Prosentase rumah tangga yang memakai penerangan utama	1,00		√	
	Kondisi Sumber Daya Alam, dan Lingkungan	Produksi listrik per kapita	0,13		√	
		Rasio luas lahan produktif	1,54	√		
		Sumber daya air per kapita	1,02		√	
		Nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian per kapita	0,261		√	
<b>5</b>	<b>Indikator Perbankan dan Lembaga Keuangan</b>					
Infrastruktur Perbankan dan Non Bank (Koperasi)	Jumlah kantor bank	0,500		√		
	Rasio nilai volume usaha terhadap koperasi aktif	0,181			√	
Kinerja Perbankan dan	Total kredit perbankan	0,220		√		

No	Sub Indikator	Variabel	Skor Daya Saing	Kategori		
				Keunggulan	Rata- Rata	Kelemahan
	Sektor Keuangan	Dana Pihak Ketiga (DPK)	0,384		√	
		Nilai tambah sektor keuangan per kapita	0,201			√
		<b>6</b> <b>Indikator Output</b>	Produktivitas tenaga kerja	0,162		
		PDRB per kapita	0,115			√
		Tingkat kesempatan kerja	0,203		√	

*Sumber:*

*Huda,*

*2014*

### 2.5.2. Indikator dan Variabel yang Digunakan dalam Penelitian

Berdasarkan penelitian Huda, M. & Santoso, E.B. yang menjadi dasar penelitian ini, variabel yang termasuk dalam kelompok kelemahan merupakan variabel yang mempengaruhi tingkat daya saing daerah Kabupaten Bangkalan rendah sehingga perlu ada tindak lanjut terhadap bidang atau variabel yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah. Oleh karena itu, indikator dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel kelemahan yaitu variabel yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan penelitian terdahulu yaitu dapat dilihat pada **tabel 2.4**.

**Table 3.4 Indikator dan Variabel yang Digunakan dalam Penelitian**

No	Indikator	Variabel
<b>Indikator Input</b>		
1	Perekonomian Daerah dan Keuangan Daerah	1.Kapasitas fiskal daerah
		2. <i>Government size</i>
		3.Belanja pelayanan publik per kapita
2	Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan	4.Rasio ketergantungan
		5.Rata-rata lama sekolah penduduk
		6.Angka harapan hidup
3	Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan	7. Nilai tambah sektor pengangkutan per kapita
		8. Kondisi jalan dengan kategori baik
4	Lingkungan Usaha Produktif	9. Total investasi per kapita
		10. <i>Firm density</i>

No	Indikator	Variabel
<b>Indikator Input</b>		
		11. Presentase penduduk dengan pendidikan tinggi universitas
		12. Tingkat kepadatan penduduk
5	Perbankan dan Lembaga Keuangan	13. Rasio nilai volume usaha terhadap koperasi aktif
		14. Nilai tambah sektor keuangan per kapita
6	<b>Indikator Output</b>	15. PDRB per kapita
		16. Produktivitas tenaga kerja

*Sumber: Huda, 2014*

**Table 3.5 Kajian Variabel Daya Saing Daerah**

<b>Indikator</b>	<b>Pengaruh Indikator terhadap Daya Saing</b>	<b>Variabel</b>	<b>Pengaruh Variabel terhadap Daya Saing</b>
<b>Indikator Input</b>			
Perekonomian dan keuangan daerah	Perekonomian dan keuangan daerah merupakan ukuran kinerja secara umum perekonomian daerah yang mempengaruhi daya saing melalui prinsip dimana kemakmuran daerah mencerminkan kinerja ekonomi daerah dan peran pemerintah dalam anggaran dapat menjadi faktor pendorong meningkatnya daya saing daerah (Gardiner, Martin, Tyler, 2004). Buruknya kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu yang dapat menyebabkan daya	Kapasitas fiskal daerah	Perekonomian dan keuangan daerah mempengaruhi daya saing daerah melalui kinerja ekonomi suatu daerah yang baik (Gardiner, Martin, Tyler, 2004). Untuk mengetahui kinerja ekonomi daerah yang baik dapat salah satunya dilihat melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah (Chodariyanti, 2015). Kinerja kemampuan keuangan daerah dapat dilihat salah satunya melalui analisis kapasitas fiskal daerah (Reksodihadioprojo, 2000). Semakin meningkat kapasitas fiskal daerah, maka semakin besar modal untuk membangun daerah yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan eko-

Indikator	Pengaruh Indikator terhadap Daya Saing	Variabel	Pengaruh Variabel terhadap Daya Saing
	saing daerah rendah ( <i>Institute for Management Development</i> dalam Departemen Keuangan, 2014).		nomi daerah (Saragih, 2016). Daerah yang berdaya saing baik diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula (Departemen Keuangan, 2014). Sehingga semakin tinggi kapasitas fiskal daerah, semakin meningkatkan daya saing daerah.
		<i>Government size</i>	Berdasarkan Bank Indonesia dan LP3E FE-UNPAD (2008), perekonomian dan keuangan daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari perekonomian daerah dimana kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi suatu daerah. <i>Government size</i> atau ukuran pemerintahan (konteks dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah) mempengaruhi kinerja pemerintah

Indikator	Pengaruh Indikator terhadap Daya Saing	Variabel	Pengaruh Variabel terhadap Daya Saing
			<p>daerah (Hutapea dkk, 2017). <i>Government size</i> pada penelitian ini tergantung pada pengeluaran pemerintah terhadap PDRB yang ada. Semakin kecil ukuran pemerintahan, menunjukkan daerah tersebut memiliki nilai PDRB yang tinggi dibandingkan dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Artinya daerah tersebut semakin mandiri, karena tingginya PDRB yang berasal dari dorongan kegiatan sektor-sektor dimasyarakat. PDRB menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumberdaya pembangunan yang dimilikinya (Sukirno dalam Ikbar, 2017). Dengan begitu pada gilirannya akan meningkatkan daya saing daerah tersebut. sehingga se-</p>

Indikator	Pengaruh Indikator terhadap Daya Saing	Variabel	Pengaruh Variabel terhadap Daya Saing
			<p>makin kecil <i>government size</i>, maka semakin meningkatkan daya saing daerah.</p>
		<p>Belanja pelayanan publik per kapita</p>	<p>Alokasi belanja (termasuk didalamnya belanja pelayanan publik) merupakan salah satu cara fundamental daerah otonom untuk meningkatkan potensi pembangunan wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan kemandirian (Fransisco, 2016). Dalam rangka peningkatan daya saing daerah itu sendiri, dapat dilakukan melalui kinerja keuangan daerah yang baik yaitu melalui <i>good governance</i> dalam pengelolaan keuangan daerah (Wibowo, 2014). Sehingga semakin tinggi alokasi belanja pelayanan publik per kapita maka semakin me-</p>

Indikator	Pengaruh Indikator terhadap Daya Saing	Variabel	Pengaruh Variabel terhadap Daya Saing
SDM (Sumber Daya Manusia) dan ketenagakerjaan	Sumber daya manusia dan ketenagakerjaan mengukur ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi (Gardiner, Martin, Tyler, 2004). Sumber daya manusia dan ketenagakerjaan mempengaruhi daya saing dengan prinsip diantaranya pendidikan merupakan cara paling baik dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas dan kualitas hidup masyarakat suatu daerah menentukan daya saing daerah tersebut.	Rasio ketergantungan	<p>tingkatkan daya saing daerah.</p> <p>Rasio ketergantungan digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan suatu daerah tergolong daerah maju atau berkembang (Sari, 2016). Semakin tinggi angka rasio ketergantungan suatu daerah, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh penduduk berusia produktif untuk membiayai hidup penduduk berusia non produktif. Angka kelahiran yang tinggi berimplikasi pada tingginya rasio ketergantungan, dimana tingginya rasio ketergantungan akan meningkatkan proporsi populasi yang hidup dalam kemiskinan (Knowles dalam Marmujiono, 2014). Menurut Syamsudin dalam Sari</p>

<b>Indikator</b>	<b>Pengaruh Indikator terhadap Daya Saing</b>	<b>Variabel</b>	<b>Pengaruh Variabel terhadap Daya Saing</b>
			(2016), rasio ketergantungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin kecil angka rasio ketergantungan suatu daerah, maka semakin berpengaruh meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, yang tentunya berpengaruh dalam peningkatan daya saing daerah.
		Rata-rata lama sekolah	IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan salah satu data atau informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia atas dasar kualitas hidup. Salah satu komponennya adalah rata-rata lama sekolah yang mewakili dimensi pendidikan (Kahar, 2018). Ting-

Indikator	Pengaruh Indikator terhadap Daya Saing	Variabel	Pengaruh Variabel terhadap Daya Saing
			<p>ginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan tingginya jenjang pendidikan yang pernah diduduki oleh seseorang (BPS, 2019). Pendidikan merupakan faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Selain menambah pengetahuan, pendidikan mampu meningkatkan keterampilan kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja (Simanjuntak dalam Ernawati, 2013). Pendidikan merupakan cara yang paling baik dalam meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia, kualitas hidup tersebut menentukan daya saing pada suatu daerah (Gardiner, Martin, Tyler, 2004).</p>
		Angka harapan	Menurut Gardiner, Martin, Tyler

<b>Indikator</b>	<b>Pengaruh Indikator terhadap Daya Saing</b>	<b>Variabel</b>	<b>Pengaruh Variabel terhadap Daya Saing</b>
		hidup	(2004), ketersediaan kualitas sumber daya manusia yang baik dapat mendukung daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan salah satu data atau informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia atas dasar kualitas hidup. Salah satu komponennya dalam dimensi kesehatan adalah angka harapan hidup (Kahar, 2018).Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator kesehatan yang dapat mencerminkan status kesehatan dan menggambarkan kualitas hidup masyarakat dalam suatu daerah (Ardianti, 2015). Berdasarkan artikel tersebut

<b>Indikator</b>	<b>Pengaruh Indikator terhadap Daya Saing</b>	<b>Variabel</b>	<b>Pengaruh Variabel terhadap Daya Saing</b>
			angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh pendidikan, pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta PDRB. Selain itu menurut UNDP ( <i>United Nations Development Programs</i> ), usia harapan hidup dapat panjang jika status kesehatan, gizi, dan lingkungannya yang baik.
Infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan	Infrastruktur mengukur seberapa besar sumber daya seperti modal fisik, geografis, dan sumber daya alam maupun lingkungan yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang dapat memberikan nilai tambah. Indikator tersebut dapat mendukung daya saing	Nilai tambah sektor pengangkutan per kapita	Menurut Gardiner, Martin, dan Tyler (2004), nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian. Pertumbuhan sektor pengangkutan sangat dipengaruhi oleh dinamika mobilisasi masyarakat dan aktivitas ekonomi (BPS, 2018). Jasa transportasi sebagai sarana pengangkutan dapat menunjang perekonomian daerah melalui kontribusinya

<b>Indikator</b>	<b>Pengaruh Indikator terhadap Daya Saing</b>	<b>Variabel</b>	<b>Pengaruh Variabel terhadap Daya Saing</b>
	daerah dengan prinsip diantaranya modal fisik seperti infrastruktur baik kualitas maupun ketersediaannya mendukung aktivitas perekonomian daerah sehingga dapat memberikan nilai tambah yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah (Gardiner, Martin, Tyler, 2004).		dalam PDRB, dimana perlu disediakan secara cukup, murah, dan merata agar pembangunan daerah sesuai dengan harapan yang pada akhirnya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Setiawan dkk, 2017). Permintaan terhadap jasa transportasi akan bertambah apabila kegiatan produksi dan ekonomi dalam suatu daerah meningkat dan sebaliknya (Kamaluddin, 2003).
		Kondisi jalan dengan kategori baik	Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dimana pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dijumpai pada wilayah yang memiliki ketersediaan infrastruktur mencukupi (World

<b>Indikator</b>	<b>Pengaruh Indikator terhadap Daya Saing</b>	<b>Variabel</b>	<b>Pengaruh Variabel terhadap Daya Saing</b>
			Bank dalam Maryaningsih, (2014). Infrastruktur berdasarkan penelitian ini lebih membahas pada infrastuktur jalan. Menurut Sembanyang (2011), dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi hal yang paling cukup penting adalah ketersediaan infrastruktur jalan, terutama penambahan panjang jalan sebagai mode transportasi. Dengan mode transportasi yang baik, aktivitas perekonomian daerah ikut berjalan dengan baik pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan berpengaruh pada peningkatan daya saing daerah.
Lingkungan usaha produktif	Lingkungan usaha produktif merupakan mengenai bagaimana daerah dapat	Total investasi per kapita	Menurut Gardiner, Martin, Tyler (2004), masuknya investasi di suatu daerah menandakan bahwa

<b>Indikator</b>	<b>Pengaruh Indikator terhadap Daya Saing</b>	<b>Variabel</b>	<b>Pengaruh Variabel terhadap Daya Saing</b>
	<p>menarik minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan berusaha di daerah tersebut dengan cara menciptakan kondisi ideal bagi dunia usaha untuk melakukan aktivitasnya. Lingkungan usaha dapat mendukung daya saing daerah melalui prinsip antara lain iklim yang usaha yang kondusif sebagai syarat mutlak masuknya investasi ke daerah tersebut; iklim usaha yang kondusif dapat diciptakan oleh kebijakan dari pemerintah maupun kondisi sosial ekonomi dari masyarakat; semakin tinggi intensitas usaha dapat membuka</p>	<p><i>Firm density</i></p>	<p>iklim usaha di daerah tersebut kondusif. Hal tersebut mampu menarik minat dunia usaha yang pada akhirnya mampu mempengaruhi daya saing daerah.</p> <p><i>Firm density</i> digunakan untuk melihat lingkungan usaha produktif pada suatu daerah (Bank Indonesia-LP3E FE Unpad, 2008). Tingginya industri-industri baru yang muncul pada suatu daerah menandakan aktivitas usaha yang tinggi pada daerah tersebut yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (<i>conferenceboard.ca</i>, 2019). Semakin mudah dan efisien perijinan industri untuk masuk ke suatu daerah, maka semakin cepat untuk berpotensi</p>

<b>Indikator</b>	<b>Pengaruh Indikator terhadap Daya Saing</b>	<b>Variabel</b>	<b>Pengaruh Variabel terhadap Daya Saing</b>
	kesempatan kerja di daerah tersebut; serta semakin tinggi standar kehidupan masyarakat, semakin meningkat kegiatan usaha di daerah tersebut.		menciptakan lapangan kerja dan produktivitas (OECD dalam <i>Conferenceboard.ca</i> , 2019). Dengan begitu, semakin tingginya perusahaan/industri baru berinvestasi di daerah, maka semakin cepat dalam mendukung peningkatan daya saing daerah tersebut.
		Presentase penduduk dengan pendidikan universitas	Peran masyarakat dalam rangka penciptaan lingkungan yang kondusif perlu dipersiapkan agar masyarakat tidak hanya menjadi “penonton” ditengah hiruk pikuk masuknya investasi ke daerah (Kurniawan, 2013). Menurutnya, bidang yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat adalah dalam bidang pendidikan. Pendidikan tinggi merupakan faktor pendorong efisiensi dalam pening-

Indikator	Pengaruh Indikator terhadap Daya Saing	Variabel	Pengaruh Variabel terhadap Daya Saing
			katan daya saing daerah (KADIN Indonesia, 2012). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakatnya, maka penciptaan lingkungan usaha produktif oleh masyarakat daerah tersebut juga semakin baik.
		Tingkat kepadatan penduduk	Menurut Royesti (2009), padatnya penduduk di daerah merupakan faktor pendukung bagi kegiatan investasi di daerah tersebut, hal itu disebabkan karena padatnya penduduk mencerminkan pertambahan jumlah penduduk di suatu daerah, artinya dapat memperbesar jumlah tenaga kerja dan memperluas pasar produksi. Padatnya penduduk di daerah mampu memicu datangnya investor ke daerah, karena investor akan cenderung mem-

<b>Indikator</b>	<b>Pengaruh Indikator terhadap Daya Saing</b>	<b>Variabel</b>	<b>Pengaruh Variabel terhadap Daya Saing</b>
			bangun usaha pada lokasi yang strategis dan peluang pasar yang besar (Anonim, 2013).
Perbankan dan lembaga keuangan	Menurut Gardiner, Martin, Tyler (2004), perbankan dan lembaga keuangan melihat seberapa baik sistem finansial perbankan atau non perbankan (misal:koperasi) dapat memfasilitasi aktivitas perekonomian yang memberikan nilai tambah. Dimana sistem keuangan daerah akan mempengaruhi alokasi faktor produksi yang terjadi pada perekonomian daerah tersebut, yang dapat mendukung daya saing dengan prinsip antara lain diperlukan sistem keuang-	Rasio volume usaha terhadap koperasi aktif	Menurut Gardiner, Martin, Tyler (2004), sistem keuangan oleh lembaga keuangan suatu daerah berpengaruh terhadap perekonomian daerah, dimana dapat mempengaruhi peningkatan daya saing daerah dengan prinsip menyediakan sistem keuangan yang baik dalam memfasilitasi aktivitas perekonomian daerah dan ketersediaan dana bagi dunia usaha yang digerakkan oleh sektor swasta. Lembaga keuangan yang ada salah satunya adalah koperasi. Koperasi sangat dibutuhkan masyarakat luas dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing (Widiartin

<b>Indikator</b>	<b>Pengaruh Indikator terhadap Daya Saing</b>	<b>Variabel</b>	<b>Pengaruh Variabel terhadap Daya Saing</b>
	<p>an yang baik dalam memfasilitasi aktivasi perekonomian daerah; sektor keuangan yang efisien dan terintegrasi secara nasional dapat mendukung daya saing daerah; ketersediaan dana bagi dunia usaha untuk memfasilitasi usaha perekonomian daerah yang digerakkan sektor swasta.</p>		<p>dkk, 2016). Menurut Tohar (2001), koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat harus semakin dikembangkan dan diperkuat dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Semakin besar volume usaha koperasi, maka semakin besar kegiatan atau usaha yang dilakukannya koperasi, dimana kegiatan atau usaha tersebut dapat memberikan manfaat untuk anggota koperasi maupun masyarakat pada umumnya (Sitio dkk, 2001).</p>
		<p>Nilai tambah sektor keuangan</p>	<p>Menurut Gardiner, Martin, Tyler (2004) Sektor keuangan yang efisien dan terintegrasi secara nasional dapat mendukung daya saing daerah. Sektor keuangan yang berkembang memiliki peran penting dalam memicu pertumbuhan</p>

<b>Indikator</b>	<b>Pengaruh Indikator terhadap Daya Saing</b>	<b>Variabel</b>	<b>Pengaruh Variabel terhadap Daya Saing</b>
			<p>buhan ekonomi suatu daerah (Bank Dunia, 2001). Dengan pertumbuhan daerah yang meningkat maka keadaan tersebut akan mendukung daerah untuk semakin berdaya saing. Pada saat terjadi pertumbuhan perekonomian maka permintaan akan jasa keuangan ikut bertambah, semakin banyaknya jasa keuangan yang digunakan maka perkembangan sektor keuangan akan menjadi positif (Baroroh, 2012).</p>
<b>Indikator Ouput</b>		PDRB per kapita	<p>PDRB per kapita merupakan indikator kesejahteraan penduduk dalam suatu daerah (Pratiwi dan Sutrisna dalam Zamharir, 2016). PDRB per kapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk dalam</p>

<b>Indikator</b>	<b>Pengaruh Indikator terhadap Daya Saing</b>	<b>Variabel</b>	<b>Pengaruh Variabel terhadap Daya Saing</b>
			<p>suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Melalui PDRB per kapita dapat merefleksikan tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah, sehingga semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, semakin tinggi pula kesejahteraan penduduk. Dengan tingginya pendapatan masyarakatnya, maka potensi sumber penerimaan daerah semakin tinggi juga. Hal tersebut dapat meningkatkan daya saing daerah, karena pada dasarnya jika daerah ingin berdaya saing dengan daerah lain secara domestik maupun internasional maka daerah tersebut harus mampu serta mempertahankan kesejahteraan penduduknya. (UK-DTI dan CURDS, 2008).</p>

<b>Indikator</b>	<b>Pengaruh Indikator terhadap Daya Saing</b>	<b>Variabel</b>	<b>Pengaruh Variabel terhadap Daya Saing</b>
		Produktivitas tenaga kerja	Semakin produktif tenaga kerja suatu daerah maka semakin baik kualitas dari tenaga kerja yang ada. Dengan kualitas tenaga kerja yang baik, kemampuan menghasilkan barang maupun jasa dalam aktivitas perekonomian akan semakin baik. Hal tersebut mampu mendukung terciptanya daya saing perekonomian yang lebih tinggi, sehingga diharapkan dapat mendorong dalam peningkatan daya saing daerah (Bank Indonesia-LP3E FE Unpad, 2008)

*Sumber: Telusur pustaka, 2019*

*“Halaman sengaja dikosongkan”*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan rasionalistik, merupakan pendekatan yang bersumber dari teori dan kebenaran empirik. Pendekatan rasionalistik berangkat dari pemaknaan hasil penelitian terdahulu, teori-teori yang dikenal, dikonstruksi menjadi sesuatu yang mengandung sejumlah problematik yang perlu diteliti lebih lanjut. Paham ilmu rasionalistik merupakan ilmu yang valid merupakan abstraksi, simplifikasi, atau idealisasi dari realitas, dan terbukti secara koheren dengan sistem logikanya (Muhadjir dalam Wahyuningsih, 2014).

Tahapan awal dalam persiapan penelitian ini adalah terlebih dahulu diketahuinya konseptualisasi teoritik yang berhubungan dengan daya saing daerah. Kemudian mengetahui hasil dari penelitian sebelumnya terkait daya saing daerah Kabupaten Bangkalan yang rendah. Setelah itu penelitian diarahkan berdasarkan hasil sintesa tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya yang menghasilkan indikator dan variabel untuk penelitian lanjutan yang akan dilakukan.

#### **3.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazar, 2003).

Menurut Boygan dan Taylor (1992), penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku dari apa yang diamati. Sehingga dalam penelitian deskriptif, mendeskripsikan suatu keadaan atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang dapat dijelaskan baik dengan angka-angka, maupun kata-kata. Adapun variabel-variabel tersebut digunakan untuk mencapai tujuan

penelitian yaitu merumuskan peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Mengeksplorasi karakteristik variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan
- b. Menentukan urutan variabel penanganan dalam peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan
- c. Merumuskan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan.

Jenis penelitian ini juga termasuk jenis penelitian primer dan sekunder. Jenis penelitian primer membutuhkan data dari sumber pertama atau biasa disebut dengan responden. Jenis penelitian sekunder yaitu menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Jenis penelitian sekunder juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan. Dalam kasus penelitian ini, penelitian primer dilakukan pada saat mengeksplorasi karakteristik variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan serta menentukan urutan variabel penanganan dalam peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Jenis penelitian sekunder juga dilakukan ketika mengeksplorasi karakteristik variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan.

### **3.3. Variabel Penelitian**

Variabel adalah atribut dalam penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan, sehingga variabel-variabel penelitian ini diperoleh dari hasil tinjauan pustaka yang telah diterangkan pada bab sebelumnya, yang berpaku pada penelitian terdahulu yaitu “Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur” oleh Huda, M. (2014). Variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

**Tabel 4.1 Variabel-Variabel Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan yang digunakan dalam penelitian ini**

No	Indikator	Variabel	Definisi Operasioanl
<b>Indikator Input</b>			
1	Perekonomian dan Keuangan Daerah	1. Kapasitas fiskal daerah	Kapasitas fiskal daerah = ((PAD+bagihasil+DAU+ lain-lain pendapatan yang sah)-belanja pegawai)/ jumlah penduduk
		2. <i>Government size</i>	Total pengeluaran pemerintah daerah dibagi dengan PDRB
		3. Belanja pelayanan publik per kapita	Besar belanja pelayanan publik dibagi dengan jumlah penduduk
2	Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan	4. Rasio ketergantungan	Perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk 15-64 tahun

No	Indikator	Variabel	Definisi Operasioanl
		5. Rata-rata lama sekolah penduduk	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua pendidikan formal yang pernah dijalani
		6. Angka harapan hidup	Kualitas hidup penduduk yang ditunjukkan dengan rata-rata lamanya penduduk dalam suatu wilayah dapat bertahan hidup
3	Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan	7. Nilai tambah sektor pengangkutan per kapita	Nilai tambah sektor pengangkutan per kapita di suatu wilayah
		8. Kondisi jalan dengan kategori baik	Panjang jalan baik di suatu wilayah
4	Lingkungan Usaha Produktif	9. Total investasi per kapita	Total investasi dibagi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah
		10. <i>Firm density</i>	Jumlah perusahaan atau industri dibagi dengan luas

No	Indikator	Variabel	Definisi Operasioanl
			wilayah
		11.Presentase penduduk dengan pendidikan tinggi universitas	Presentase penduduk dengan pendidikan tertinggi univer-sitas terhadap total penduduk suatu wilayah
		12.Tingkat kepadatan penduduk	Perbandingan antara jumlah penduduk terhadap luas wilayah
5	Perbankan dan Lembaga Keuangan	13.Rasio nilai volume usaha terhadap koperasi aktif	Perbandingan nilai volume usaha terhadap jumlah kope-rasi aktif di wilayah
		14.Nilai tambah sektor keuangan per kapita	Nilai tambah sektor keuangan dibagi jumlah penduduk di suatu wilayah
6	<b>Indikator Output</b>	15.PDRB per kapita	Jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah
		16.Produktivitas tenaga kerja	Jumlah PDRB dibagi dengan jumlah tenaga kerja dalam suatu wilayah

*Sumber: Penulis, 2019*

### 3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi diartikan sebagai keseluruhan satuan analisis penelitian yang merujuk pada wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini berupa seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagai pemegang kebijakan, pihak swasta, dan/atau pakar atau ahli.

Pemilihan sampel responden pada penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling*, dengan metode *purposive sampling* melalui analisis *stakeholder*. Teknik *nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2010).

Pemilihan responden dengan metode *purposive sampling* didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut erat, yang tidak berdasarkan strata, random, atau daerah (Margono dalam Widi, 2015). Selain itu *purposive sampling* juga diartikan sebagai teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud adalah pertimbangan terkait responden yang dianggap paling tahu tentang obyek/situasi sosial yang akan diteliti. Dalam hal ini adalah paham, memiliki pengaruh, kepentingan tentang daya saing daerah. Kriteria responden untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Responden yang mengerti tentang daya saing daerah
2. Responden yang paham terkait kondisi di lapangan
3. Responden yang berkompeten dibidangnya
4. Responden yang sesuai dengan hasil analisis *stakeholder*

Analisis *stakeholder* adalah proses mengidentifikasi *stakeholder* yang memiliki hak yang sama atas informasi dan kemudian memprioritaskan kepentingannya (Grey dalam Widi, 2015). Analisis *stakeholder* merupakan alat untuk memahami konteks sosial kelembagaan dari sebuah program atau kebijakan

(McCracken dalam Huda, 2014). Analisis *stakeholder* membantu peneliti dalam memperoleh informasi sebagai berikut:

1. Siapa yang akan terkena dampak dari suatu program peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan baik dampak positif maupun dampak negatif.
2. Siapa yang dapat memberikan pengaruh terhadap program peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.
3. Individu, kelompok, atau lembaga mana saja yang perlu dilibatkan dalam program peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan.
4. Siapa saja dan bagaimana caranya yang perlu dibangun kapasitasnya agar turut berpartisipasi aktif didalamnya.

Analisis *stakeholder* yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada **Lampiran 1**. Responden terpilih yang dihasilkan dari analisis *stakeholder* merupakan sebagai responden untuk menjawab tujuan penelitian pada penelitian ini. Responden yang terpilih adalah Bappeda Kabupaten Bangkalan; Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan; Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Bangkalan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan; pelaku usaha; serta akademisi ahli daya saing daerah.

### **3.5. Metode Penelitian**

#### **3.5.1 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan sasaran penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survei primer dan survei sekunder.

#### **Survei Sekunder**

Survei sekunder dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder. Data-data tersebut dapat berupa dokumen atau data yang dibukukan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui :

1. Survei instansi

Survei instansi merupakan pencarian data dan informasi sekunder pada beberapa instansi baik instansi pemerintah maupun instansi lainnya yang terkait. Data dan informasi yang diperoleh melalui survei instansi pada penelitian ini digunakan sebagai data-data dalam gambaran umum terkait variabel-variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan dan dalam menentukan urutan variabel penanganan dalam peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Instansi yang akan dituju ketika survei instansi dilakukan antara lain Bappeda Kabupaten Bangkalan; Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan; Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Bangkalan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan; pelaku usaha; serta akademisi ahli daya saing daerah.

2. Survei literatur

Survei literatur merupakan metode pengumpulan data dilakukan dengan tinjauan menyeluruh dari literatur yang relevan dengan penelitian ini yaitu upaya meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Literatur yang digunakan dapat berupa buku, jurnal, hasil penelitian lain, dokumen rencana tata ruang, tugas akhir, maupun artikel di internet. Data yang diperoleh melalui survei literatur yaitu dengan membaca, merangkum, dan menyimpulkan informasi dari literatur terkait yang relevan dengan penelitian ini.

## **Survei Primer**

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esternbeg, 2002). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, yaitu dalam hal ini adalah terkait peningkatan daya saing daerah

Kabupaten Bangkalan. Jenis wawancara yang akan digunakan pada penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini, wawancara membantu peneliti dalam mengumpulkan data sebagai masukan yang akan dianalisis pada tahap penelitian mengeksplorasi karakteristik variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan.

## 2. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010). Terutama dalam hal ini adalah upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Tipe pertanyaan dalam kuisisioner pada penelitian ini adalah pertanyaan tertutup. Kuisisioner tertutup yaitu pertanyaan yang telah disertai alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang tersedia dan tidak ada kemungkinan responden untuk menambahkan jawaban atau tanggapan lainnya. Dalam penelitian ini, kuisisioner membantu peneliti dalam mengumpulkan data pada tahap penelitian menentukan urutan variabel penanganan dalam peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan.

### 3.5.2 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan. Adapun metode analisis data yang digunakan dapat dilihat pada **tabel 3.2** berikut:

**Tabel 4.2 Metode Analisis Data yang Digunakan dalam Penelitian**

No	Sasaran	Input	Alat Analisis	Output
1	Mengeksplorasi karakteristik variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan	Variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan penelitian Huda, M. & Santoso, E. B. (2014)	Deskriptif kualitatif	Karakteristik variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan
2	Menentukan urutan variabel penanganan dalam peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan	Variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan penelitian Huda, M. & Santoso, E. B. (2014)	AHP ( <i>Analytic Hierarchy Process</i> )	Urutan variabel penanganan dalam peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan
3	Merumuskan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan	Hasil sasaran 1 dan sasaran 2	Komparatif dan Triangulasi	Rumusan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan

*Sumber: Penulis, 2018*

### **A. Sasaran I: Mengeksplorasi karakteristik variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan**

Alat analisis yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif digunakan untuk menjabarkan komponen yang digunakan dalam mengeksplorasi karakteristik variabel lemahnya daya saing daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu kondisi eksisting, kajian teori, dan pendapat dari *stakeholder*. Sehingga pada sasaran ini dihasilkan karakteristik setiap variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan tiga komponen tersebut.

### **B. Sasaran II: Menentukan urutan variabel penanganan dalam peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan**

Alat analisis yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah dengan menggunakan AHP (*Analytic Hierarchy Process*). AHP merupakan suatu model pengambil keputusan yang komprehensif dengan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kualitatif dan kuantitatif (Sasongko dkk, 2017). Menurut L.T. Saaty dalam Sasongko (2017), terdapat tiga prinsip dalam memecahkan persoalan dengan AHP yaitu prinsip menyusun hirarki, prinsip menentukan prioritas, dan prinsip konsistensi logis. Keberadaan hirarki memungkinkan dipecahnya masalah kompleks atau tidak terstruktur kedalam sub-sub masalah, lalu menyusunnya menjadi suatu bentuk hirarki. Dalam penelitian ini, responden yang dituju adalah responden berdasarkan hasil analisis *stakeholder*.

Tahapan dalam analisis menggunakan AHP adalah sebagai berikut:

#### 1. Identifikasi permasalahan

Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dalam penca-paian tujuan dari penelitian yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan variabel apa saja yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dari penelitian.

#### 2. Penyusunan hirarki

Sebelum menyusun hirarki perlu diketahui indikator dan variabel apa yang akan digunakan dalam penelitian. indikator dan variabel tersebut merupakan hasil sintesa pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah didapatkan indikator dan variabel dalam perumusan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan, maka disusun hirarki dari masing-masing indikator hingga menghasilkan variabel.

3. Penyebaran kuisisioner

Kuisisioner AHP berisi perbandingan tingkat indikator dan variabel. Sehingga kuisisioner terdiri dari dua level pertanyaan yaitu perbandingan kepentingan antar indikator dan perbandingan kepentingan antar variabel.

4. Penilaian kriteria dan alternatif

Penilaian kriteria dan alternatif dilakukan melalui perbandingan berpasangan yang disertai skala preferensi yang menggambarkan pengaruh relatif setiap elemen terhadap masing-masing kriteria atau alternatif. Penilaian preferensi untuk kuisisioner AHP dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.3 Skala Preferensi untuk Kuisisioner AHP**

<b>Tingkat/Nilai Preferensi Kepentingan</b>	<b>Kedudukan/ Perbandingan Dua Elemen</b>	<b>Penjelasan</b>
1	Sama pentingnya	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama
3	Sedikit lebih penting	Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan elemen pasangannya
5	Lebih penting	Satu elemen sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata, dibandingkan dengan elemen pasangannya
7	Sangat penting	Satu elemen terbukti sangat disukai dan secara praktis sangat mendominasi, diban-dingkan dengan elemen pa-sangannya

Tingkat/Nilai Preferensi Kepentingan	Kedudukan/ Perbandingan Dua Elemen	Penjelasan
9	Mutlak lebih penting	Satu elemen mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan tertinggi
2,4,6,8	Nilai-nilai tengah diantara dua pendapat yang berdampingan	Nilai-nilai ini diperlukan suatu kompromi
Kebalikan	Jika elemen A mempunyai salah satu angka di atas ketika dibandingkan dengan elemen B, maka B memiliki kebalikannya ketika dibandingkan dengan elemen A	

*Sumber: Saaty, 1993*

Teknik perbandingan berpasangan dengan skala preferensi yang telah ditunjukkan pada tabel di atas berdasarkan pendapat dari para responden yang dianggap sebagai *key person*.

Kemudian dilakukan pengolahan matriks berpasangan. Nilai perbandingan kuisisioner yaitu berdasarkan skala preferensi tersebut akan diolah kedalam matriks *pairwise comparison*. Namun sebelumnya harus dihitung rata-rata geometriknya, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W_i = \sqrt[n]{a_{i1}x a_{i2}x a_{i3}x \dots x a_{in}}$$

Dimana :

$W_i$  = penilaian gabungan

$a_{i1}$  = penilaian responden ke-i

$n$  = banyaknya responden

Hasil dari perhitungan rata-rata geometrik akan dimasukkan kedalam matriks berpasangan seperti tabel berikut:

	$W_1$	$W_2$	...	$W_n$
$W_1$	$W_{1,1}$	$W_{1,2}$	...	$W_{1,n}$

$W_2$	$W_{2,1}$	$W_{2,2}$	...	$W_{2,n}$
...	...		...	
$W_n$	$W_{n,1}$	$W_{n,2}$	...	$W_{n,n}$

Sumber: Saaty, 1993

5. Pembobotan variabel

Perhitungan bobot variabel melalui beberapa tahapan, yaitu pertama dilakukan normalisasi. Normalisasi dilakukan dengan membagi nilai dari setiap elemen dalam matriks berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom. Kemudian menjumlahkan hasil normalisasi setiap variabel sehingga diperoleh jumlah setiap elemen perbandingan dalam setiap barisnya. Kemudian hasil penjumlahan tersebut masing-masing dibagi dengan banyaknya variabel perbandingan, dan mengecek nilai bobot yang diperoleh dengan menjumlahkannya dimana hasil yang didapat harus sama atau mendekati angka 1 ( $\sum W_i \approx 1$ )

6. Uji konsistensi

Perhitungan uji konsistensi matriks nilai perbandingan berpasangan dilakukan dengan langkah-langkah antara lain mengalikan bobot dengan nilai awal matriks perbandingan. Hal tersebut dilakukan untuk setiap barisnya. Kemudian membagi jumlah hasil perkalian dengan bobot untuk setiap barisnya. Sehingga diperoleh *eigenvector*, menghitung *eigen value* dengan membagi *eigenvector* dengan banyaknya elemen perbandingan dan menghitung nilai *Consistency Index* (CI) serta *Consistency Ratio* (CR).

$$\text{Rumus CI} = \frac{\lambda_{maks} - n}{n - 1} \quad \text{dan CR} = \frac{CI}{RI}$$

Dimana :

$\lambda_{maks}$  = *eigen value*

n = orde matriks

CI = *Consistency Index*

CR = *Consistency Ratio*

RI = *Random Index*

RI dapat dilihat pada tabel berikut :

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Random Index	0	0	0,52	0,89	1,11	1,25	1,35	1,4	1,45	1,49

Apabila nilai perbandingan CI dan RI kurang dari atau sama dengan 0,1 ( $CR \leq 0,1$ ), maka matriks perbandingan bisa diterima. Tetapi jika lebih besar dari 0,1 maka tidak konsisten.

Bobot yang dihasilkan dalam analisis AHP mencerminkan prioritas dari elemen yang dibandingkan atau mencerminkan pentingnya elemen tersebut dibandingkan elemen lainnya untuk mencapai tujuan. Sehingga semakin tinggi bobot, tingkat kepentingannya semakin tinggi.

### C. Sasaran III: Merumuskan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan

Pada sasaran 3 digunakan alat analisis metode komparatif dan triangulasi. Metode komparatif pada penelitian ini digunakan untuk membandingkan kondisi setiap variabel ditahun 2014 yaitu tahun penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian ini, dengan kondisi variabel ditahun antara 2017 hingga 2018 (sesuai ketersediaan data tahun terakhir) dengan asumsi data standar daya saing tahun 2014 sebagai basis. Dimana perbandingan tersebut digunakan untuk melihat perkembangan variabel selama tahun tersebut.

Teknik analisis triangulasi digunakan dalam merumuskan upaya peningkatan daya saing daerah. Dalam menentukan rumusan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan, metode triangulasi yang digunakan diperoleh dari 3 sumber yaitu:

1. Berdasarkan fakta empiris dan hasil analisa sasaran
2. Berdasarkan peraturan terkait dan/atau teori konsep daya saing daerah
3. Berdasarkan pendapat *stakeholder*

Adapun penjabaran dari kondisi fakta, teori, maupun pendapat *stakeholder* telah dijabarkan pada sasaran pertama penelitian ini. Sehingga hasil dari sasaran pertama tersebut digunakan untuk

merumuskan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan disesuaikan dengan urutan variabel penanganan berdasarkan hasil sasaran kedua yaitu menentukan urutan variabel penanganan dalam peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan.

### **3.6. Tahapan Penelitian**

Tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **Perumusan Masalah**

Tahap ini berangkat dari hasil penelitian sebelumnya terkait rendahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan sebagai inti permasalahan dan kemudian dijabarkan. Dari penjabaran masalah tersebut kemudian ditentukan batasan atau ruang lingkup materi. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah terkait peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan.

#### **Studi Literatur**

Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi terkait teori dan konsep, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan hal lainnya yang relevan yaitu terkait daya saing daerah. Sumber yang digunakan dalam studi literatur dapat berasal dari jurnal, buku, dokumen rencana tata ruang, tugas akhir, dan data yang dibukukan. Berdasarkan studi literatur akan didapatkan indikator dan variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan yang berdasarkan penelitian terdahulu oleh Huda, M. & Santoso, E. B.

#### **Pengumpulan Data**

Tahap pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang kemudian diproses dalam analisis yang telah ditentukan. Dalam pengumpulan data perlu diperhatikan instrumen pengumpulan data yang digunakan dan validitas instrumen tersebut. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui survei primer dan survei sekunder. Survei primer dilakukan dengan wawancara dan kuisioner. Sedangkan survei sekunder dilakukan dengan survei instansi dan survei literatur.

### **Analisis**

Tahapan analisis dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

- a. Mengeksplorasi karakteristik variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Analisis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.
- b. Menentukan urutan variabel penanganan dalam peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Analisis ini menggunakan metode AHP (*Analytical Gierarchy Process*).
- c. Merumuskan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Analisis ini menggunakan metode komparatif dan triangulasi.

### **Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian yaitu menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini yang berdasarkan atas hasil analisis yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Wilayah**

Kabupaten Bangkalan termasuk dalam salah satu kabupaten di Pulau Madura. Secara astronomis, Kabupaten Bangkalan terletak antara  $6^{\circ} 51'$  -  $7^{\circ} 11'$  Lintang Selatan dan antara  $112^{\circ} 40'$  –  $113^{\circ} 08'$  Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Bangkalan memiliki batas-batas sebagai berikut:

Utara : Laut Jawa

Selatan : Selat Madura

Timur : Kabupaten Sampang

Barat : Selat Madura

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Bangkalan berada di ujung barat Pulau Madura.

#### **4.1.1. Indikator Input**

Indikator input yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah terdiri dari beberapa indikator. Indikator tersebut antara lain indikator perekonomian dan keuangan daerah; indikator sumber daya manusia dan ketenagakerjaan; indikator infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan; indikator lingkungan usaha produktif; serta indikator perbankan dan lembaga keuangan, yang lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut.

#### **4.1.1.1. Indikator Perekonomian dan Keuangan Daerah**

Indikator Perekonomian dan Keuangan Daerah dalam penelitian ini akan membahas terkait kapasitas fiskal daerah, *government size*, dan belanja pelayanan publik per kapita.

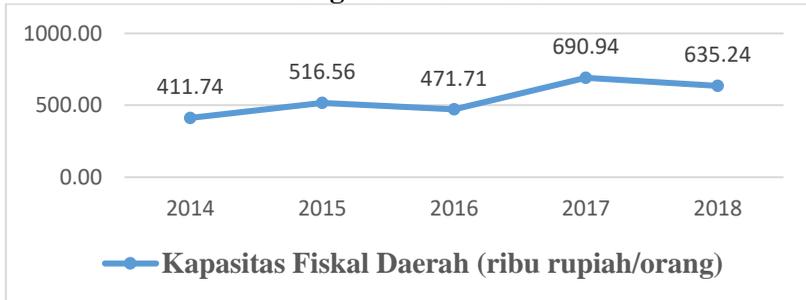
Kapasitas Fiskal Daerah di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2014 hingga tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut untuk lebih jelasnya:

**Tabel 4.1 Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bangkalan 2014-2018**

Tahun	PAD (Pendapatan Asli Daerah) (milyar rupiah)	DAU (Dana Alokasi Umum) (milyar rupiah)	Bagi Hasil (milyar rupiah)	Pendapatan Lain yang Sah (milyar rupiah)	Belanja Pegawai (milyar rupiah)	Jumlah Penduduk (Orang)	Kapasitas Fiskal Daerah (ribu rupiah/orang)	Peningkatan Rata-Rata per tahun
2014	122,39	854,87	99,472	327,46	968,83	1.057.363	411,74	14%
2015	159,39	888,67	110,070	435,34	1.046,45	1.058.978	516,56	
2016	205,28	957,26	101,218	303,10	1.065,70	1.062.432	471,71	
2017	303,50	994,46	91,388	392,00	1.043,87	1.067.358	690,94	
2018	225,24	968,77	98,002	492,37	1.104,28	1.070.617	635,24	

*Sumber: BPKAD Kabupaten Bangkalan, 2019*

**Gambar 4.1 Grafik Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bangkalan 2014-2018**



*Sumber: BPKAD Kabupaten Bangkalan, 2019*

Berdasarkan data pada **tabel 4.1.** dan **gambar 4.1** diatas terlihat bahwa kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bangkalan selama tahun 2014 hingga tahun 2018 fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bangkalan selama tahun 2014 hingga tahun 2018 rata-rata meningkat sebesar 14 %. Berdasarkan data diatas, Kabupaten Bangkalan memiliki kapasitas fiskal daerah pada tahun 2014 sebesar 411,74 ribu rupiah per orang. Kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 516,56 ribu rupiah per orang. Kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bangkalan turun pada tahun 2016 menjadi 471,71 ribu rupiah per orang. Namun pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 690,94 ribu rupiah per orang. Sedangkan tahun 2018, kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan kembali menjadi 635,24 ribu rupiah per orang.

*Government Size* merupakan total pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari total belanja daerah dan pembiayaan daerah dibagi dengan PDRB. *Government size* Kabupaten Bangkalan pada tahun 2014 hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2 *Government Size* Kabupaten Bangkalan 2014-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Total Belanja (milyar rupiah)</b>	<b>Pembiayaan (milyar rupiah)</b>	<b>Pengeluaran Pemerintah (milyar rupiah)</b>	<b>PDRB (milyar rupiah)</b>	<b>Gov. Size</b>	<b>Penurunan Rata-Rata per tahun</b>
2014	2.476,01	168,93	2.644,94	17.369	0,15	5%
2015	2.053,86	249,26	2.303,12	16.907	0,14	
2016	2.167,12	171,01	2.338,13	17.019	0,14	
2017	2,255,26	39,80	2.295,06	17.619	0,13	

*Sumber:*

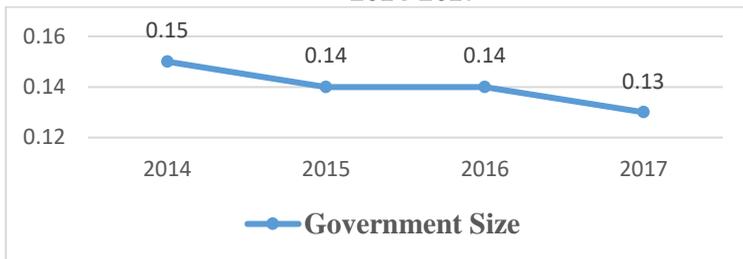
*BPKAD*

*Kabupaten*

*Bangkalan,*

*2019*

**Gambar 4.2 Grafik Government Size Kabupaten Bangkalan 2014-2017**



*Sumber: BPKAD Kabupaten Bangkalan, 2019*

Berdasarkan data pada **tabel 4.2.** dan **gambar 4.2.** diatas, *government size* Kabupaten Bangkalan tahun 2014 hingga tahun 2017 cenderung mengalami penurunan. Penurunan *government size* Kabupaten Bangkalan selama tahun 2014 hingga tahun 2017 rata-rata sebesar 5%. *Government size* Kabupaten Bangkalan tahun 2014 adalah senilai 0,15. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2015 sehingga sebesar 0,14. Pada tahun 2016, *government size* Kabupaten Bangkalan pada angka yang sama yaitu sebesar 0,14. Angka tersebut mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 yaitu menjadi sebesar 0,13.

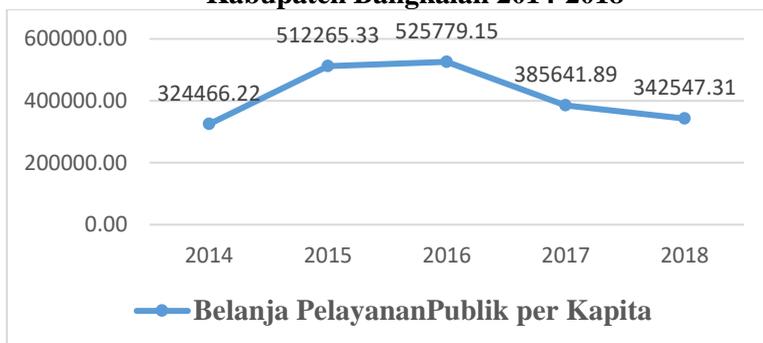
Belanja Pelayanan Publik per kapita merupakan belanja pelayanan publik dibandingkan dengan jumlah penduduk. Belanja pelayanan publik per kapita Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Belanja Pelayanan Publik per Kapita Kabupaten Bangkalan 2014-2018**

Tahun	Belanja Pelayanan Publik (milyar rupiah)	Penduduk (orang)	Belanja Pelayanan Publik (rupiah/orang)	Peningkatan Rata-Rata per tahun
2014	343,08	1.057.363	324.466,22	1%
2015	542,48	1.058.978	512.265,33	
2016	558,60	1.062.432	525.779,15	
2017	411,62	1.067.358	385.641,89	
2018	366,74	1.070.617	342.547,31	

*Sumber: BPKAD Kabupaten Bangkalan, 2019*

**Gambar 4.3 Grafik Belanja Pelayanan Publik per Kapita Kabupaten Bangkalan 2014-2018**



*Sumber: BPKAD Kabupaten Bangkalan, 2019*

Berdasarkan data pada **tabel 4.3** dan **gambar 4.3** diatas, belanja pelayanan publik per kapita Kabupaten Bangkalan tahun 2014 hingga tahun 2018 cenderung meningkat. Dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 1%. Belanja pelayanan publik per kapita Kabupaten Bangkalan pada tahun 2014 sebesar Rp. 324.466,22 per orang. Kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar Rp. 512.265,33 per orang. Pada tahun 2016, 2017, dan 2018, belanja pelayanan publik per kapita Kabupaten Bangkalan yaitu berturut-turut sebesar Rp. 525.779,15 per orang, Rp. 385.641,89 per orang, dan Rp. 342.547,31 per orang.

#### 4.1.1.2. Indikator Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan

Dalam indikator sumber daya manusia dan ketenagakerjaan akan membahas mengenai rasio ketergantungan, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup.

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk berumur 65 tahun keatas, dibandingkan dengan jumlah penduduk berumur 15-64 tahun. Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bangkalan 2014-2017**

Tahun	Penduduk umur 0-14 tahun (jiwa)	Penduduk umur > 65 tahun (jiwa)	Penduduk umur 15-64 tahun (jiwa)	Rasio Ketergantungan (persen)	Penurunan Rata-Rata per tahun
2014	268.159	63.731	613.931	54,06	1 %
2015	270.528	64.343	619.434	54,06	
2016	267.107	66.818	624.446	53,48	
2017	263.212	71.297	636.385	52,56	

*Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan, 2019*

**Tabel 4.5 Prosentase Perbandingan Penduduk Umur 15-64 tahun (Usia Produktif) dengan Penduduk yang Sudah Bekerja**

Tahun	Penduduk umur 15-64 tahun/Usia Produktif (jiwa)	Penduduk yang Sudah Bekerja	Prosentase
2014	613.931	457.047	74,45%
2015	619.434	457.282	73,82%
2016	624.446	466.111	74,64%
2017	636.385	460.988	72,44%

*Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan & Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan, 2019*

**Gambar 4.4 Grafik Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bangkalan 2014-2017**



*Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan, 2019*

Berdasarkan data **tabel 4.4.** dan **gambar 4.4** di atas terlihat bahwa rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Bangkalan semakin menurun dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Rasio ketergantungan Kabupaten Bangkalan selama tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar 1 %. Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014 usia penduduk yang bekerja adalah 457.047 jiwa atau 74,45% dari jumlah penduduk usia produktif. Pada tahun 2015, penduduk yang bekerja adalah 457.282 jiwa atau 73,82% dari penduduk produktif tahun tersebut. Tahun 2016 meningkat menjadi 466.111 jiwa atau 74,64% dari jumlah penduduk usia produktif pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 2017, penduduk yang bekerja menurun dari tahun sebelumnya menjadi 460.988 jiwa atau 72,44% dari jumlah penduduk usia produktif tahun 2017. Diketahui bahwa rasio ketergantungan penduduk pada tahun 2014 dan 2015 memiliki nilai yang sama yaitu 54,06%. Kemudian pada tahun 2016 menurun sehingga menjadi 53,48%. Kemudian rasio ketergantungan penduduk pada tahun 2017 kembali menurun sehingga menjadi 52,56%.

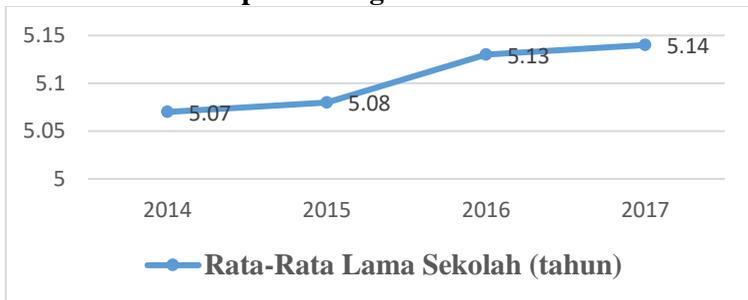
Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bangkalan tahun 2014 hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Bangkalan 2014-2017**

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Peningkatan Rata-Rata per tahun
2014	5,07	0,5 %
2015	5,08	
2016	5,13	
2017	5,14	

*Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan, 2019*

**Gambar 4.5 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Bangkalan 2014-2017**



*Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan, 2019*

Berdasarkan data pada **tabel 4.4** dan **gambar 4.5** diatas, terlihat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bangkalan terus meningkat pada tahun 2014 hingga tahun 2017, namun angka tersebut masih berkisar pada angka 5 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Kabupaten Bangkalan menyelesaikan pendidikannya hingga kelas 5 sekolah dasar. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bangkalan selama tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,5 %. Dapat dilihat pada tahun 2014, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bangkalan adalah 5,07 tahun. Angka tersebut meningkat pada tahun 2015 yaitu 5,08 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk

pada tahun 2016 dan 2017 kembali meningkat berturut-turut menjadi 5,13 tahun dan 5,14 tahun.

Angka Harapan Hidup merupakan kualitas hidup penduduk yang ditunjukkan dengan rata-rata lamanya penduduk dalam suatu wilayah dapat bertahan hidup. Angka harapan hidup di Kabupaten Bangkalan tahun 2014 hingga 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangkalan 2014-2017**

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Peningkatan Rata-Rata per tahun
2014	69,62	0,1 %
2015	69,72	
2016	69,77	
2017	69,82	

*Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan, 2019*

**Gambar 4.6 Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangkalan 2014-2017**



*Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan, 2019*

Berdasarkan data pada **tabel 4.7** dan **gambar 4.6** diatas, angka harapan hidup dari tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan. Selama tahun tersebut, angka harapan hidup Kabupaten Bangkalan berkisar pada angka 69 tahun dan mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,1 %. Pada tahun 2014, angka harapan

hidup Kabupaten Bangkalan sebesar 69,62 tahun. Kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 69,72 tahun. Pada tahun selanjutnya yaitu 2016 dan 2017 juga terus mengalami peningkatan berturut-turut menjadi 69,77 tahun dan 68,89 tahun.

#### 4.1.1.3. Indikator Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan

Dalam indikator infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan, penelitian ini membahas nilai tambah sektor pengangkutan per kapita dan kondisi jalan dengan kategori baik.

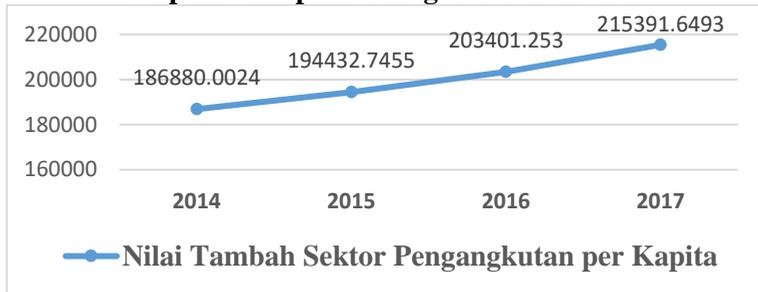
Nilai tambah sektor pengangkutan per kapita merupakan nilai tambah sektor pengangkutan yang ditunjukkan dengan nilai PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan dibagi dengan jumlah penduduk. Nilai tambah sektor pengangkutan per kapita Kabupaten Bangkalan ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Nilai Tambah Sektor Pengangkutan per Kapita Kabupaten Bangkalan 2014-2017**

Tahun	Nilai Tambah Sektor Pengangkutan (miliar rupiah)	Jumlah Penduduk (orang)	Nilai Tambah Sektor Pengangkutan per Kapita (rupiah per kapita)	Peningkatan Rata-Rata per tahun
2014	197,6	1.057.363	186.880	5 %
2015	205,9	1.058.978	194.432,7	
2016	216,1	1.062.432	203.401,3	
2017	229,9	1.067.358	215.391,6	

*Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan, 2019*

**Gambar 4.7 Grafik Nilai Tambah Sektor Pengangkutan per Kapita Kabupaten Bangkalan 2014-2017**



*Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan, 2019*

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bangkalan, nilai tambah sektor pengangkutan terus mengalami peningkatan selama tahun 2014 hingga tahun 2017. Begitu juga dengan jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan yang terus meningkat dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 5 % selama tahun 2014 hingga tahun 2017. Berdasarkan data nilai tambah sektor pengangkutan dan jumlah penduduk kemudian dapat dihitung nilai tambah sektor pengangkutan per kapita Kabupaten Bangkalan tahun 2014 hingga tahun 2017, yang menghasilkan bahwa nilai tambah sektor pengangkutan per kapita pada tahun 2014 sebesar Rp. 186.880 per orang, tahun 2015 nilai tersebut meningkat menjadi sebesar Rp. 194.432,7 per orang, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 203.401,3 per orang, dan tahun 2017 meningkat dari tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 215.391,6 per orang.

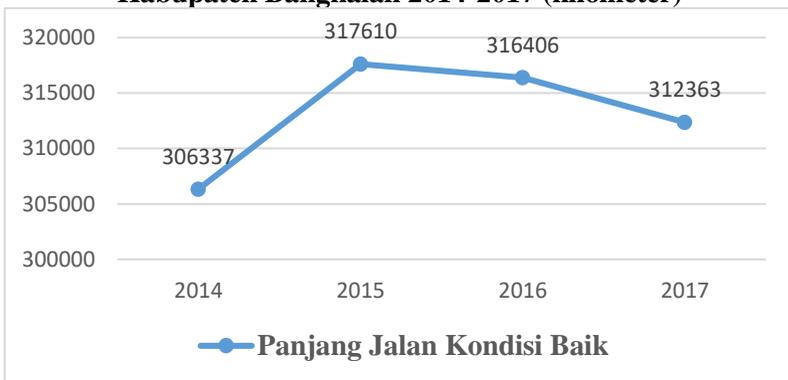
Kondisi jalan dengan kategori baik ditunjukkan dengan panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2014 hingga tahun 2017. Panjang jalan dengan kategori baik dapat ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Kondisi Jalan dengan Kategori Baik Kabupaten Bangkalan 2014-2017 (kilometer)**

Tahun	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Total	Presentase Kondisi Jalan Kategori Baik	Peningkatan Rata-Rata per tahun
2014	306.337	144.658	106.960	73.410	721.365	42,47%	0,7%
2015	317.610	66.331	87.488	249.936	721.365	44,03%	
2016	316.406	109.660	106.616	188.683	721.365	43,86%	
2017	312.363	146.208	103.171	159.623	721.365	43,30%	

*Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan, 2019*

**Gambar 4.8 Grafik Kondisi Jalan dengan Kategori Baik Kabupaten Bangkalan 2014-2017 (kilometer)**



*Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan, 2019*

Berdasarkan data pada **tabel 4.9.** dan **gambar 4.8** diatas, kondisi jalan dengan kategori baik di Kabupaten Bangkalan terus mengalami penurunan selama tahun 2014 hingga tahun 2017 dengan penurunan rata-rata per tahun sebesar 12%. Diketahui bahwa pada tahun 2014 panjang jalan dengan kondisi baik sebesar 306.337 kilometer, kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 317.610 kilometer. Pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan dari tahun 2015 sehingga jalan dengan kategori baik menjadi 316.406 kilometer. Panjang jalan dengan kondisi baik pada tahun

2017 mengalami penurunan dari tahun 2016 sehingga menjadi 312.363 kilometer.

#### 4.1.1.4. Indikator Lingkungan Usaha Produktif

Indikator lingkungan usaha produktif yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain total investasi per kapita, *firm density*, presentase penduduk dengan pendidikan tinggi universitas, dan tingkat kepadatan penduduk. Presentase penduduk dengan pendidikan tinggi universitas dan tingkat kepadatan penduduk berhubungan dengan lingkungan usaha produktif yaitu termasuk dalam lingkungan usaha produktif oleh masyarakat.

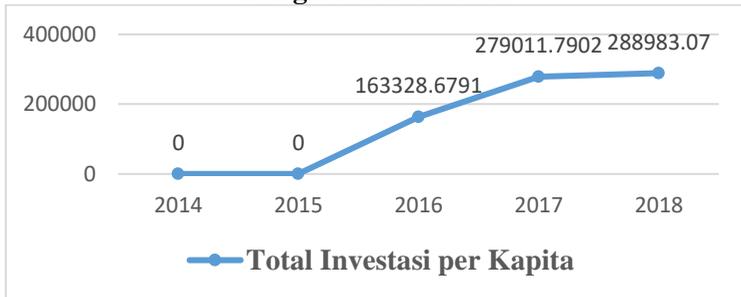
Total investasi per kapita ditunjukkan dengan total investasi dibagi dengan jumlah penduduk. Nilai investasi yang digunakan terdiri dari PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.10 Total Investasi per Kapita Kabupaten Bangkalan 2014-2018**

Tahun	PMA (rupiah)	PMDN (rupiah)	Total Investasi (rupiah)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Total Investasi per Kapita	Peningkatan Rata-Rata per tahun
2014	-	-	-	1.057.363	0	38%
2015	-	-	-	1.058.978	0	
2016	24.000.000.000	149.525.615.181	173.525.615.181	1.062.432	163.328,68	
2017	10.001.000.000	287.804.466.324	297.805.466.324	1.067.358	279.011,79	
2018	-	309.390.188.000	309.390.188.000	1.057.363	288.983,07	

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan, 2019*

**Gambar 4.9 Grafik Total Investasi per Kapita Kabupaten Bangkalan 2014-2017**



*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan, 2019*

Berdasarkan **tabel 4.10** dan **gambar 4.9** diatas terlihat bahwa investasi baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) baru masuk ke Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016. Sehingga pada tahun 2014 dan 2015 belum terdapat pihak investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bangkalan. Selama tahun 2016 hingga tahun 2018, total investasi per kapita di Kabupaten Bangkalan cenderung meningkat dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 38 %. Total investasi per kapita pada tahun 2016 sebesar Rp. 163.328,68 per kapita. Kemudian pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi sebesar Rp. 279.011,79 per kapita. Sedangkan pada tahun 2018 menurun, sehingga menjadi Rp. 288.983,07 per kapita.

*Firm density* merupakan rasio perbandingan jumlah industri dibagi dengan luas suatu wilayah. *Firm density* Kabupaten Bangkalan tahun 2014 hingga tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.11 Firm Density Kabupaten Bangkalan 2014-2018**

Tahun	Industri Sektor Pengolahan (unit)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	<i>Firm Density</i> (perusahaan/Km <sup>2</sup> )	Peningkatan Rata-Rata per tahun
2014	476	1.260,14	37,77	
2015	487		38,65	

Tahun	Industri Sektor Pengolahan (unit)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	<i>Firm Density</i> (perusahaan/Km <sup>2</sup> )	Peningkatan Rata-Rata per tahun
2016	500		39,68	2 %
2017	505		40,07	
2018	514		40,79	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan, 2019

**Gambar 4.10 Grafik Firm Density Kabupaten Bangkalan 2014-2018**



Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan, 2019

Berdasarkan data pada **tabel 4.11** dan **gambar 4.10** di atas menunjukkan bahwa jumlah perusahaan sektor industri pengolahan terus meningkat pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Nilai *firm density* Kabupaten Bangkalan juga terus meningkat selama tahun tersebut dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 2%. Pada tahun 2014 nilai *firm density* Kabupaten Bangkalan adalah sebesar 37,77 perusahaan/km<sup>2</sup>. Kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 38,65 perusahaan/km<sup>2</sup>. Pada tahun 2016 nilai *firm density* kembali meningkat sehingga menjadi 39,68 perusahaan/km<sup>2</sup>. Kemudian pada angka tetap pada tahun 2017 yaitu sebesar 40,07 perusahaan/km<sup>2</sup>. Pada tahun 2018, meningkat menjadi 40,79 perusahaan/km<sup>2</sup>.

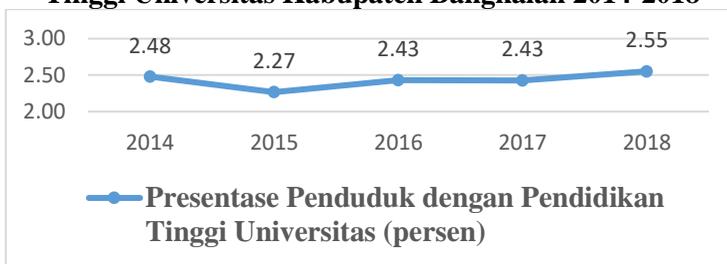
Presentase penduduk dengan pendidikan tinggi universitas merupakan presentase penduduk di Kabupaten Bangkalan yang memiliki pendidikan tertinggi universitas terhadap total penduduk.

**Tabel 4.12 Presentase Penduduk dengan Pendidikan Tinggi Universitas Kabupaten Bangkalan 2014-2018**

Tahun	Penduduk dengan Pendidikan Tinggi Universitas (jiwa)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Penduduk dengan Pendidikan Tinggi Universitas (persen)	Peningkatan Rata-Rata per tahun
2014	26.234	1.057.363	2,48	1%
2015	24.002	1.058.978	2,27	
2016	25.814	1.062.432	2,43	
2017	25.917	1.067.358	2,43	
2018	27.326	1.070.617	2,55	

Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan dan BPS Jawa Timur, 2019

**Gambar 4.11 Grafik Presentase Penduduk dengan Pendidikan Tinggi Universitas Kabupaten Bangkalan 2014-2018**



Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan dan BPS Jawa Timur, 2019

Berdasarkan data pada **tabel 4.12** diatas, diketahui bahwa penduduk dengan pendidikan tinggi universitas di Kabupaten Bangkalan mulai tahun 2014 hingga 2018 mengalami peningkatan, dengan angka peningkatan rata-rata per tahun sebesar 1%. Pada tahun 2014 sebesar 2,48% untuk penduduk dengan pendidikan tinggi universitas. Kemudian pada tahun 2015 menurun menjadi sebesar 2,27% untuk penduduk dengan pendidikan tinggi universitas. Sedangkan pada tahun 2016, penduduk dengan tamatan universitas

meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 2,43%. Tahun 2017, angka tersebut tetap pada angka yang sama yaitu 2,43%. Pada tahun 2018, penduduk dengan pendidikan tinggi universitas di Kabupaten Bangkalan kembali meningkat menjadi 2,55%.

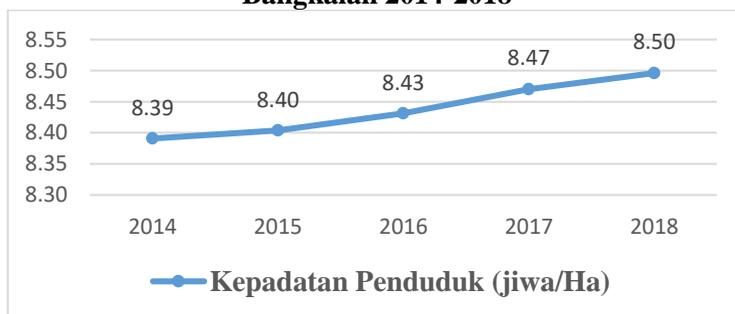
Tingkat kepadatan penduduk merupakan rasio antara jumlah penduduk terhadap luas wilayah. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.13 Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangkalan 2014-2018**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha)	Peningkatan Rata-Rata per tahun
2014	1.057.363	126.014	8	0,31 %
2015	1.058.978		8	
2016	1.062.432		8	
2017	1.067.358		8	
2018	1.070.617		9	

*Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan, 2019*

**Gambar 4.12 Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangkalan 2014-2018**



*Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan, 2019*

Berdasarkan data di atas, kepadatan penduduk di Kabupaten Bangkalan semakin meningkat mulai dari tahun 2014 hingga tahun

2018 dengan peningkatan rata-rata per tahun selama tahun tersebut sebesar 0,31%. Berdasarkan Undang-Undang nomor 56 tahun 1960 tentang Klasifikasi Kepadatan Penduduk, Kabupaten Bangkalan termasuk daerah dengan kategori sangat padat karena memiliki tingkat kepadatan lebih dari 401 jiwa/km<sup>2</sup> atau sama dengan 4 jiwa/ha. Kepadatan penduduk pada tahun 2014 sebesar 8,39 jiwa/ha. Kemudian meningkat pada tahun 2015 sehingga menjadi 8,40 jiwa/ha. Pada tahun 2016, kepadatan penduduk kembali meningkat menjadi 8,43 jiwa/ha. Tahun 2017 kembali terjadi peningkatan sehingga Kabupaten Bangkalan pada tahun tersebut memiliki kepadatan penduduk sebesar 8,47 jiwa/ha. Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi sebesar 8,50 jiwa/ha.

#### 4.1.1.5. Indikator Perbankan dan Lembaga Keuangan

Dalam indikator perbankan dan Lembaga keuangan, penelitian ini akan membahas rasio nilai volume usaha terhadap koperasi aktif dan nilai tambah sektor keuangan per kapita.

Rasio nilai volume usaha terhadap koperasi aktif merupakan nilai volume usaha dibagi dengan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Bangkalan. Koperasi di Kabupaten Bangkalan terbagi menjadi beberapa jenis koperasi diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.14 Jenis Koperasi di Kabupaten Bangkalan**

No	Jenis Koperasi	No	Jenis Koperasi
1	KUD Pangan	20	KSP
2	KUD Mina	21	Kop. Angkutan Darat
3	Kop. Pertanian	22	Kop. Angkutan Laut
4	Kop. Perkebunan	23	Kop. Wisata
5	KPTR	24	Kop. Telkom
6	Kop. Kehutanan	25	Kop. Perumahan
7	Kop. Peternakan	26	KBPR
8	Kop. Perikanan	27	Kopwan
9	Kopti	28	Kop. Profesi
10	Koppontren	29	Kop. Veteran

No	Jenis Koperasi	No	Jenis Koperasi
11	Kopinkra	30	Kop. Wredatama
12	KPRI	31	Kop. Peprabri
13	Kopkar	32	Kop. Mahasiswa
14	Kop. Angkatan Darat	33	Kop. Pemuda
15	Kop. Angkatan Laut	34	Kop. Pertambangan
16	Kop. Angkatan Udara	35	Kop. PK Lima
17	Kop. Kepolisian	36	Kop. Jamu Gendong
18	Kop. Serba Usaha	37	Kop. Lainnya
19	Kop. KOPPAS	38	Koperasi Sekunder

*Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan, 2019*

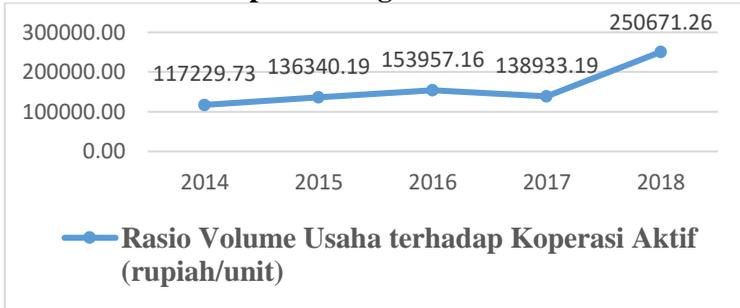
Sedangkan untuk nilai volume usaha terhadap koperasi aktif Kabupaten Bangkalan selama tahun 2014 hingga tahun 2018 adalah sebagai terlihat pada **tabel 4.15** berikut:

**Tabel 4.15 Rasio Volume Usaha terhadap Koperasi Aktif di Kabupaten Bangkalan**

Tahun	Volume Usaha (Rp. 000)	Koperasi Aktif (unit)	Rasio (rupiah)	Peningkatan Rata-Rata per tahun
2014	78.309.457	668	117.229,73	28%
2015	91.893.291	674	136.430,19	
2016	103.921.086	675	153.957,16	
2017	95.169.235	685	138.933,19	
2018	171.709.810	685	250.671,26	

*Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan, 2019*

**Gambar 4.13 Grafik Rasio Volume Usaha terhadap Koperasi Aktif di Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2018**



*Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan, 2019*

Berdasarkan data pada **tabel 4.15** dan **gambar 4.13** diatas, rasio nilai volume usaha terhadap koperasi aktif Kabupaten Bangkalan tahun 2014 hingga tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2017 mengalami penurunan. Peningkatan rata-rata per tahun rasio volume usaha terhadap koperasi aktif di Kabupaten Bangkalan adalah 28%. Pada tahun 2014, rasio volume usaha terhadap koperasi aktif sebesar Rp. 117.229,73. Kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi Rp. 136.430,19. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2016 sehingga rasio volume usaha terhadap koperasi aktif pada tahun tersebut sebesar Rp. 153.957,16. Pada tahun 2017, rasio volume usaha terhadap koperasi aktif mengalami penurunan sehingga menjadi Rp. 138.933,19. Namun pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang signifikan sehingga rasio volume usaha terhadap koperasi aktif sebesar Rp.250.671,26.

Nilai tambah sektor keuangan per kapita merupakan nilai tambah sektor keuangan dibagi jumlah penduduk. Nilai tambah sektor keuangan ditunjukkan dengan nilai PDRB ADHK sektor jasa keuangan dibagi dengan jumlah penduduk. Nilai tambah sektor keuangan per kapita di Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.16 Nilai Tambah Sektor Keuangan Kabupaten Bangkalan 2014-2017**

Tahun	Nilai Tambah Sektor Keuangan (miliar rupiah)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Nilai Tambah Sektor Keuangan per Kapita (rupiah)	Peningkatan Rata-Rata per tahun
2014	249,3	1.057.363	235.775,23	5%
2015	257,5	1.058.978	243.158,97	
2016	273,1	1.062.432	257.051,75	
2017	287,7	1.067.358	269.544,05	

*Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan, 2019*

**Gambar 4.14 Grafik Nilai Tambah Sektor Keuangan Kabupaten Bangkalan 2014-2017**



*Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan, 2019*

Berdasarkan data pada **tabel 4.16** dan **gambar 4.14** terlihat bahwa nilai tambah sektor keuangan per kapita Kabupaten Bangkalan tahun 2014 hingga tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Peningkatan rata-rata per tahun nilai tambah sektor keuangan per kapita Kabupaten Bangkalan selama tahun 2014 hingga tahun 2017 adalah sebesar 5%. Berdasarkan data di atas, nilai tambah sektor keuangan per kapita tahun 2014 sebesar Rp. 235.775,23. Kemudian mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2015 sebesar Rp. 243.158,97. Pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan sehingga menjadi Rp. 257.051,75. Peningkatan kembali

terjadi pada tahun 2017 nilai tambah sektor keuangan per kapita Kabupaten Bangkalan pada tahun tersebut sebesar Rp. 269.544,05.

#### 4.1.2. Indikator Output

Indikator output yang akan dibahas dalam penelitian ini terdiri dari beberapa variabel. Variabel-variabel tersebut antara lain PDRB per kapita, produktivitas tenaga kerja, dan tingkat kesempatan kerja.

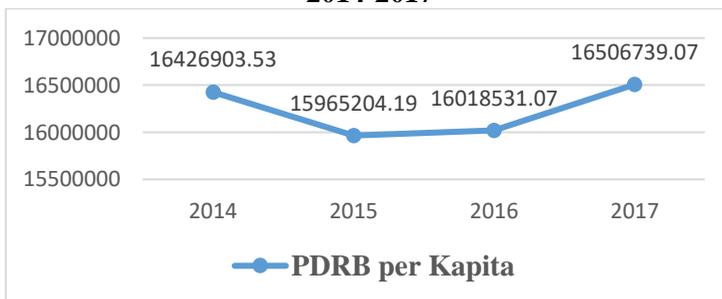
PDRB per kapita ditunjukkan dari jumlah PDRB ADHK dibagi dengan jumlah penduduk. Penjelasan lebih lanjut terkait PDRB per kapita Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.17 PDRB per Kapita Kabupaten Bangkalan 2014-2017**

Tahun	PDRB (miliar rupiah)	Jumlah Penduduk (orang)	PDRB per Kapita (ribu rupiah per orang)	Peningkatan Rata-Rata per tahun
2014	17.369,2	1.057.363	16.426,90	0,2%
2015	16.906,8	1.058.978	15.965,20	
2016	17.018,6	1.062.432	16.018,53	
2017	17.618,6	1.067.358	16.506,74	

*Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan & Analisis Penulis, 2019*

**Gambar 4.15 Grafik PDRB per Kapita Kabupaten Bangkalan 2014-2017**



*Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan & Analisis Penulis, 2019*

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bangkalan, PDRB per kapita selama tahun 2014 hingga tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan walaupun dari tahun 2014 ke tahun 2015 sempat menurun. Selama tahun tersebut peningkatan rata-ratanya adalah sebesar 0,2%. Dapat dilihat pada tabel dan grafik di atas bahwa pada tahun 2014 PDRB per kapita Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 16.426,90. Kemudian mengalami penurunan sehingga PDRB per kapita Kabupaten Bangkalan tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 15.965,20. Kemudian terjadi peningkatan di tahun 2016 sehingga PDRB per kapita pada tahun tersebut menjadi Rp. 16.018,53. PDRB per kapita tahun 2017 kembali mengalami peningkatan sehingga menjadi Rp. 16.506,74.

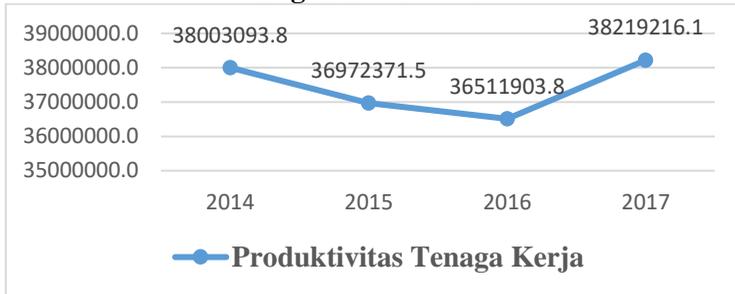
Produktivitas tenaga kerja ditunjukkan dengan jumlah PDRB ADHK dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Bangkalan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.18 Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan 2014-2017**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB ADHK (miliar rupiah)</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja (orang)</b>	<b>Produktivitas Tenaga Kerja (rupiah per orang)</b>	<b>Penurunan Rata-Rata per tahun</b>
2014	17.369,2	457.047	38.003.093,8	0,2%
2015	16.906,8	457.282	36.972.371,5	
2016	17.018,6	466.111	36.511.903,8	
2017	17.618,6	460.988	38.219.216,1	

*Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan, 2019*

**Gambar 4.16 Grafik Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan 2014-2017**



*Sumber: BPS Kabupaten Bangkalan, 2019*

Produktivitas tenaga kerja Kabupaten Bangkalan dari tahun 2014 hingga tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan rata-rata per tahunnya adalah 0,2%. Pada data di atas, dapat dilihat bahwa produktivitas tenaga kerja tahun 2014 adalah Rp. 38.003.093,8 per tenaga kerja. Kemudian menurun pada tahun 2015, sehingga menjadi sebesar Rp. 36.972.371,5 per tenaga kerja. Tahun 2016, produktivitas tenaga kerja Kabupaten Bangkalan kembali menurun sehingga menjadi Rp. 36.511.903,8 per tenaga kerja. Namun, pada tahun 2017 terjadi peningkatan sehingga menjadi sebesar Rp. 38.219.216,1 per tenaga kerja.

## 4.2. Analisis dan Pembahasan

### 4.2.1. Mengeksplorasi Karakteristik Variabel Lemahnya Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan

Variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan yang akan dieksplor karakteristiknya terdiri dari 16 variabel. Karakteristik tersebut didasarkan pada kondisi eksisting, teori, dan pendapat harapan *stakeholder* terkait dengan masing-masing variabel beserta perkembangan setiap variabel dari tahun 2014 hingga 2018. Hasil sasaran ini akan menjadi masukan untuk sasaran tiga yaitu merumuskan upaya peningkatan daya saing daerah.

### **4.2.1.1. Indikator Input**

#### **A. Indikator Perekonomian dan Keuangan Daerah**

##### **A1. Kapasitas Fiskal Daerah**

Kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bangkalan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Peningkatan rata-rata per tahunnya adalah sebesar 14%. Menurut pendapat stakeholder, kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bangkalan tergolong tidak terlalu kuat, hal tersebut dipengaruhi oleh PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang kecil. Dimana PAD kecil dipengaruhi oleh pendapatan sektor pajak dan retribusi daerah yang belum optimal. Selain itu, stakeholder memberikan keterangan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bangkalan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Sebagai tambahan, menurut *stakeholder* lemahnya kapasitas fiskal daerah juga dipengaruhi oleh identifikasi objek pajak yang lemah.

Menurut Gardiner, Martin, Tyler (2004), perekonomian dan keuangan daerah mempengaruhi daya saing daerah melalui kinerja ekonomi suatu daerah yang baik. Untuk mengetahui kinerja ekonomi daerah yang baik dapat salah satunya dilihat melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah (Chodariyanti, 2015). Kinerja kemampuan keuangan daerah dapat dilihat salah satunya melalui analisis kapasitas fiskal daerah (Reksodihadiarjo, 2000). Semakin meningkat kapasitas fiskal daerah, maka semakin besar modal untuk membangun daerah yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih, 2016). Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya, potensi tersebut berasal dari penjumlahan potensi PAD, penerimaan bagi hasil, dana alokasi umum, dan pendapatan daerah lainnya yang sah (Saragih, 2016). Rendahnya kapasitas fiskal daerah dikarenakan lambatnya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi (Sriyana, 2009). Untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tidak hanya berasal dari peningkatan PAD saja, namun juga peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah (Kurniasih, 2011). Namun, peningkatan kapasitas fiskal daerah bukan berarti anggaran yang besar jumlahnya

melainkan perlu ada pengelolaan anggaran yang baik sehingga kebocoran anggaran dapat dihindari, sehingga hal terpenting adalah optimalisasi anggaran karena pemerintah daerah bersifat sebagai fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di daerah (Osborne dan Gaebler dalam Kurniasih, 2011).

Sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, pasal 157 antara lain (1) pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah; (2) dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Harapan stakeholder dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah adanya pengoptimalan PAD. Pengoptimalan PAD dilakukan untuk memenuhi target-target yang belum tercapai agar semua potensi PAD dapat diraih dan direalisasikan. Selain itu, perlu adanya pengembangan sektor-sektor yang dapat menunjang PAD antara lain sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa, serta pariwisata. Harapannya dengan begitu ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat rendah.

## ***A2. Government Size***

*Government size* Kabupaten Bangkalan selama tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami penurunan. Penurunan rata-rata per tahunnya sebesar 5%. Berdasarkan pendapat stakeholder, ukuran pemerintah daerah sangat bergantung pada pengeluaran pemerintah untuk masyarakatnya, sedangkan terkait hal tersebut, belum ada efisiensi dalam hal tersebut.

Berdasarkan Bank Indonesia dan LP3E FE-UNPAD (2008), perekonomian dan keuangan daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari perekonomian daerah dimana kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi suatu daerah. *Government size* atau ukuran pemerintahan (konteks dalam penelitian ini adalah

ukuran pemerintah daerah) mempengaruhi kinerja pemerintah daerah (Hutapea dkk, 2017). *Government size* pada penelitian ini tergantung pada pengeluaran pemerintah terhadap PDRB yang ada. Semakin kecil ukuran pemerintahan, menunjukkan daerah tersebut memiliki nilai PDRB yang tinggi dibandingkan dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Artinya daerah tersebut semakin mandiri, karena tingginya PDRB yang berasal dari dorongan kegiatan sektor-sektor dimasyarakat. PDRB menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumberdaya pembangunan yang dimilikinya (Sukirno dalam Ikbar, 2017). Dengan begitu pada gilirannya akan meningkatkan daya saing daerah tersebut. sehingga semakin kecil *government size*, maka semakin meningkatkan daya saing daerah.

Harapan stakeholder terhadap peningkatan variabel *government size* adalah adanya peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik yang maksimal. Dimana pengeluaran tersebut juga perlu diimbangi dengan pendapatan dari sektor-sektor yang ada yaitu ditandai dengan peningkatan PDRB. Namun selain peningkatan pengeluaran pemerintah untuk masyarakat, juga diperlukan efisiensi agar uang yang dikeluarkan pemerintah tepat sasaran. Peningkatan efisiensi pembiayaan belanja di Bangkalan dengan menimplementasikan strategi *pro growth, pro poor*, di Bangkalan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### **A3. Belanja Pelayanan Publik per Kapita**

Belanja pelayanan publik per kapita di Kabupaten Bangkalan fluktuatif namun cenderung meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Adapun peningkatan rata-rata per tahunnya adalah 1%. Menurut stakeholder, belanja pelayanan publik di Kabupaten Bangkalan sendiri belum efisien dan belum adanya integrasi antar program. Menurutnya, jika terintegrasi pembangunan daerah akan lebih optimal. Selain itu stakeholder juga menambahkan bahwa belanja pelayanan publik per kapita menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap publik (masyarakat).

Keberhasilan pembangunan daerah terkait belanja untuk pelayanan publik tidaklah hanya fokus pada peningkatan nominal

saja melainkan peningkatan proporsi belanja pelayanan publik terhadap keseluruhan belanja daerah (Nurhidayati dkk, 2013). Alokasi belanja (termasuk didalamnya belanja pelayanan publik) merupakan salah satu cara fundamental daerah otonom untuk meningkatkan potensi pembangunan wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan kemandirian (Fransisco, 2016). Dalam rangka peningkatan daya saing daerah itu sendiri, dapat dilakukan melalui kinerja keuangan daerah yang baik yaitu melalui good governance dalam pengelolaan keuangan daerah secara professional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan yang telah ditetapkan pada peraturan yang berlaku (Wibowo, 2014). Belanja untuk publik perlu ditingkatkan dalam hal efisiensinya agar dampak yang dihasilkan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sum berdaya manusia (Eggoh, 2015). Dalam kaitannya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah peran alokatif, yaitu pemerintah harus menyusun kebijakan untuk mengalokasikan belanja daerah termasuk belanja pelayanan publik didalamnya pada sektor yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai (Deswantoro dkk, 2017). Dalam pengelolaan belanja daerah terdapat enam prinsip yang perlu diperhatikan salah satunya adalah integrasi alokasi dana (Adisasmita dalam Susetyo, 2014).

Harapan stakeholder terhadap peningkatan variabel belanja pelayanan publik per kapita adalah efisiensi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan dan lebih tepat sasaran, serta stakeholder menyarankan berdasarkan dari sisi program anggaran perlu adanya integrasi antara program/kegiatan satu dengan lainnya. Selain itu juga saran lainnya adalah mengoptimalkan fungsi SKPD yang ada agar belanja pelayanan publik lebih optimal.

## **B. Indikator SDM dan Ketenagakerjaan**

### **B1. Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Bangkalan berada pada angka 52,56% ditahun 2017, cenderung terus mengalami

penurunan dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk di Kabupaten Bangkalan memiliki tanggungan sebanyak 53 penduduk yang belum produktif maupun tidak produktif lagi. Penurunan rata-rata per tahun rasio ketergantungan selama rentang tahun tersebut sebesar 1%. Berdasarkan data yang ada, penduduk yang telah bekerja dibandingkan dengan penduduk usia produktif di Kabupaten Bangkalan mengalami trend peningkatan selama tahun 2014 hingga tahun 2017. Berdasarkan informasi dari stakeholder, penduduk usia produktif yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga memiliki keinginan tinggi untuk membuka wirausaha baru, terutama bagi keluarga miskin.

Rasio ketergantungan digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan suatu daerah tergolong daerah maju atau berkembang (Sari, 2016). Semakin tinggi angka rasio ketergantungan suatu daerah, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh penduduk berusia produktif untuk membiayai hidup penduduk berusia non produktif. Angka kelahiran yang tinggi berimplikasi pada tingginya rasio ketergantungan, dimana tingginya rasio ketergantungan akan meningkatkan proporsi populasi yang hidup dalam kemiskinan (Knowles dalam Marmujiono, 2014). Menurut Syamsudin dalam Sari (2016), rasio ketergantungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin kecil angka rasio ketergantungan suatu daerah, maka semakin berpengaruh meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, yang tentunya berpengaruh dalam peningkatan daya saing daerah.

Harapan stakeholder terkait rasio ketergantungan di Kabupaten Bangkalan dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan keterampilan. Sehingga penduduk yang berusia menjelang masa-masa tidak produktif, minimal mengasah keterampilan untuk bekal kedepannya, maka dari itu diperlukan peningkatan keterampilan. Selain itu stakeholder juga menambahkan bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Bangkalan masih cenderung tinggi, namun penduduk yang bekerja dalam penduduk usia produktif sudah tinggi, namun dalam peningkatan daya saing daerah jika penduduk tidak

memiliki kemampuan atau skill, kurang optimal dalam peningkatan daya saingnya. Sehingga perlu adanya peningkatan skill kaitannya dengan angka rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Bangkalan, terutama berkaitan dengan mengoptimalkan penduduk usia produktif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## **B2. Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bangkalan dari tahun 2014 hingga tahun 2017 berkisar pada angka 5 tahun. Artinya penduduk yang berusia 25 tahun ke atas, rata-rata menempuh atau menamatkan pendidikan hanya hingga kelas 5 sekolah dasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Bangkalan belum menamatkan pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Berdasarkan data tersebut, rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan rata-rata per tahun 0,5% dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Berdasarkan informasi dari *stakeholder* terkait rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangkalan adalah terkait masalah banyaknya anak putus sekolah yaitu belum menamatkan jenjang SD (Sekolah Dasar), sarana dan prasarana pendidikan belum optimal, biaya pendidikan yang dirasa cenderung masih tinggi, serta relevansi pendidikan dengan dunia kerja yang rendah menjadi masalah dalam bidang pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Selain masalah tersebut juga pola pikir penduduk yang kurang terhadap pendidikan.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan salah satu data atau informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia atas dasar kualitas hidup. Salah satu komponennya adalah rata-rata lama sekolah yang mewakili dimensi pendidikan (Kahar, 2018). Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan tingginya jenjang pendidikan yang pernah diduduki oleh seseorang (BPS, 2019). Pendidikan merupakan faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Selain menambah pengetahuan, pendidikan mampu meningkatkan ketrampilan kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja (Simanjuntak dalam Ernawati, 2013). Pendidikan merupakan cara yang

paling baik dalam meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia, kualitas hidup tersebut menentukan daya saing pada suatu daerah (Gardiner, Martin, Tyler, 2004). Pendidikan mampu meningkatkan sumber daya manusianya namun perlu didukung dengan fasilitas pendidikan yang baik. Sarana dan prasarana fasilitas pendidikan yang dimiliki merupakan faktor pendukung terlaksananya program sekolah (Novita, 2017). Relevansi pendidikan dan dunia kerja yaitu bagaimana menyediakan kualitas lulusan yang ada sesuai dengan permintaan dunia usaha sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (Sukarman, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 6, disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Berdasarkan kebijakan tersebut, pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomor 6 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan dasar wajib dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan yang dialokasikan dalam APBD sebagai pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.

Menurut Todaro dalam Ernawati (2013), lamanya pendidikan seseorang ditentukan oleh pengaruh dari beberapa hal diantaranya status sosial, budaya, pendidikan orang tua, dan beban ketergantungan dalam anggota keluarga. Seseorang yang tidak menamatkan pendidikannya sehingga mengakibatkan putus sekolah terutama jenjang pendidikan dasar disebabkan oleh beberapa hal antara lain (1) tingkat pendapatan orang tua rendah, (2) persepsi orang tua tentang pendidikan formal yang rendah, (3) minat belajar yang kurang, dan (4) jarak tempat tinggal yang jauh dengan sekolah.

Harapan stakeholder dalam peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bangkalan dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan fasilitas pendidikan yang ada dan peningkatan jenjang pendidikan penduduk hingga perguruan tinggi. Selain itu,

stakeholder berharap agar pemerintah perlu meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dengan begitu akan mempengaruhi lama sekolah penduduk yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Sehingga perlu ditekankan kepada penduduk bahwa sekarang biaya sekolah sampai SMP telah ditanggung pemerintah kabupaten. Kemudian juga diperlukan pemerataan fasilitas pendidikan baik secara fisik bangunan maupun tenaga kerja dalam bidang pendidikan. Beberapa stakeholder juga berharap adanya perubahan pola pikir terkait mengenyam pendidikan secara formal, dimana penduduk Kabupaten Bangkalan cenderung berpikir tidak perlu untuk sekolah dan langsung melakukan praktek di lapangan. Sehingga diperlukan perubahan pola pikir terkait pentingnya mengenyam pendidikan dan relevansinya dengan dunia kerja melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang ada.

### **B3. Angka Harapan Hidup**

Angka harapan hidup di Kabupaten Bangkalan dari tahun 2014 hingga tahun 2017 terus mengalami peningkatan yaitu berkisar pada angka 69 tahun hingga 70 tahun. Peningkatan rata-rata per tahun angka harapan hidup di Kabupaten Bangkalan adalah 0,1%.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari stakeholder, pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangkalan menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan adanya fasilitas kesehatan maupun tenaga medis yang diperlukan untuk melayani masyarakat. Seperti fasilitas rumah sakit daerah maupun swasta, puskesmas, hingga posyandu. Namun berdasarkan keterangan stakeholder, pemerataan sarana maupun prasarana belum optimal.

Menurut Gardiner, Martin, Tyler (2004), ketersediaan kualitas sumber daya manusia yang baik dapat mendukung daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan salah satu data atau informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia atas dasar kualitas hidup. Salah satu komponennya dalam dimensi kesehatan adalah angka harapan hidup (Kahar, 2018). Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator kesehatan yang

dapat mencerminkan status kesehatan dan menggambarkan kualitas hidup masyarakat dalam suatu daerah (Ardianti, 2015). Berdasarkan artikel tersebut angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh pendidikan, pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Selain itu menurut UNDP (United Nations Development Programs), usia harapan hidup dapat panjang jika status kesehatan, gizi, dan lingkungannya yang baik. Selain itu ketersediaan fasilitas kesehatan sebagai komponen dalam peningkatan pembangunan manusia. Pemerataan fasilitas pendidikan dibutuhkan agar setiap masyarakat memperoleh pelayanan dengan standar mutu yang telah ditetapkan (Yandrizal dkk, 2016).

Harapan dari stakeholder terhadap peningkatan variabel angka harapan hidup di Kabupaten Bangkalan dalam rangka peningkatan daya saing daerah adalah bahwa perlunya lebih diperhatikan pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang gratis agar dapat ditingkatkan setiap tahunnya. Selain itu juga stakeholder berharap peningkatan keterlibatan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan agar pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangkalan semakin baik. Kemudian pemerataan dan peningkatan fasilitas kesehatan juga termasuk dalam harapan stakeholder dalam peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Bangkalan.

### **C. Indikator SDA, Infrastruktur, dan Lingkungan**

#### **C1. Nilai Tambah Sektor Pengangkutan per Kapita**

Nilai tambah sektor pengangkutan per kapita di Kabupaten Bangkalan terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Peningkatan rata-rata per tahunnya adalah sebesar 5%. Nilai tambah sektor pengangkutan di Kabupaten Bangkalan berasal dari penyediaan angkutan darat, angkutan laut, angkutan sungai danau, serta jasa penunjang angkutan seperti terminal, pelabuhan, dan lainnya. Menurut stakeholder, nilai tambah sektor pengangkutan dipengaruhi oleh aksesibilitas. Berdasarkan informasinya, penyediaan angkutan di Kabupaten Bangkalan sudah mulai berkembang ditandai dengan mulai masuknya jasa penyediaan angkutan darat seperti Go-Jek maupun Grab dan jembatan Suramadu sebagai salah satu akses

masuk ke Kabupaten Bangkalan, namun penyediaan angkutan darat untuk daerah perdesaan masih kurang karena aksesibilitas ke daerah tersebut buruk sehingga daerah perdesaan cenderung masih terisolir.

Menurut Gardiner, Martin, dan Tyler (2004), nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian. Pertumbuhan sektor pengangkutan sangat dipengaruhi oleh dinamika mobilisasi masyarakat dan aktivitas ekonomi (BPS, 2018). Jasa transportasi sebagai sarana pengangkutan dapat menunjang perekonomian daerah melalui kontribusinya dalam PDRB, dimana perlu disediakan secara cukup, murah, dan merata agar pembangunan daerah sesuai dengan harapan yang pada akhirnya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Setiawan dkk, 2017). Permintaan terhadap jasa transportasi akan bertambah apabila kegiatan produksi dan ekonomi dalam suatu daerah meningkat dan sebaliknya (Kamaluddin, 2003).

Harapan stakeholder terhadap peningkatan variabel nilai tambah sektor pengangkutan per kapita di Kabupaten Bangkalan adalah adanya peningkatan aksesibilitas di daerah perdesaan sehingga penyediaan angkutan dapat optimal dan daerah perdesaan lebih terbuka. Selain itu saran lainnya adalah memperlancar retribusi barang dan jasa serta peningkatan penyediaan infrastruktur. Dengan peningkatan nilai tambah sektor pengangkutan per kapita di Kabupaten Bangkalan, stakeholder berharap hal tersebut dapat mendukung kegiatan ekonomi daerah terutama kegiatan industri yang ada.

## **C2. Kondisi Jalan dengan Kategori Baik**

Berdasarkan data yang ada, panjang jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Bangkalan cenderung meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2017, namun memang ada penurunan pada tahun 2016 ke tahun 2017. Peningkatan rata-rata per tahunnya adalah sebesar 0,7%. Permasalahan terkait kondisi jalan di Kabupaten Bangkalan berdasarkan informasi dari stakeholder adalah kualitas jalan pada beberapa titik yang masih kurang optimal, seperti pada jalan antar kecamatan maupun jalan desa. Sehingga ketika musim hujan, jalan-

jalan yang memiliki kualitas kurang tersebut dapat mengganggu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh penduduk. Selain itu berdasarkan informasi dari stakeholder, jalan-jalan yang menghubungkan dengan pelabuhan yang ada di Kabupaten Bangkalan masih belum memadai.

Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dimana pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dijumpai pada wilayah yang memiliki ketersediaan infrastruktur mencukupi (World Bank dalam Maryaningsih, 2014). Berdasarkan Martinier, Gardiner, Tyler (2004), ketersediaan atau kualitas modal fisik infrastruktur dapat mendukung aktivitas perekonomian suatu daerah yang pada akhirnya dapat mendukung daerah dalam peningkatan daya saing daerah. Infrastruktur berdasarkan penelitian ini lebih membahas pada infrastruktur jalan. Menurut Sembanyang (2011), dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi hal yang paling cukup penting adalah ketersediaan infrastruktur jalan, terutama penambahan panjang jalan sebagai mode transportasi. Dengan mode transportasi yang baik, aktivitas perekonomian daerah ikut berjalan dengan baik pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan berpengaruh pada peningkatan daya saing daerah.

Harapan stakeholder terhadap peningkatan variabel kondisi jalan dengan kategori baik dengan target tahun 2017 dan 2018 sekitar 82% hingga 85%, dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat disimpulkan bahwa kondisi jalan di Kabupaten Bangkalan mayoritas sudah baik. Namun memang diperlukan peningkatan pada beberapa titik, misalnya jalan antar kecamatan dan jalan desa. Sehingga stakeholder berharap terdapat perbaikan dan peningkatan infrastruktur terutama infrastruktur jalan karena ketersediaan infrastruktur salah satunya jalan yang baik dapat berpengaruh terhadap masuknya investasi di suatu daerah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi peningkatan daya saing daerah. Selain itu stakeholder berharap adanya perhatian dan penanganan terhadap kondisi jalan agar tetap terpelihara, sehingga akses penduduk dapat dipermudah terutama untuk kegiatan pengangkutan hasil produksi di

Kabupaten Bangkalan menuju pasar-pasar yang potensial yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi seperti pada sektor pertanian, perdagangan, dan lainnya yang berdampak dapat menarik investor ke daerah.

## **D. Indikator Lingkungan Usaha Produktif**

### **D1. Total Investasi per Kapita**

Total investasi per kapita Kabupaten Bangkalan terus meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2018, dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 38%. Peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan investasi yang masuk ke Kabupaten Bangkalan yaitu PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari stakeholder, kesiapan Kabupaten Bangkalan untuk menarik investor adalah dengan memberikan izin, memfasilitasi, melayani investor agar berinvestasi di Kabupaten Bangkalan. Dalam mempromosikan potensi daerahnya sendiri, pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan telah melakukan promosi baik secara *online* seperti media sosial dan website maupun *offline* seperti menghadiri pameran-pameran maupun forum-forum investasi. Selain itu, kesiapan lainnya adalah daerah tersebut telah menyiapkan pre-FS (Pre-Feasibility Study) terutama terkait industri kemaritiman, seperti dalam bidang pariwisata dan pelabuhan untuk menarik investor ke daerah tersebut.

Berdasarkan pendapat stakeholder, walaupun nilai investasi di Kabupaten Bangkalan meningkat namun nilai tersebut termasuk nilai dalam skala kecil dan cenderung stagnan dibandingkan dengan kota maupun kabupaten di Jawa Timur terutama Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan. Permasalahan dalam hal penanaman modal atau investasi di Kabupaten Bangkalan lainnya berdasarkan informasi dari narasumber adalah kesiapan daerah dalam menerima investasi dari segi birokrasi termasuk infrastruktur didalamnya belum optimal, ditambah dengan harga lahan yang cukup tinggi untuk kebutuhan industri, kemudahan dalam pelayanan investasi termasuk perijinan yang belum optimal.

Menurut Gardiner, Martin, Tyler (2004), masuknya investasi di suatu daerah menandakan bahwa iklim usaha di daerah tersebut kondusif. Hal tersebut mampu menarik minat dunia usaha yang pada akhirnya mampu mempengaruhi daya saing daerah. Menurut Sefle (2014), PDRB memiliki pengaruh terhadap investasi. Dimana untuk meningkatkan PDRB dipengaruhi oleh faktor tanah dan kekayaan alam; jumlah serta kualitas penduduk dan tenaga kerja; serta barang-barang modal dan teknologi. Artinya, semakin baik pengelolaan SDA pada suatu daerah, maka investasi juga akan meningkat sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan terjadi penyerapan tenaga kerja yang ikut meningkat. Begitu juga dengan Maulana (2018), tenaga kerja dan panjang jalan berpengaruh terhadap keputusan investor untuk menanamkan modalnya pada suatu daerah. Semakin banyak tenaga kerja, semakin tinggi minat investor untuk menanamkan modal pada suatu daerah. Begitu juga dengan panjang jalan. Peningkatan panjang jalan atau dimaksud dengan kualitas infrastruktur mampu memperlancar arus distribusi barang dan jasa dari kegiatan perekonomian sehingga berpengaruh positif terhadap investor untuk menanamkan modal pada suatu wilayah. Menurut Hanim (2010), untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah kegiatan investasi berperan penting, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat investasi pada suatu daerah antara lain ketersediaan dan kualitas infrastruktur; kondisi ekonomi makro seperti korupsi/KKN, kesta-bilan, serta perpajakan; lingkungan hukum berupa kepastian hukum dan kriminalitas; kelembagaan seperti konsistensi peraturan pemerintah, lamanya mengurus birokrasi kepastian undang-undang dan kebijaksanaan; serta ketenagakerjaan seperti kuantitas kualitas tenaga kerja, penguasaan IPTEK, upah minimum, dan peraturan ketenagakerjaan.

Menurut undang undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal dapat dilakukan dengan penerapan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). PTSP dapat meningkatkan kualitas pelayanan perijinan investasi atau penanaman modal melalui penyederhanaan perijinan dan percepatan waktu

penyelesaian. Selain itu pada Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, dimana pemberian insentif berupa pengurangan/keringanan/pembebasan pajak daerah; pemberian dana stimulant; dan pemberian bantuan modal. Sedangkan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; penyediaan sarana dan prasarana; penyediaan lahan dan lokasi; pemberian bantuan teknis; dan percepatan pemberian izin.

Harapan dari stakeholder terkait peningkatan investasi per kapita di Kabupaten Bangkalan dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan dalam hal investasi di Kabupaten Bangkalan dengan target investasi tahun 2018 sebesar 650 M hingga 700 M. Menurut pendapat stakeholder, investasi sangat penting karena dapat mempercepat pertumbuhan daerah termasuk pertumbuhan pendapatan daerah. Selain itu investasi yang masuk mampu menciptakan *multiplier effect* seperti menciptakan tenaga kerja di daerah. Harapan lainnya adalah untuk meningkatkan upaya promosi yang dilakukan dalam menarik investor ke daerah, kemudahan perijinan atau dari segi kebijakan daerah/birokrasi, peningkatan akses tempat maupun lahan untuk membuka investasi di daerah, peningkatan anggaran sehingga dapat membuat FS (*Feasibility Study*) dimana sekarang masih sebatas Pre-FS saja, serta perluasan kesempatan investasi dari luar daerah. Selain itu juga stakeholder mengharapkan peningkatan wirausaha atau pelaku usaha, sehingga berdampak pada semakin banyaknya yang berinvestasi di Kabupaten Bangkalan yang pada akhirnya dapat membangun daerah tersebut.

## **D2. Firm Density**

Firm density di Kabupaten Bangkalan terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2018. Dengan peningkatan rata-rata per tahunnya adalah 2%. Berdasarkan pendapat stakeholder, kendala untuk meningkatkan firm density sendiri adalah dari birokrasi yaitu kemudahan berinvestasi yang rendah.

Firm density digunakan untuk melihat lingkungan usaha produktif pada suatu daerah (Bank Indonesia-LP3E FE Unpad, 2008). Tingginya industri-industri baru yang muncul pada suatu daerah menandakan aktivitas usaha yang tinggi pada daerah tersebut yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (conferenceboard.ca, 2019). Semakin mudah dan efisien perijinan industri untuk masuk ke suatu daerah, maka semakin cepat untuk berpotensi menciptakan lapangan kerja dan produktivitas dan diikuti dengan inovasi industri tersebut untuk mendukung sektor-sektor di daerah (OECD dalam Conferenceboard.ca, 2019). Dengan begitu, semakin tingginya perusahaan/industri baru berinvestasi di daerah, maka semakin cepat dalam mendukung peningkatan daya saing daerah tersebut. Berdasarkan laman conferenceboard.ca (2009) tersebut, untuk meningkatkan firm density dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, hingga badan pembangunan ekonomi regional. Hal tersebut dilakukan dengan membangun lingkungan bisnis yang kuat dan mendukung wirausaha-wirausaha baru agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menumbuhkan Industri-industri baru dapat melalui efisiensi perijinan dengan pengurangan waktu ketika mengurus perijinan, biaya, dan jumlah prosedur perijinan.

Harapan stakeholder terhadap peningkatan firm density di Kabupaten Bangkalan adalah agar investor dapat berinvestasi di Bangkalan, sehingga kemudahan perizinan termasuk lainnya yang dipengaruhi oleh birokrasi diharapkan dapat mendukung industri-industri yang akan berinvestasi di Bangkalan.

### **D3. Presentase Penduduk dengan Pendidikan Tinggi Universitas**

Presentase penduduk dengan pendidikan tinggi universitas di Kabupaten Bangkalan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2018. Peningkatan rata-rata per tahunnya adalah 1%. Penduduk dengan tamatan pendidikan tinggi universitas pada penelitian ini lebih membahas kaitannya dengan penciptaan lingkungan usaha produktif oleh masyarakat dalam rangka peningkatan

daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan pendapat stakeholder, penduduk dengan tamatan pendidikan tinggi universitas di Kabupaten Bangkalan cenderung masih berkualitas rendah sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada dan seringkali mengambil tenaga kerja dari daerah lain karena kualifikasi tenaga kerja lokal yang kurang.

Menurut Gardiner, Martin, Tyler (2004) untuk menarik minat dunia usaha agar melakukan investasi di daerah perlu didukung lingkungan usaha yang produktif yang berpengaruh terhadap daya saing daerah, dimana lingkungan usaha produktif oleh masyarakat dipengaruhi oleh diantaranya kondisi sosial masyarakat dan standar kehidupan masyarakat. Semakin tinggi standar kehidupan masyarakatnya maka kegiatan usaha di daerah tersebut juga semakin meningkat. Masyarakat suatu daerah berperan penting dalam hubungannya dengan kebutuhan investasi di suatu daerah. Pemerintah daerah perlu menjaring penduduk daerah tersebut agar memiliki kemampuan dan keterampilan yang tepat, sesuai dengan potensi lokal, pendekatan wilayah, dan tentunya kebutuhan investasi (Kurniawan, 2013). Dalam penjelasan Kurniawan, peran masyarakat dalam rangka penciptaan lingkungan yang kondusif perlu dipersiapkan agar masyarakat tidak hanya menjadi “penonton” ditengah hiruk pikuk masuknya investasi ke daerah. Menurutnya, bidang yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat adalah dalam bidang pendidikan. Pendidikan tinggi merupakan faktor pendorong efisiensi dalam peningkatan daya saing daerah (KADIN Indonesia, 2012). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakatnya, maka penciptaan lingkungan usaha produktif oleh masyarakat daerah tersebut juga semakin baik.

Harapan stakeholder dalam meningkatkan presentase penduduk tamatan pendidikan tinggi universitas yang kaitannya dengan lingkungan usaha produktif oleh masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah adalah, adanya bantuan-bantuan untuk bersekolah di perguruan tinggi seperti beasiswa agar memicu penduduk untuk sekolah lebih tinggi. Selain itu harapannya dengan penduduk tamatan pendidikan universitas tinggi, investor dapat

tertarik ke Kabupaten Bangkalan dan menginvestasikan uangnya sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan.

#### **D4. Tingkat Kepadatan Penduduk**

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Bangkalan termasuk kategori sangat padat dan terus mengalami peningkatan selama tahun 2014 hingga tahun 2018. Dengan rata-rata peningkatan per tahunnya adalah 0,31%. Menurut pendapat stakeholder, tingkat kepadatan penduduk di daerah berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan daerah tersebut. Oleh karenanya, pemerataan penduduk diperlukan dalam rangka pemerataan pembangunan daerah. Stakeholder juga menambahkan, padatnya penduduk di Kabupaten Bangkalan masih sentral karena dipengaruhi oleh sumber-sumber tertentu seperti sumber peluang kerja, sehingga diperlukan pemerataan sumber-sumber tersebut. Selain itu, berdasarkan pendapat stakeholder, investor cenderung mencari daerah yang padat penduduk untuk berinvestasi.

Penelitian ini lebih membahas tingkat kepadatan penduduk disuatu daerah yang berpengaruh terhadap penciptaan lingkungan usaha produktif yang kondusif oleh masyarakat. Dengan tujuan akhirnya adalah kaitannya dengan peningkatan investasi dalam peningkatan daya saing daerah. Kepadatan penduduk berperan penting pada daerah yang masih mengandalkan sektor pertanian maupun hasil alam lainnya, dimana dengan kepadatan penduduk dapat mengurangi pendapatan perkapita dari sektor tersebut, namun memicu perkembangan infrastruktur yang pada akhirnya mengarah pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Yegorov, 2015). Menurut Royesti (2009), padatnya penduduk di daerah merupakan faktor pendukung bagi kegiatan investasi di daerah tersebut, hal itu disebabkan karena padatnya penduduk mencerminkan pertambahan jumlah penduduk di suatu daerah, artinya dapat memperbesar jumlah tenaga kerja dan memperluas pasar produksi. Padatnya penduduk di daerah mampu memicu datangnya investor ke daerah, karena investor akan cenderung membangun usaha pada lokasi yang

strategis dan peluang pasar yang besar (Anonim, 2013). Namun kepadatan penduduk yang sangat tinggi dalam jangka panjang dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan investasi, karena dalam jangka panjang luas tanah yang dapat digunakan untuk kegiatan investasi akan semakin menyempit, sementara permintaan pasar terus meningkat, sehingga memicu bertambahnya pengangguran dan tingkat kemiskinan (Ricardo dalam Qoyimah dkk, 2014).

Harapan stakeholder terkait peningkatan kepadatan penduduk di Kabupaten Bangkalan adalah adanya pemerataan sumber-sumber potensial seperti peluang kerja. Sehingga, penduduk di daerah tersebut tidak berkonsentrasi pada satu titik saja.

## **E. Indikator Perbankan dan Lembaga Keuangan**

### **E1. Rasio Nilai Volume Usaha terhadap Koperasi Aktif**

Rasio volume usaha terhadap koperasi aktif di Kabupaten Bangkalan terus meningkat selama tahun 2014 hingga tahun 2018. Peningkatan rata-rata per tahunnya adalah 28%. Jenis koperasi yang ada di Kabupaten Bangkalan berjumlah 38 jenis, jumlah jenis tersebut termasuk koperasi aktif maupun tidak aktif. Walaupun mengalami peningkatan, namun berdasarkan informasi dari stakeholder, terdapat beberapa permasalahan terkait kelembagaan koperasi. Permasalahan tersebut adalah yang pertama, data koperasi aktif/tidak aktif dengan data real koperasi aktif/tidak aktif di lapangan berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh miskomunikasi definisi aktif itu sendiri. Menurut stakeholder sesuai dengan peraturan yang berlaku, koperasi dikatakan aktif adalah koperasi yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan), dimana RAT merupakan salah satu syarat koperasi dikatakan aktif. Kedua, masih tingginya koperasi yang tidak aktif. Ketiga, kurangnya pemahaman tentang regulasi manajemen koperasi maupun wawasan terkait perkoperasian. Hal ini juga berpengaruh terhadap data tumpang tindih jumlah koperasi aktif maupun tidak aktif.

Menurut stakeholder, minat penduduk di Kabupaten Bangkalan dalam kelembagaan koperasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu minat dari segi finansial dan minat dari segi pengetahuan. Selain itu,

menurutnya volume usaha koperasi menandakan secara langsung “kesehatan” koperasi itu sendiri. Semakin tinggi volume usaha koperasi, semakin menandakan koperasi itu “sehat”.

Menurut Gardiner, Martin, Tyler (2004), sistem keuangan oleh lembaga keuangan suatu daerah berpengaruh terhadap perekonomian daerah, dimana dapat mempengaruhi peningkatan daya saing daerah dengan prinsip menyediakan sistem keuangan yang baik dalam memfasilitasi aktivitas perekonomian daerah dan ketersediaan dana bagi dunia usaha yang digerakkan oleh sektor swasta. Lembaga keuangan yang ada salah satunya adalah koperasi. Koperasi sangat dibutuhkan masyarakat luas dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing (Widiartin dkk, 2016). Menurut Tohar (2001), koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat harus semakin dikembangkan dan diperkuat dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Semakin besar volume usaha koperasi, maka semakin besar kegiatan atau usaha yang dilakukan koperasi, dimana kegiatan atau usaha tersebut dapat memberikan manfaat untuk anggota koperasi maupun masyarakat pada umumnya (Sitio dkk, 2001). Wawasan tentang perkoperasian merupakan faktor penting yang berdampak pada kelangsungan usaha koperasi dalam jangka panjang (Yulianto, 2013). Dengan adanya pemahaman terkait wawasan perkoperasian, partisipasi anggota koperasi dalam manajemen koperasi akan lebih baik.

Harapan maupun saran stakeholder terhadap peningkatan rasio volume usaha terhadap koperasi aktif di Kabupaten Bangkalan adalah yang pertama, perlunya peningkatan pemahaman maupun wawasan tentang perkoperasian, hal tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan minat terhadap perkoperasian. Kedua, adanya kerja sama dengan pihak lain dalam mendata koperasi yang ada dibantu oleh perguruan tinggi setempat. Ketiga, harapan stakeholder adalah ingin menggerakkan kembali koperasi yang sudah tidak aktif.

## **E2. Nilai Tambah Sektor Keuangan per Kapita**

Nilai tambah sektor keuangan per kapita di Kabupaten Bangkalan terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga

tahun 2017. Peningkatan rata-rata per tahunnya sebesar 5%. Berdasarkan data BPS (2018), sub sektor yang berkontribusi terbesar terhadap sektor keuangan di Kabupaten Bangkalan selama rentang tahun tersebut adalah sub sektor jasa perantara. Jasa perantara keuangan merupakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional/syariah, baik bank pemerintah pusat dan daerah, bank swasta nasional, bank campuran asing, bank perkreditan rakyat, serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

Menurut stakeholder, permasalahan terkait nilai tambah sektor keuangan adalah faktor persyaratan yang masih selektif dan ketat untuk beberapa lembaga keuangan maupun perbankan dalam meminjamkan uangnya kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat masih belum optimal mengembangkan usahanya karena terkendala dari sisi finansial.

Menurut Gardiner, Martin, Tyler (2004) Sektor keuangan yang efisien dan terintegrasi secara nasional dapat mendukung daya saing daerah. Sektor keuangan yang berkembang memiliki peran penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Bank Dunia, 2001). Pada saat terjadi pertumbuhan perekonomian maka permintaan akan jasa keuangan ikut bertambah, semakin banyaknya jasa keuangan yang digunakan maka perkembangan sektor keuangan akan menjadi positif (Baroroh, 2012). Perkembangan sektor keuangan dapat melalui kenaikan penggunaan kredit sebagai alternatif pembiayaan baik dari segi volume maupun harga (Ingrid, 2006). Menurut CSIS yaitu Centre for Strategic and International Studies dan ERIA yaitu Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (2016), sektor keuangan yang kuat, efisien, dan menjangkau seluruh pihak menjadi syarat utama bagi pembangunan ekonomi yang sehat, sehingga diperlukan peningkatan persaingan dalam struktur pasar perbankan.

Harapan stakeholder terhadap peningkatan nilai tambah sektor keuangan per kapita di Kabupaten Bangkalan adalah salah satunya

adanya peningkatan pemahaman dalam sistem peminjaman uang untuk usaha khususnya koperasi. Selain itu, stakeholder juga berharap, peningkatan nilai tambah sektor keuangan per kapita mampu membangkitkan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) agar tumbuhnya pelaku-pelaku usaha baru.

#### **4.2.1.2. Indikator Ouput**

##### **A. PDRB per Kapita**

PDRB per kapita Kabupaten Bangkalan tahun 2014 hingga tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan rata-rata per tahunnya adalah 0,2%. Dengan data terakhir tahun 2017 yaitu 16.506,74 ribu rupiah per orang. Permasalahan terkait PDRB per kapita berdasarkan informasi dari stakeholder adalah penduduk Kabupaten Bangkalan yang cenderung masih menggantungkan pada sektor pertanian. Namun kegiatan dalam sektor tersebut cenderung stagnan, tidak terlalu signifikan.

PDRB per kapita merupakan indikator kesejahteraan penduduk dalam suatu daerah (Pratiwi dan Sutrisna dalam Zamharir, 2016). PDRB per kapita ADHK dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun untuk setiap sektornya dari rentang tahun satu ke tahun berikutnya sebagai gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun dalam suatu daerah (Prasasti, 2006). Tingginya PDRB per kapita dalam suatu daerah dipengaruhi dari nilai PDRB daerah tersebut dengan keterlibatan daerah dalam mengelola potensi daerahnya. Dimana potensi daerah dapat dimaknai sebagai sumber daya alam/buatan, maupun pembangunan serta sumber daya manusia yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat daerah, semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam suatu daerah pada potensi daerah tertentu maka semakin tinggi kontribusi potensi tersebut dalam pengembangan ekonomi setempat yang diindikasikan dengan PDRB yang terdiri dari berbagai sektor (Sumihardjo, 2008).

Harapan stakeholder terkait peningkatan PDRB per kapita di Kabupaten Bangkalan adalah adanya peningkatan dalam sumber

daya manusia, karena kunci peningkatan PDRB per kapita adalah pada sumber daya manusianya. Para stakeholder juga menambahkan bahwa, sektor utama di Kabupaten Bangkalan salah satunya adalah pertanian, oleh karena itu perlu peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pertanian misalnya petani untuk dapat meningkatkan sektor usahanya selain itu juga inovasi pada sektor tersebut yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan PDRB per kapita. Selain itu juga diharapkan adanya pembukaan UMKM atau sektor potensial lokal dan pengoptimalan pada sektor unggul maupun basis lainnya.

## **B. Produktivitas Tenaga Kerja**

Produktivitas tenaga kerja tahun 2014 hingga tahun 2017 di Kabupaten Bangkalan cenderung mengalami peningkatan, dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,2%. Pada tahun 2017, produktivitas tenaga kerja di kabupaten tersebut sebesar Rp. 38.219.216,1 per tenaga kerja.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari stakeholder, permasalahan yang sering ditemui adalah para calon tenaga kerja banyak yang belum siap untuk terjun ke dunia kerja maupun dunia usaha karena keterampilan dan kreativitas tenaga kerja yang kurang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dominan lulusan SMA/rumah tangga bagi yang ingin terjun ke dunia kerja seperti perusahaan-perusahaan yang ada dan dominan ibu rumah tangga bagi yang ingin terjun ke dunia usaha.

Produktivitas tenaga kerja secara sederhana adalah hubungan antara kualitas yang dihasilkan dengan jumlah kerja yang dilakukan untuk mencapai hasil itu (Syarif dalam Widodo, 2015). Produktivitas tenaga kerja merupakan bagaimana tenaga kerja dapat menghasilkan suatu produk, barang, maupun jasa dimana hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas tenaga kerja itu sendiri dan produktivitas tenaga kerja berperan penting dalam proses kegiatan produksi yang didukung dengan faktor sumber daya manusia (Baniaji, 2009). Produktivitas dapat digunakan untuk melihat pengembangan individu dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja. Sumber daya manusia merupakan alat dalam meningkatkan produktivitas (Griffin dalam

Baniaji, 2009). Adapun hal yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah motivasi dapat berupa gaji/upah, pegalaman, lingkungan kerja, kesempatan berprestasi; kedisiplinan; etos kerja; dan keterampilan (Tarwaka, 2004). Menurut Husnan (1999), produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu upah, pengalaman tenaga kerja, curahan waktu kerja (jumlah jam kerja yang digunakan keseluruhan dalam proses produksi). Menurut Soekemi, peningkatan produktivitas tenaga kerja sebagai suatu sistem tidak dapat ditingkatkan tanpa dukungan dari sub sistem lainnya seperti pendidikan, teknologi, iklim kerja, kesehatan, dan upah minimum (Satrio dalam Jumliati, 2016).

Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk meningkatkan produktivitas, kemampuan dan kesejahteraan tenaga kerja dibutuhkan pelatihan kerja yang diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja.

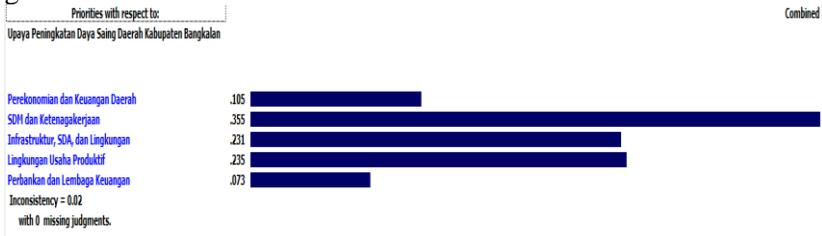
Harapan stakeholder terkait peningkatan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Bangkalan dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan kualitas tenaga kerja seperti adanya pelatihan tenaga kerja dan peningkatan jenjang pendidikan dari tenaga kerja tersebut sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang terampil, untuk dapat bersaing dalam perusahaan maupun industri yang ada.

#### **4.2.2. Menentukan Urutan Variabel Penanganan dalam Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan**

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Huda, M. & Santoso, E. B. yang menjadi dasar penelitian ini, terdapat 16 bidang atau variabel yang berkontribusi hampir sama terhadap daya saing daerah Kabupaten Bangkalan, namun antara variabel satu dengan lainnya ada yang lebih unggul. Sehingga diperlukan urutan penanganan dalam peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan alat analisis AHP. Dimana hasil urutan variabel penanganan dihasilkan berdasarkan tingkat kepentingan dalam analisis tersebut.

#### 4.2.2.1. Indikator Prioritas dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan

Indikator prioritas dalam pembahasan ini dihasilkan berdasarkan analisis prioritas antar indikator input dalam upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan hasil analisis, indikator Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketenagakerjaan memiliki tingkat kepentingan yang paling tinggi. Indikator lingkungan usaha produktif memiliki tingkat kepentingan paling tinggi kedua, untuk tingkat kepentingan paling tinggi ketiga adalah indikator infrakstruktur, SDA, dan Lingkungan, kemudian diikuti oleh indikator perekonomian dan keuangan daerah. Untuk tingkat kepentingan yang paling rendah yaitu indikator perbankan dan lembaga keuangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



**Gambar 4.17 Bobot Indikator Input**

*Sumber: Analisis penulis, 2019*

**Tabel 4.18 Tingkat Kepentingan Indikator Input dalam Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan**

No	Indikator
1	Perekonomian dan Keuangan Daerah
2	SDM (Sumber Daya Manusia) dan Ketenagakerjaan
3	Infrastruktur, SDA (Sumber Daya Alam), dan Lingkungan
4	Lingkungan Usaha Produktif
5	Perbankan dan Lembaga Keuangan

*Sumber: Analisis penulis, 2019*

#### 4.2.2.2. Urutan Variabel Penanganan dalam Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan

##### A. Urutan Variabel Penanganan Berdasarkan Indikator Input

Urutan variabel penanganan dalam pembahasan ini menghasilkan urutan variabel penanganan dalam setiap indikator input dan secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### Urutan Variabel Penanganan Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan dalam Indikator Perekonomian dan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis, urutan variabel penanganan dengan tingkat kepentingan tertinggi dalam indikator perekonomian dan keuangan daerah adalah variabel belanja pelayanan publik per kapita. Sedangkan variabel dengan tingkat kepentingan paling rendah adalah *government size*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



**Gambar 4.18 Bobot Variabel dalam Indikator Perekonomian dan Keuangan Daerah**

*Sumber: Analisis penulis, 2019*

**Tabel 4.19 Urutan Variabel Penanganan dalam Indikator Perekonomian dan Keuangan Daerah**

No	Variabel
1	Belanja Pelayanan Publik per Kapita
2	Kapasitas Fiskal Daerah

3	<i>Government Size</i>
---	------------------------

*Sumber: Analisis penulis, 2019*

### Urutan Variabel Penanganan Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan dalam Indikator SDM (Sumber Daya Manusia) dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil analisis, urutan variabel penanganan dengan tingkat kepentingan tertinggi adalah rata-rata lama sekolah, kemudian tingkat kepentingan tertinggi kedua adalah angka harapan hidup. Sedangkan variabel penanganan dengan tingkat kepentingan paling rendah adalah rasio ketergantungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



**Gambar 4.19 Bobot Variabel dalam Indikator SDM dan Ketenagakerjaan**

*Sumber: Analisis penulis, 2019*

**Tabel 4.19 Urutan Variabel Penanganan dalam Indikator Perekonomian dan Keuangan Daerah**

No	Variabel
1	Rata-Rata Lama Sekolah
2	Angka Harapan Hidup
3	Rasio Ketergantungan

*Sumber: Analisis penulis, 2019*

### Urutan Variabel Penanganan Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan dalam Indikator Infrastruktur, SDA (Sumber Daya Alam), dan Lingkungan

Berdasarkan hasil analisis, urutan variabel penanganan dalam indikator infrastruktur, SDA, dan lingkungan dengan tingkat

kepentingan tertinggi adalah kondisi jalan dengan kategori baik. Sedangkan variabel nilai tambah sektor pengangkutan per kapita merupakan variabel yang memiliki tingkat kepentingan terendah dalam indikator tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



**Gambar 4.20 Bobot Variabel dalam Indikator Infrastruktur, SDA, dan Lingkungan**

*Sumber: Analisis penulis, 2019*

**Tabel 4.21 Urutan Variabel Penanganan dalam Indikator Infrastruktur, SDA, dan Lingkungan**

No	Variabel
1	Kondisi Jalan dengan Kategori Baik
2	Nilai Tambah Sektor Pengangkutan per Kapita

*Sumber: Analisis penulis, 2019*

### **Urutan Variabel Penanganan Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan dalam Indikator Lingkungan Usaha Produktif**

Berdasarkan hasil analisis, urutan variabel penanganan dalam indikator lingkungan usaha produktif dengan tingkat kepentingan tertinggi adalah total investasi per kapita. Variabel dengan tingkat kepentingan kedua dan ketiga secara berurutan adalah *firm density*, presentase penduduk dengan pendidikan tinggi universitas. Sedangkan variabel dengan tingkat kepentingan paling rendah adalah tingkat kepadatan penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



**Gambar 4.21 Bobot Variabel dalam Indikator Lingkungan Usaha Produktif**

*Sumber: Analisis penulis, 2019*

**Tabel 4.22 Urutan Variabel Penanganan dalam Indikator Lingkungan Usaha Produktif**

No	Variabel
1	Total Investasi per Kapita
2	<i>Firm Density</i>
3	Presentase Penduduk dengan Pendidikan Tertinggi Universitas
4	Tingkat Kepadatan Penduduk

*Sumber: Analisis penulis, 2019*

### **Urutan Variabel Penanganan Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan dalam Indikator Perbankan dan Lembaga Keuangan**

Berdasarkan hasil analisis, urutan variabel penanganan dalam indikator perbankan dan lembaga keuangan dengan tingkat kepentingan tertinggi adalah rasio nilai volume usaha terhadap koperasi aktif, sedangkan variabel nilai tambah sektor keuangan per kapita merupakan variabel dengan tingkat kepentingan terendah dalam penanganan peningkatan daya saing daerah Bangkalan. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



**Gambar 4.22 Bobot Variabel dalam Indikator Perbankan dan Lembaga Keuangan**

*Sumber: Analisis penulis, 2019*

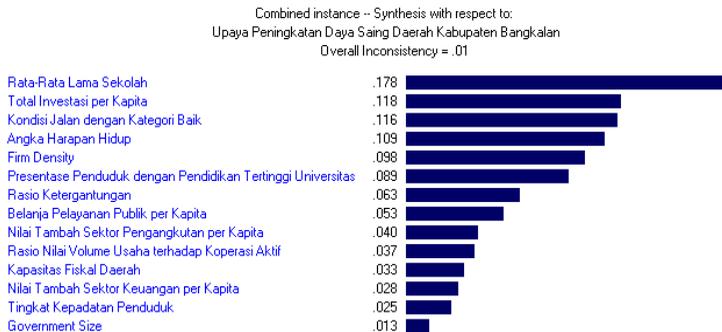
**Tabel 4.23 Urutan Variabel Penanganan dalam Indikator Perbankan dan Lembaga Keuangan**

No	Variabel
1	Rasio Nilai Volume Usaha terhadap Koperasi Aktif
2	Nilai Tambah Sektor Keuangan per Kapita

*Sumber: Analisis penulis, 2019*

### **Urutan Variabel Penanganan Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan Secara Keseluruhan dalam Indikator Input**

Berdasarkan hasil analisis, variabel penanganan dalam peningkatan daya saing daerah Bangkalan secara keseluruhan dalam indikator input untuk urutan pertama berdasarkan hasil analisis adalah rata-rata lama sekolah. Sedangkan variabel dengan tingkat kepentingan paling rendah adalah *government size*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



**Gambar 4.23 Bobot Variabel Secara Keseluruhan dalam Indikator Input**

*Sumber: Analisis penulis, 2019*

**Tabel 4. 24 Urutan Penanganan Variabel Indikator Input dalam Peningkatan Daya Saing Kabupaten Bangkalan**

No	Variabel
1	Rata-Rata Lama Sekolah
2	Total Investasi per Kapita
3	Kondisi Jalan dengan Kategori Baik
4	Angka Harapan Hidup
5	<i>Firm Density</i>
6	Presentase Penduduk dengan Pendidikan Tinggi Universitas
7	Rasio Ketergantungan
8	Belanja Pelayanan Publik per Kapita
9	Nilai Tambah Sektor Pengangkutan per Kapita
10	Rasio Nilai Volume Usaha terhadap Koperasi Aktif
11	Kapasitas Fiskal Daerah
12	Nilai Tambah Sektor Keuangan per Kapita
13	Tingkat Kepadatan Penduduk
14	<i>Government Size</i>

*Sumber: Analisis penulis, 2019*

## B. Urutan Variabel Penanganan dalam Indikator Output

Untuk urutan variabel penanganan pertama yang termasuk indikator output adalah produktivitas tenaga kerja karena berdasarkan hasil analisis termasuk variabel dengan tingkat kepentingan tertinggi. Sedangkan variabel yang memiliki tingkat kepentingan paling rendah adalah PDRB per kapita. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



**Gambar 4.24 Bobot Variabel dalam Indikator Output**

*Sumber: Analisis penulis, 2019*

**Tabel 4.205 Urutan Penanganan Variabel Indikator Output dalam Peningkatan Daya Saing Kabupaten Bangkalan**

No	Variabel
1	Produktivitas Tenaga Kerja
2	PDRB per Kapita

*Sumber: Analisis penulis, 2019*

Bobot yang dihasilkan dalam analisis menggunakan AHP diatas mencerminkan urutan penanganan variabel untuk meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Hasil tersebut digunakan dalam perumusan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan yang akan dibahas pada sub bab selanjutnya, dimana tidak mungkin jika dilakukan bersama sekaligus sehingga apabila ingin dilaksanakan harus ada prioritas/urutan dalam penanganan peningkatan daya saing.

### 4.2.3. Merumuskan Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu oleh Huda, M. dan Santoso, E. B. (2014), terdapat 16 variabel yang menyebabkan

lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Variabel-variabel tersebut dibandingkan antara data tahun 2014 yaitu data penelitian tersebut dengan data tahun 2018 (data tahun terbaru), dengan asumsi menggunakan angka standar daya saing yang digunakan pada tahun 2014 sebagai data basis, perhitungan rinci dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Perbandingan data tahun 2014 dengan data tahun 2018 untuk mengetahui perkembangan variabel pada tahun 2018 namun menggunakan standar data 2014 sebagai data basis. Dimana pada tahun 2014 berdasarkan penelitian terdahulu oleh Huda, M. & Santoso, E. B. (2014), penelitian tersebut menghasilkan untuk Kabupaten Bangkalan, terdapat 16 bidang atau variabel yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah kabupaten tersebut. Variabel-variabel tersebut selama tahun 2014 hingga 2018 telah mengalami perkembangan, walaupun begitu masih terdapat variabel yang termasuk kelompok kelemahan pada data 2018. Variabel yang telah termasuk dalam kelompok keunggulan tahun 2018 antara lain belanja pelayanan publik per kapita dan *firm density*.

Variabel yang telah termasuk kelompok rata-rata tahun 2018 antara lain kapasitas fiskal daerah; *government size*: angka harapan hidup; kondisi jalan menurut kualitas jalan; tingkat kepadatan penduduk; produktivitas tenaga kerja; dan PDRB per kapita.

Sedangkan variabel yang masih termasuk kelompok kelemahan tahun 2018 antara lain rasio ketergantungan; rata-rata lama sekolah; nilai tambah sektor pengangkutan per kapita; total investasi per kapita; presentase penduduk dengan pendidikan tinggi universitas; rasio volume usaha terhadap koperasi aktif; dan nilai tambah sektor keuangan per kapita.

Dalam perumusan upaya peningkatan daya saing daerah terbagi dalam perumusan upaya setiap variabel yang termasuk dalam indikator input dan perumusan upaya setiap variabel yang termasuk dalam indikator output. Upaya-upaya yang dirumuskan yaitu berdasarkan variabel-variabel yang memiliki posisi variabel kelompok rata-rata dan kelompok kelemahan berdasarkan tahun 2018 sesuai dengan penjelasan diatas. Dalam merumuskan upaya

peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan, dilakukan pada variabel setiap hasil komparatif diatas yang termasuk kelompok rata-rata dan kelemahan, dengan rumusan upaya berdasarkan hasil dari sasaran 1 yaitu karakteristik variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan dan hasil sasaran 2 yaitu urutan variabel dalam menangani peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Rumusan upaya peningkatan daya saing daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

*“Halaman sengaja dikosongkan”*

Tabel 4.21 Rumusan Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan

No	Variabel	Fakta	Teori	Harapan Stakeholder	Upaya
<b>Indikator Input</b>					
1	Rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan rata-rata per tahun 0,5% dari tahun 2014 hingga tahun 2017.	Pendidikan mampu menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja (Simanjuntak dalam Ernawati, 2013).	Diperlukan adanya peningkatan jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan untuk semua kalangan masyarakat termasuk peningkatan kualitas hasil pendidikan, tenaga pendidik	Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bangkalan hingga mencapai paling tidak 12 tahun
		Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bangkalan adalah lulusan kelas 5 SD. Hal tersebut menunjukkan angka putus sekolah yang tinggi			Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi diiringi dengan pengoptimalan program pengurangan pekerja anak
		Sarana dan prasarana pendidikan yang belum optimal	Sarana dan prasarana fasilitas pendidikan yang dimiliki merupakan faktor pendukung terlaksananya program sekolah (Novita, 2017).	Dalam meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk, perlu adanya peningkatan fasilitas pendidikan disertai dengan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dibutuhkan bagi seluruh masyarakat	Pengembangan perluasan dan pemerataan fasilitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan, baik formal maupun non formal
		Kurangnya pengetahuan relevansi pendidikan dengan dunia kerja oleh karena itu pola pikir terkait pentingnya pendidikan masih kurang	Relevansi pendidikan dan dunia kerja yaitu bagaimana menyediakan kualitas lulusan yang ada sesuai dengan permintaan dunia usaha sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (Sukarman, 2005).	Relevansi pendidikan dengan dunia kerja dapat dilakukan melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang ada misalnya sistem pendidikannya	Peningkatan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi dengan mengedepankan “ <i>link and match</i> ”
		Biaya pendidikan tinggi	Penyelenggaraan pendidikan dasar wajib dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan yang dialokasikan dalam APBD sebagai pelaksanaan wajib belajar 9 tahun (Perda Bangkalan no 6 tahun 2015)	Faktor ekonomi berpengaruh terhadap lama sekolah penduduk, sehingga perlu ditekankan bahwa pendidikan sekarang telah dibiayai oleh pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun	Pengoptimalan biaya pendidikan untuk wajib belajar 9 tahun bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin oleh pemerintah

No	Variabel	Fakta	Teori	Harapan Stakeholder	Upaya
2	Total investasi per kapita	Selama tahun 2016 hingga 2018, investasi per kapita mengalami peningkatan rata-rata per tahun 38%. Dengan total investasi yang masuk pada tahun 2018 sebesar sekitar 309 M. Pemerintah telah menyiapkan dokumen untuk bidang investasi namun masih pre-FS, sehingga kesiapan pemerintah daerah terkait birokrasi kurang	Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah kegiatan investasi berperan penting, faktor yang berpengaruh terhadap minat investasi pada suatu daerah antara lain ketersediaan dan kualitas infrastruktur; kondisi ekonomi makro; lingkungan hukum; kelembagaan (Hanim, 2010). Faktor tanah dan kekayaan alam termasuk pengelolaannya berpengaruh pada peningkatan investasi di suatu daerah (Sefle, 2014).	Investasi sangat cepat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dapat dilakukan melalui peningkatan lingkungan usaha produktif ditandai dengan tumbuhnya pelaku usaha baru, sehingga berdampak pada semakin banyaknya yang berinvestasi di Kabupaten Bangkalan, sekaligus perlu adanya kesiapan lebih dari pemerintah daerah. Target investasi masuk ke Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2018 harusnya 650 M hingga 700 M	Peningkatan investasi daerah hingga minimal 700 M melalui pengoptimalan kesiapan daerah dari segi peraturan daerah/ birokrasi daerah terkait dengan investasi, peningkatan upaya-upaya promosi secara <i>online/offline</i> , dan kemampuan sumber daya manusia dalam menyerap inovasi teknologi untuk memicu pelaku usaha baru serta penggalan potensi SDA
		Kemudahan perizinan investasi belum optimal	Kemudahan investasi dapat dilakukan melalui pemberian insentif maupun percepatan dalam pemberian izin investasi (PP no 45 tahun 2008)	Kemudahan perizinan dapat ditingkatkan sehingga dapat memperluas kesempatan investasi dari luar daerah.	Peningkatan kemudahan perizinan investasi bagi para pelaku usaha (investor) oleh pemerintah
3	Kondisi jalan dengan kategori baik	Mengalami peningkatan rata-rata per tahunnya adalah sebesar 0,7%, namun masih sekitar 43% untuk jalan dengan kategori baik dari total seluruh panjang jalan, juga terdapat kualitas jalan pada beberapa titik yang belum memadai (jalan antar kecamatan dan jalan desa)	Menurut Sembayang (2011), dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi hal yang paling cukup penting adalah ketersediaan infrastruktur jalan, terutama penambahan panjang jalan sebagai mode transportasi. Dengan mode transportasi yang baik, aktivitas perekonomian daerah ikut berjalan dengan baik pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan berpengaruh pada peningkatan daya saing daerah.	Peningkatan ketersediaan infrastruktur salah satunya jalan yang baik dapat berpengaruh terhadap masuknya investasi di suatu daerah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi peningkatan daya saing daerah. Dimana panjang jalan yang berkualitas baik perlu ditingkatkan, minimal dipertahankan kondisinya dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah. Panjang jalan baik harusnya untuk tahun 2018 sekitar 82% hingga 85%.	Menambah minimal mempertahankan panjang jalan berkualitas baik hingga minimal 85% melalui pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jaringan jalan, jembatan, serta prasarana transportasi lainnya
		Jalan-jalan yang menghubungkan dengan lokasi-lokasi strategis seperti pelabuhan di Kabupaten Bangkalan belum memadai			Pengoptimalan ketersediaan jalan yang terhubung dengan lokasi-lokasi strategis seperti pelabuhan, terminal, maupun pasar-pasar potensial yang dapat memicu aktivitas perekonomian daerah
4	Angka harapan hidup	Angka harapan hidup di Kabupaten Bangkalan berkisar antara 69-70 tahun.	Angka harapan hidup adalah salah satu komponen dalam pembangunan manusia da- lam	Mengoptimalkan pembangunan manusia melalui pelayanan kesehatan bagi seluruh kalangan masyarakat	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan

No	Variabel	Fakta	Teori	Harapan Stakeholder	Upaya
		Peningkatan rata-rata pertahunnya selama tahun 2014 hingga 2017 sebesar 0,1%. Telah dilengkapi oleh fasilitas seperti fasilitas rumah sakit daerah maupun swasta, puskesmas, hingga posyandu yang diperlukan untuk melayani masyarakat	bidang kesehatan (Kahar, 2018). Angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh salah satunya pelayanan kesehatan (Ardianti, 2015).	perluinya lebih diperhatikan pada pelayanan kesehatan bekerja sama dengan swasta untuk masyarakat miskin yang gratis agar dapat ditingkatkan setiap tahunnya	akses/kemudahan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas oleh pemerintah dan swasta
		Pemerataan fasilitas kesehatan yang kurang optimal	Pemerataan fasilitas pendidikan dibutuhkan agar setiap masyarakat memperoleh pelayanan dengan standar mutu yang telah ditetapkan (Yandrizal dkk, 2016).	Pemerataan dan peningkatan fasilitas kesehatan termasuk dalam upaya peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Bangkalan	Pemerataan fasilitas kesehatan dari sisi kuantitas dan kualitas hingga tenaga kerja kesehatan di seluruh Kabupaten Bangkalan
5	Penduduk dengan pendidikan tinggi universitas	Cenderung meningkat selama tahun 2014 hingga tahun 2018, dengan peningkatan rata-rata per tahun 1%	Peran masyarakat dalam rangka penciptaan lingkungan yang kondusif perlu diper siapkan salah satunya bidang pendidikan tinggi tersebut termasuk didalamnya kualifikasi dari tamatan pendidikan tinggi, dimana merupakan faktor pendorong efisiensi dalam peningkatan daya saing daerah (KADIN Indonesia, 2012).	Dalam peningkatannya memang kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Untuk meningkat kan penduduk dengan pendidikan tinggi universitas dalam rangka peningkatan daya saing daerah diperlukan bantuan-bantuan untuk bersekolah di perguruan tinggi. Dapat dilakukan melalui pembentukan forum koordinasi konsultasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas penduduk dengan tamatan pendidikan tinggi agar sesuai kebutuhan lapangan kerja.	Peningkatan penduduk dengan pendidikan tinggi universitas paling tidak, lebih dari 5% melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan tinggi oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak swasta/lainnya
		Penduduk dengan pendidikan tinggi universitas di Kabupaten Bangkalan cenderung berkualitas rendah sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada			Penyediaan pelatihan-pelatihan kerja bagi masyarakat dengan tamatan pendidikan tinggi universitas oleh pemerintah bekerja sama dengan swasta agar sesuai dengan kebutuhan kualifikasi pekerja di lapangan
6	Rasio ketergantungan	Angka ketergantungan masih tinggi, sekitar diatas 50%, namun mengalami penurunan selama tahun 2014 hingga 2017, dengan penurunan rata-rata per tahun sebesar 1%	Rasio ketergantungan digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan suatu daerah tergolong daerah maju atau berkembang (Sari, 2016). Semakin tinggi angka rasio ketergantungan suatu daerah, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung	Diperlukan peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan keterampilan bagi penduduk yang berusia menjelang masa-masa tidak produktif untuk bekal kedepannya, serta peningkatan keterampilan bagi penduduk usia produktif untuk mengoptimalkan perannya serta meningkatkan kualitas	Penurunan angka ketergantungan hingga dibawah angka 50% melalui pengoptimalan program keluarga berencana oleh pemerintah
		Penduduk yang telah bekerja dibandingkan dengan penduduk usia produktif			Peningkatan keterampilan penduduk melalui penyediaan Balai Latihan Kerja dan peningkatan kesempatan

No	Variabel	Fakta	Teori	Harapan Stakeholder	Upaya
		mengalami peningkatan, penduduk usia produktif yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga cenderung memiliki kemauan tinggi untuk membuka wirausaha baru, terutama keluarga miskin.	oleh penduduk berusia produktif untuk membiayai hidup penduduk berusia non produktif. Tingginya rasio ketergantungan akan meningkatkan kemiskinan (Knowles dalam Marmujiono, 2014).	sumber daya manusia. Perlu juga dilakukan pemantapan program keluarga berencana melalui kemandirian berusaha	kerja oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta/lainnya
7	Nilai tambah sektor pengangkutan per kapita	Mengalami peningkatan rata-rata per tahun 5% (2014-2017), nilai tambah sektor pengangkutan di Kabupaten Bangkalan berasal dari penyediaan angkutan yaitu angkutan darat, sungai/danau, serta jasa penunjang angkutan seperti terminal dan pelabuhan. Jasa angkutan darat mulai berkembang dengan sistem <i>online</i>	Jasa transportasi sebagai sarana pengangkutan dapat menunjang perekonomian daerah melalui kontribusinya dalam PDRB yang perlu disediakan secara cukup, murah, dan merata (Setiawan dkk, 2017)	Dalam meningkatkan nilai tambah sektor pengangkutan per kapita perlu adanya peningkatan aksesibilitas dahulu terutama daerah perdesaan agar penyediaan angkutan dapat lebih optimal	Meningkatkan nilai tambah sektor pengangkutan per kapita minimal 5% per tahun melalui peningkatan penyediaan jasa angkutan serta jasa penunjang angkutan dengan biaya terjangkau di seluruh wilayah
		Penyediaan jasa angkutan di daerah perdesaan masih kurang			Pemerataan penyediaan jasa angkutan umum dan aksesibilitas di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan terutama daerah perdesaan tertinggal
8	Rasio volume usaha terhadap koperasi aktif	Terdapat perbedaan data dan kondisi lapangan terkait koperasi aktif/tidak aktif	Menurut Tohar (2001), koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat harus semakin dikembangkan dan diperkuat dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi.	Perlunya kerja sama dengan pihak lain dalam mendata koperasi yang ada dibantu oleh perguruan tinggi setempat.	Melakukan kerja sama antara pemerintah dengan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) perguruan tinggi terkait untuk pendataan ulang koperasi aktif dan tidak aktif
		Mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 28%, namun masih tingginya koperasi tidak aktif	Semakin besar volume usaha koperasi aktif, maka semakin besar kegiatan atau usaha yang dilakukan koperasi, sehingga memberikan manfaat untuk anggota koperasi maupun masyarakat pada umumnya (Sitio dkk, 2001).		Koperasi-koperasi yang tidak aktif harapannya dapat digerakkan kembali sehingga adanya reaktivasi peran koperasi yang sejalan dengan pengembangan dunia usaha
		Pemahaman terkait	Wawasan tentang	Perlunya peningkatan pemahaman	Peningkatan wawasan perkoperasian

No	Variabel	Fakta	Teori	Harapan Stakeholder	Upaya
		manajemen koperasi dan wawasan perkoperasian yang kurang	perkoperasian merupakan faktor penting yang berdampak pada kelangsungan usaha koperasi dalam jangka panjang (Yulianto, 2013).	maupun wawasan tentang perkoperasian, hal tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan minat terhadap perkoperasian	kepada masyarakat termasuk anggota koperasi oleh pemerintah dan lembaga koperasi terkait termasuk bantuan dalam pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan)
9	Kapasitas fiskal daerah	Mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2018 dengan peningkatan rata-rata per tahun 14%	Rendahnya kapasitas fiskal daerah dikarenakan lambatnya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi (Sriyana, 2009).	Untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah perlu adanya pengoptimalan PAD (Pendapatan Asli Daerah) diikuti pengelolaan yang optimal pada sektor-sektor unggulan. Selain itu peningkatan PAD dapat dilakukan melalui intensifikasi. Harapannya dengan begitu ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat rendah	Mempertahankan pertambahan rata-rata fiskal daerah sebesar 14% pertahun
		Pendapatan sektor pajak dan retribusi belum optimal	Untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tidak hanya berasal dari peningkatan PAD saja, namun juga peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah (Kurniasih, 2011).		Pengoptimalan dan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah/ sumber penerimaan daerah lainnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yaitu pengelolaan sektor-sektor unggulan
		Identifikasi objek pajak lemah			Mengoptimalkan pelaksanaan identifikasi objek pajak diiringi dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait ketentuan pajak daerah oleh pemerintah
		Ketergantungan keuangan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang masih tinggi	Dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah tidak hanya pada nominal saja, melainkan juga pada pengelolaan agar terjadi optimalisasi anggaran (Kurniasih, 2011).		Peningkatan optimalisasi anggaran penerimaan asli daerah oleh pemerintah
10	Nilai tambah sektor keuangan per kapita	Mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2017, dengan peningkatan rata-rata per tahun 5%.	Pada saat terjadi pertumbuhan perekonomian maka permintaan akan jasa keuangan ikut bertambah, semakin banyaknya jasa keuangan yang digunakan maka perkembangan sektor keuangan akan menjadi positif (Baroroh, 2012).	Perlu adanya pengoptimalan lembaga keuangan untuk meningkatkan nilai tambah sektor keuangan per kapita.	Meningkatkan peran lembaga keuangan melalui peningkatan nilai tambah sektor keuangan per kapita hingga 16%
		Faktor persyaratan yang ketat dan selektif dalam peminjaman uang oleh lembaga keuangan	Menurut CSIS yaitu <i>Centre for Strategic and International Studies</i> dan ERIA yaitu <i>Economic Research Institute for ASEAN and East Asia</i> (2016),		Diperlukan peningkatan pemahaman dalam sistem peminjaman uang untuk usaha. Meningkatkan UKM (Unit Kecil dan Menengah) agar tumbuhnya pelaku usaha baru dapat

No	Variabel	Fakta	Teori	Harapan Stakeholder	Upaya
			kegiatan keuangan yang kuat, efisien, dan menjangkau seluruh pihak menjadi syarat utama bagi pembangunan ekonomi yang sehat	meningkatkan nilai tambah sektor keuangan per kapita.	
11	Tingkat kepadatan penduduk	<p>Termasuk kategori sangat padat, terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2018 dengan rata-rata per tahun 0,31%</p> <p>Kepadatan penduduk di daerah cenderung masih sentral</p>	Padatnya penduduk di daerah mampu memicu datangnya investor ke daerah, karena investor akan cenderung membangun usaha pada lokasi yang strategis dan peluang pasar yang besar (Anonim, 2013). Namun kepadatan penduduk yang tidak dikelola oleh pemerintah dengan baik mampu berpengaruh negatif dalam jangka panjang terhadap investasi, karena lahan akan semakin menyempit untuk peluang investasi sedangkan permintaan pasar terus meningkat sehingga memicu pengangguran dan kemiskinan (Ricardo dalam Qoyimah dkk, 2014).	Diperlukan pengendalian jumlah penduduk dan pemerataan penduduk dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan investasi daerah. Dapat dilakukan melalui misalnya pemerataan sumber-sumber potensial seperti peluang kerja. Padatnya penduduk merupakan peluang bagi daerah untuk menarik investor agar berinvestasi ke daerah.	<p>Mengendalikan jumlah penduduk untuk meningkatkan investasi daerah diiringi dengan mendorong masuknya investasi-investasi industri padat karya ke daerah dengan mempermudah perizinan</p> <p>Pemerataan sumber-sumber aktivitas perekonomian masyarakat (pasar, <i>mall</i>, tempat wisata, dan sejenisnya) maupun pemerataan peluang kerja lainnya di seluruh wilayah</p>
12	<i>Government size</i>	<p>Mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga 2017, dengan penurunan rata-rata per tahun 5%</p> <p>Belum ada efisiensi terhadap anggaran pengeluaran pemerintah yang berpengaruh pada <i>government size</i></p>	Berdasarkan Bank Indonesia dan LP3E FE-UNPAD (2008), perekonomian dan keuangan daerah merupakan ukuran kinerja secara umum perekonomian daerah dimana kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi suatu daerah. <i>Government size</i> atau ukuran pemerintahan (konteks dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah) mempengaruhi kinerja pemerintah daerah (Hutapea	<p>Pengeluaran pemerintah daerah perlu diimbangi dengan pendapatan dari sektor-sektor yang ada yaitu ditandai dengan peningkatan PDRB.</p> <p>Diperlukan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik yang maksimal dan efisien dengan mengimplementasikan strategi <i>pro growth, pro poor</i>, di Bangkalan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat</p>	<p>Mengoptimalkan kinerja bidang keuangan daerah terkait pengeluaran pemerintah dan PDRB melalui peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan sektor-sektor potensial/sektor basis yang optimal</p> <p>Mengoptimalkan kinerja SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) terkait dengan menganggarkan pengeluaran belanja daerah yang efisien dan tepat sasaran</p>

No	Variabel	Fakta	Teori	Harapan Stakeholder	Upaya
			dkk, 2017).		
1	Produktivitas tenaga kerja	<p>Produktivitas tenaga kerja mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2017, dengan peningkatan rata-rata per tahun 0,2%</p> <p>Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Bangkalan rendah karena kurangnya keterampilan dan kreativitas calon tenaga kerja, selain itu adanya perbedaan motivasi tenaga kerja dalam mencari kerja antara lulusan SMA/ perguruan tinggi dengan ibu rumah tangga</p>	<p>Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh kualitas tenaga kerja itu sendiri yang didukung faktor sumber daya manusia (Baniaji, 2009). Menurut Soekemi, peningkatan produktivitas tenaga kerja sebagai suatu sistem tidak dapat ditingkatkan tanpa dukungan dari sub sistem lainnya seperti pendidikan, teknologi, iklim kerja, kesehatan, dan upah minimum (Satrio dalam Jumliati, 2016).</p>	<p>Untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil, dapat bersaing dalam industri yang ada diperlukan peningkatan kualitas tenaga kerja. Sehingga perlu meningkatkan dan mempertahankan peningkatan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Bangkalan</p>	<p>Meningkatkan dan mempertahankan peningkatan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Bangkalan</p> <p>Meningkatkan keterampilan dan kreativitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan keahlian kerja melalui pelatihan-pelatihan tenaga kerja bagi para lulusan pendidikan tinggi maupun pelaku usaha baru oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta</p>
2	PDRB per kapita	<p>Mengalami peningkatan selama tahun 2014 hingga 2017 dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,2%</p> <p>Penduduk cenderung bergantung pada sektor pertanian, namun sektor tersebut stagnan, pertumbuhannya tidak terlalu signifikan</p>	<p>PDRB daerah tersebut dengan keterlibatan daerah dalam mengelola potensi daerahnya. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam suatu daerah pada potensi daerah tertentu maka semakin tinggi kontribusi potensi tersebut dalam pengembangan ekonomi setempat yang diindikasikan dengan PDRB yang terdiri dari berbagai sektor (Sumihardjo, 2008).</p>	<p>Perlu adanya pengoptimalan pada sektor-sektor basis., selain itu perlu adanya pembukaan UMKM sektor potensial lokal.</p> <p>Sektor utama di Kabupaten Bangkalan salah satunya adalah pertanian, oleh karena itu perlu peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pertanian. Selain itu juga inovasi pada sektor tersebut yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan PDRB per kapita.</p>	<p>Meningkatkan dan mempertahankan peningkatan PDRB per kapita melalui pengoptimalan sektor unggulan dan basis, pemetaan potensi daerah untuk setiap desa, dan menumbuhkembangkan UMKM berbasis potensi lokal dan sektor-sektor unggulan</p> <p>Melakukan pemberdayaan petani melalui pelatihan keterampilan bertani dan memberikan bantuan bidang pertanian kepada kelompok petani</p>

Sumber:

Analisis

penulis,

2019

*(Halaman sengaja dikosongkan)*

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu oleh Huda, M. & Santoso, E. B. (2014) yang sebagai dasar penelitian dihasilkan bidang-bidang atau variabel-variabel yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan yang terbagi dalam indikator input dan indikator output. Variabel yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan variabel input antara lain kapasitas fiskal daerah; *government size*; belanja pelayanan publik per kapita; rasio ketergantungan; rata-rata lama sekolah; angka harapan hidup; nilai tambah sektor pengangkutan per kapita; kondisi jalan dengan kategori baik; total investasi per kapita; *firm density*; presentase penduduk dengan pendidikan tinggi universitas; tingkat kepadatan penduduk; rasio nilai volume usaha terhadap koperasi aktif; dan nilai tambah sektor keuangan per kapita. Sedangkan variabel yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan indikator output adalah PDRB per kapita dan produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan dasar penelitian tersebut, penelitian ini melanjutkan untuk merumuskan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Karakteristik variabel-variabel yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan ditinjau berdasarkan kondisi eksisting, teori, dan harapan *stakeholder* beserta kebijakan didalamnya Karakteristik variabel tersebut menjadi potensi dan masalah yang berpengaruh terhadap peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Dimana variabel-variabel tersebut telah mengalami perkembangan dari tahun 2014 (tahun dasar penelitian) hingga tahun 2018.
2. Urutan variabel penanganan dalam peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan didasarkan pada hasil analisis

menggunakan AHP. Dimana penanganan dalam peningkatan daya saing daerah tersebut tidak mungkin jika dilakukan bersama sekaligus sehingga apabila ingin dilaksanakan harus terdapat prioritas atau urutan dalam penanganan peningkatan daya saing. Adapun urutan variabel penanganannya adalah sebagai berikut:

**Indikator Input**

1. Rata-Rata Lama Sekolah
2. Total Investasi per Kapita
3. Kondisi Jalan dengan Kategori Baik
4. Angka Harapan Hidup
5. *Firm Density*
6. Presentase Penduduk dengan Pendidikan Tinggi Universitas
7. Rasio Ketergantungan
8. Belanja Pelayanan Publik per Kapita
9. Nilai Tambah Sektor Pengangkutan per Kapita
10. Rasio Nilai Volume Usaha terhadap Koperasi Aktif
11. Kapasitas Fiskal Daerah
12. Nilai Tambah Sektor Keuangan per Kapita
13. Tingkat Kepadatan Penduduk
14. *Government Size*

**Indikator Output**

1. Produktivitas Tenaga Kerja
  2. PDRB per Kapita
3. Berdasarkan perbandingan antara data tahun 2014 yaitu tahun data basis berdasarkan penelitian Huda, M. dan Santoso, E. B. terdapat 16 variabel yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Kondisi variabel pada data tahun basis dibandingkan dengan kondisi eksisting yaitu tahun 2018, dengan asumsi menggunakan

standar data yang digunakan berdasarkan penelitian basis, ternyata telah terdapat variabel yang termasuk kelompok keunggulan dan rata-rata pada data tahun 2018. Variabel yang telah termasuk dalam kelompok keunggulan tahun 2018 antara lain belanja pelayanan publik per kapita dan *firm density*. Variabel yang telah termasuk kelompok rata-rata tahun 2018 antara lain kapasitas fiskal daerah; *government size*: angka harapan hidup; kondisi jalan menurut kualitas jalan; tingkat kepadatan penduduk; produktivitas tenaga kerja; dan PDRB per kapita. Sedangkan variabel yang masih termasuk kelompok kelemahan tahun 2018 antara lain rasio ketergantungan; rata-rata lama sekolah; nilai tambah sektor pengangkutan per kapita; total investasi per kapita; presentase penduduk dengan pendidikan tinggi universitas; rasio volume usaha terhadap koperasi aktif; dan nilai tambah sektor keuangan per kapita.

Upaya peningkatan daya saing daerah yang dilakukan berdasarkan variabel lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan berupa peningkatan kinerja variabel bagi variabel-variabel yang masih termasuk kelompok kelemahan dan rata-rata. Untuk lebih detailnya terkait upaya-upaya yang dilakukan pada setiap variabel yang termasuk kelompok kelemahan dan rata-rata pada tahun 2018 dapat dilihat pada **tabel 4.21**.

## 5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka saran yang diusulkan diantaranya:

1. Hasil variabel prioritas dan upaya-upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dalam mengambil kebijakan terkait arahan peningkatan daya saing daerahnya.
2. Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya namun tetap

terbuka dengan persaingan domestik maupun internasional direfleksikan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Daya saing daerah yang kuat tentu didukung oleh seluruh wilayah beserta kegiatan ekonomi yang ada didalamnya. Oleh karena itu, dapat dilakukan penelitian lanjutan yaitu pengukuran daya saing kecamatan di Kabupaten Bangkalan.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, P. (2002). *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Ambardi, U. M., & Socia, P. (2002). *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*. Pusat pengkajian kebijakan pengembangan wilayah (P2KTPW- BPPT). Jakarta
- Anonim. (2013). *Masalah Sosiologi Kemiskinan dan Upaya Pemecahannya*. Artikel Ilmiah, Tangerang Selatan.
- Ardianti, A. V., Wibisono, S., Jumiati, A. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa, Jurusan IESP, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*.
- Baniaji, D. (2009). *Analisis Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Hasil Produksi Mebel pada UD. Jepara Asli Surakarta*. Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Baroroh, U. (2012). *Analisis Sektor Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Jawa: Pendekatan Model Levine*. *Jurnal Etikonomi*, 11(2).
- Bhinadi, A. (2003). *Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dan Luar Jawa*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 39-48.
- Chodariyanti, L. (2015). *Analisis Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan tahun 2009-2013*. *Jurnal EKBIS Universitas Islam Lamongan*, 14(2).
- Deswanto, D. B., Ismail, A., Hendarimin. (2017). *Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2015*. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(3).
- Eggoh, J. & Hilaire, S. (2015). *Education, Health, and Economic Growth in African Countries*. *Jurnal Pengembangan Ekonomi*, 93-111.
- Ekonomi Pembangunan*. Vol 8. No 1. Juni 2003. Hlm : 39-48

- Ernawati, T. (2013). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Fatimah, T. S., & Hidayat, P. (2015). *Analisis Daya Saing Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Faisol, A. (2016). *Ini Gerak Cepat Bangkalan Membangun Wilayah dan Menyambut MEA*. surya.co.id. dilihat pada 17 Desember 2016. <http://surabaya.tribunnews.com/2016/03/31/ini-gerak-cepat-bangkalan-membangun-wilayah-dan-menyambut-mea>.
- Fransisco. (2016). *Strategi Alokasi Belanja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan IPM di Provinsi Jambi*. Thesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Hanim, A., & Ragimun. (2010). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi di Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Jember Jawa Timur*. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 14(3).
- Hariyanto & Tukidi. (2007). *Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia di Era Otonomi Daerah..* Jurnal Geografi, 4(1).
- Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Timur.
- Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Timur.
- Hidayat, P. (2012). *Analisis Daya Saing Ekonomi Kota Medan*. Jurnal Keuangan dan Bisnis, 4(3), 228-238.
- Huda, M. & Santoso, E. B. (2014). *Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Potensinya*. Tugas Akhir. Surabaya: PWK ITS.
- Husna, N., Noor, I., & Rozikin, M. (2013). *Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal untuk Memperkuat Daya Saing Daerah di Kabupaten Gresik*. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 188-196.
- Husnan, S. (1999). *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta:BPFE.

- Ikbar, A. F. N. (2017). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah tahun 2011- 2014)*. Tugas Akhir: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Inggrid. (2006). *Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Kausalitas dalam VECM*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(1), 40-50.
- Iqbal, M., Tanjung, A. R., Supriono. (2017). *Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk terhadap Kelemahan Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota Provinsi Riau dan Sumatera Barat)*. *JOM Fekon*, 4(1).
- Irawati, I., Urufi, Z. Resobeoen, R. E. I. R., Setiawan, A., Aryanto. (2012). *Pengukuran Tingkat Daya Saing Daerah Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah, Variabel Infrastruktur dan Sumber daya Alam, serta Variabel Sumber Daya Manusia di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara*. *Jurnal Teknik Planologi*, 7(1).
- Jumliati. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Industri Roti Maros di Kabupaten Maros*. Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.
- Kabupaten Bangkalan Dalam Angka tahun 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan.
- KADIN Indonesia. (2012). *Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE) Programme: Lingkungan Usaha*. Diakses pada 26 April 2019. [image.kadin-indonesia.or.id](http://image.kadin-indonesia.or.id).
- Kamaludin, R. (2003). *Ekonomi Transportasi Karakteristik Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Keban, Y. T. (2012). *Strategi Membangun "Daya Saing" Daerah Tertinggal*. Diakses pada 9 Juli 2019. <http://tataruang.atr->

bpn.go.id/Bulletin/upload/data\_artikel/Topik%20Utama%20-%20Strategi%20membangun%20daya%20saing%20daerah%20tertinggal-oke.pdf.

- Kementrian Keuangan. *Kajian Atas Kebijakan Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.*
- Kurniasih, Y. (2011). *Strategi Meningkatkan Kapasitas Fiskal (Pajak Daerah) di Pemerintah Daerah Kota Bogor (Studi Kasus Dispenda Kota Bogor).* Thesis: Institut Pertanian Bogor.
- Kurniawan, A. (2013). *Ciptakan Iklim Kondusif, Masyarakat Jangan Jadi Penonton.* Diakses pada 26 April 2019. <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/article-39-ciptakan-iklim-kondusif-masyarakat-jangan-jadi-penonton.html>
- KPPOD. (2005). *Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota Studi Kasus di 169 Kabupaten dan 59 Kota di Indonesia.* Jakarta.
- Lengyel I. (2007). *The Pyramid Model: Enhancing Regional Competitiveness in Hungary.* Acta Oeconomica, 54 (3), 323-342
- Maryaningsih, N., Hermansyah O., Savitri, M. (2014). *Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.* Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 17(1).
- Maulana, H. A. (2018). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Provinsi Jawa Barat tahun 2001-2016.* Jurnal Fakultas Ekonomi UII.
- Millah, A., & Sasana, H. (2013). *Analisis Daya Saing Daerah di Jawa Tengah (Studi Kasus: Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal Tahun 2009-2011).* Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Miraza, B.H. (2005). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.* ISEI, Bandung.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Novita, M. (2017). *Sarana dan Prasarana yang Baik Menjadi Bagian Ujung Tombak Lembaga Pendidikan Islam*. Jurnal STAI Yasni Muara Bungo, 4(2).
- Nurana, A. C. S., & Muta'ali, L. (2012). *Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Ketimpangan Perkembangan Wilayah di Kawasan Ciayumajakuning*. Jurnal Bumi Indonesia, 1(3).
- Nurhidayati, L. L. & Yaya, R. (2013). *Alokasi Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik: Praktik Di Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 17(2).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomor 10 tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Bangkalan tahun 2009-2029
- Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- Prasasti, D. (2006). *Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita 30 Provinsi di Indonesia Periode 1993-2003: Pendekatan Disparitas Regional dan Konvergensi*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 21(4).
- Putri, A. E., Trisnaningsih., Nugraheni, I. L. (2018). Analisis Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar. *Jurnal FKIP Universitas Lampung*.
- Putri, S. D., Priyono, T. H., Suwandi, P. E. (2016). *Analisis Sektor Basis dan Potensi Daya Saing Wilayah Kabupaten Bangkalan Paska Berdirinya Jembatan Suramadu*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
- PPSK Bank Indonesia & LP3E FE-UNPAD. (2008). *Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*.
- Provinsi Jawa Timur Dalam Angka tahun 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.
- Qoyimah, K., Hanim, A., Wahyu, F. (2014). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi di Jawa*

- Timur Periode 1982-2012*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Universitas Jember.
- Reksohadiprodjo, S. (2000). *Ekonomika Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Santoso, E. B. (2009). Daya Saing Kota-Kota Besar di Indonesia. *Seminar Nasional Perencanaan Wilayah dan Kota ITS*.
- Saragih, J., P. (2016). *Analisis Kapasitas Fiskal Tujuh Daerah provinsi Baru*. Jurnal BPPK, 9(2).
- Sari, V. N. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tenaga Kerja dan Rasio Beban Tanggungan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung. *Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung*.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sefle, B., Naukoko, A., Kawung, G. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Kabupaten Sorong (Studi pada Kabupaten Sorong tahun 2008-2012). *Jurnal Berkala Ilmu Efisiensi*, 14(3).
- Sembayang, L. K. B. (2011). Analisis Keterkaitan Ketersediaan Infrastruktur dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Pendekatan Analisis *Granger Causality*. *JEJAK*, 4(1).
- Setiawan, W., Purতো, R., Widjajanti, A. (2017). *Analisis Pengaruh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Banyuwangi tahun 2010-2014 (PDRB)*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 4(1), 67-71.
- Sirojuzilam. (2008). *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*. Pustaka Bangsa Press
- Sitio, A. (2001). *Koperasi: Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Sriyana, J. (2009). *Analisis Kapasitas Fiskal Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul*. Jurnal Universitas Islam Indonesia, 32(72).
- Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2015. BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Timur.

- Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2016. BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Timur.
- Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2017. BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Timur.
- Sugiyono, (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarman, P. (2005). *Relevansi Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja (Permasalahan dan Solusi)*. Majalah Ilmiah Inovasi, 10(3).
- Sukwadi, R. (2013). Pengembangan Model Integrasi Delphi-AHP-Markov Dalam Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ilmiah Pengetahuan dan Penerapan Teknik Industri*, 11(2), 117-242.
- Sumihardjo, T. (2008). *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Suliswanto, M. S. W. (2017). Tipologi Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Seminar Nasional dan Gelar Produk UMM*.
- Supriharjo, R., Rahmawati, D., & Pradinie, K. (2013). *Diktat Metodologi Penelitian*. Surabaya: PWK ITS.
- Tambunan, T. (2006). *Upaya-Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*. dilihat pada 16 Desember 2016. [www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id).
- Tambunan, T. T. H. (2011). *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang Kasus Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarigan, R. (2004). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tarwaka. (2004). *Ergonomi Untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Produktivitas*. Surakarta: Uniba Press.
- Tim Penyusun. (2013). *Membangun Daya Saing Daerah*. [Keuda.kemendagri.go.id](http://keuda.kemendagri.go.id). dilihat pada 16 Desember 2018. <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/22-membangun-daya-saing-daerah>.
- Tohar, M. (2001). *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius.

- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.  
Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahyuningsih, D. (2014). Kualitas Visual Fasad Bangunan Tepi Kali Semarang Studi Kasus Gang Lombok. *Master Thesis*. Semarang: Arsitektur Universitas Diponegoro.
- Wibowo, K. (2014). *Kebijakan Keuangan Publik dalam Peningkatan Daya Saing Nasional*. White Paper Solusi Peningkatan Daya Saing Indonesia.
- Widi, E. P. A., & Ariastita, P. G. (2015). Arahan Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Kediri. *Tugas Akhir*. Surabaya: PWK ITS
- Widiartin, P. I., Suwendra, I. W., Yudiaatmaja, F. (2016). *Pengaruh Modal Pinjaman dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha*. Jurnal Bisna Universitas Pendidikan Ganesha, 4.
- Widodo, S. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yandrizal, dkk. (2016). *Analisis Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan Pencapaian Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Nasional Se Provinsi Bengkulu*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 5(3), 143-150.
- Yegorov, Y. (2015). *Economic Role of Population Density*. Jurnal ESRA, Universitas Vienna, Austria.
- Yulianto, A. R. (2013). *Pengetahuan dan Sikap Tentang Koperasi Serta Implikasinya Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Mahasiswa*. Jurnal Pendidikan, 7(1).
- Zamharir. (2016). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Per Kapita, dan Upah Minimum terhadap Human Development Index: Studi Kasus 12 Provinsi dengan Kategori Lower Medium di Indonesia*. Thesis. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

## LAMPIRAN

## Lampiran 1. Analisis Stakeholder

**Tabel L.1 Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder dalam Penyusunan Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan**

<b>Kelompok Stakeholder</b>	<b><i>Interest Stakeholder Terhadap Program</i></b>	<b><i>Pengaruh Stakeholder Terhadap Program</i></b>	<b>Dampak Program terhadap <i>Interest</i> (1)</b>	<b><i>Kepentingan Stakeholder terhadap Kesuksesan Program</i> (2)</b>	<b><i>Pengaruh Stakeholder terhadap Program</i> (3)</b>
<b>Pemerintah</b>					
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan	Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan di Kabupaten Bangkalan	Kebijakan yang dibuat dapat mempengaruhi realisasi pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan termasuk dalam rangka peningkatan	+	5	5

<b>Kelompok Stakeholder</b>	<b><i>Interest Stakeholder Terhadap Program</i></b>	<b>Pengaruh Stakeholder Terhadap Program</b>	<b>Dampak Program terhadap <i>Interest</i> (1)</b>	<b>Kepentingan Stakeholder terhadap Kesuksesan Program (2)</b>	<b>Pengaruh Stakeholder terhadap Program (3)</b>
		daya saing daerah			
BPKAD	Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah	Dapat memberikan pengaruh dalam perumusan kebijakan dalam bidang keuangan daerah sebagai upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan	+	5	5
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan	Merumuskan kebijakan terkait koperasi dan UMKM di	Kebijakan yang disusun atau dirumuskan berpengaruh	+	5	5

<b>Kelompok Stakeholder</b>	<b><i>Interest Stakeholder Terhadap Program</i></b>	<b>Pengaruh Stakeholder Terhadap Program</b>	<b>Dampak Program terhadap <i>Interest</i> (1)</b>	<b>Kepentingan Stakeholder terhadap Kesuksesan Program (2)</b>	<b>Pengaruh Stakeholder terhadap Program (3)</b>
	Kabupaten Bangkalan	dalam keaktifan koperasi yang juga berpengaruh dalam peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan			
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan	Merumuskan kebijakan teknis terkait bidang industri dan perdagangan. Termasuk dalam penyelenggaraan urusan pelayanan umum bidang	Kebijakan yang disusun berpengaruh dalam penciptaan lingkungan usaha produktif yaitu industri dan terkait	+	5	5

<b>Kelompok Stakeholder</b>	<b><i>Interest Stakeholder Terhadap Program</i></b>	<b>Pengaruh Stakeholder Terhadap Program</b>	<b>Dampak Program terhadap Interest (1)</b>	<b>Kepentingan Stakeholder terhadap Kesuksesan Program (2)</b>	<b>Pengaruh Stakeholder terhadap Program (3)</b>
	perindustrian dan perdagangan	perdagangan sebagai upaya dalam meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan			
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal. Memiliki tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan	Kebijakan yang disusun berpengaruh dalam investasi yang ada di Kabupaten Bangkalan termasuk dalam menciptakan lingkungan usaha yang	+	5	5

<b>Kelompok Stakeholder</b>	<b><i>Interest Stakeholder Terhadap Program</i></b>	<b><i>Pengaruh Stakeholder Terhadap Program</i></b>	<b>Dampak Program terhadap <i>Interest</i> (1)</b>	<b><i>Kepentingan Stakeholder terhadap Kesuksesan Program</i> (2)</b>	<b><i>Pengaruh Stakeholder terhadap Program</i> (3)</b>
	pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal.	produktif dalam peningkatan daya saing			
<b>Swasta</b>					
Pelaku Usaha	<i>Stakeholder</i> yang terkena dampak dengan adanya kebijakan terkait daya saing daerah sekaligus mengetahui kondisi terkait persaingan dunia usaha di	Dapat memberikan masukan terkait bidang dunia usaha sebagai upaya dalam meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan	+	4	4

<b>Kelompok Stakeholder</b>	<b>Interest Stakeholder Terhadap Program</b>	<b>Pengaruh Stakeholder Terhadap Program</b>	<b>Dampak Program terhadap Interest (1)</b>	<b>Kepentingan Stakeholder terhadap Kesuksesan Program (2)</b>	<b>Pengaruh Stakeholder terhadap Program (3)</b>
	Kabupaten Bangkalan				
<b>Masyarakat</b>					
Akademisi Ahli Daya Saing Daerah	Mengetahui secara teoritis dan konsep yang berpengaruh dalam peningkatan daya saing daerah	Dapat memberikan pandangan dan masukan terkait upaya dalam meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan	+	4	4

**Sumber: Analisis penulis, 2019**

Keterangan (1)

+ = dampak positif

0 = tidak ada dampak

Keterangan (2)

1 = *little/no importance*

2 = *some importance*

Keterangan (3)

1 = *little/no influence*

2 = *some influence*

- = dampak negative

3 = *moderate importance*

4 = *very importance*

5 = *critical player*

3 = *moderate influence*

4 = *significant influence*

5 = *very influence*

**Tabel L.2 Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Kepentingan dan Pengaruh dalam Penyusunan Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan**

Kepentingan Pengaruh	<i>Little/No Importance</i> (1)	<i>Some Importance</i> (2)	<i>Moderate Importance</i> (3)	<i>Very Importance</i> (4)	<i>Critical Player</i> (5)
<i>Little/No Influence</i> (1)					
<i>Some Influence</i> (2)					
<i>Moderate Influence</i> (3)					
<i>Significant Influence</i> (4)				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaku usaha</li> <li>• Akademisi</li> <li>  Ahli Daya Saing Daerah</li> </ul>	

<p><b>Very Influence</b> (5)</p>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda Kab. Bangkalan</li> <li>• Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bangkalan</li> <li>• Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Bangkalan</li> <li>• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bangkalan</li> <li>• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bangkalan</li> <li>• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangkalan</li> </ul>
--------------------------------------	--	--	--	--	--

*Sumber : Penulis 2019*

### Lampiran 2. Desain Survei Penelitian

Data	Jenis Data	Metode Pengumpulan Data	Sumber Data	Instansi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas fiskal daerah</li> <li>• Data terkait pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan/data terkait ukuran pemerintahan</li> </ul>	Data sekunder	Survei instansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2013-2018</li> <li>• Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2013-2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda Kab. Bangkalan</li> <li>• BPKAD Kab. Bangkalan</li> <li>• Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Bangkalan</li> <li>• Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Bangkalan</li> </ul>

<p><i>(government size)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja pelayanan publik Kabupaten Bangkalan</li> <li>• Rasio ketergantungan</li> <li>• Rata-rata lama sekolah penduduk</li> <li>• Angka harapan hidup</li> <li>• Nilai tambah sektor pengangkutan per kapita</li> <li>• Kondisi jalan kategori baik</li> <li>• Presentase penduduk pengguna HP</li> <li>• Total investasi per kapita</li> <li>• <i>Firm density</i></li> <li>• Presentase penduduk dengan pendidikan tinggi universitas</li> <li>• Tingkat kepadatan penduduk</li> <li>• Rasio nilai volume usaha terhadap koperasi aktif</li> <li>• Nilai tambah sektor keuangan per kapita</li> <li>• PDRB per kapita</li> <li>• Produktivitas tenaga kerja</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2013-2014</li> <li>• PDRB Kabupaten Bangkalan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017</li> <li>• Statistik Daerah Bangkalan 2013-2018</li> <li>• Statistik Kesejahteraan rakyat Provinsi Jawa Timur 2013-2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bangkalan</li> <li>• BPS Kabupaten Bangkalan</li> <li>• BPS Provinsi Jawa Timur</li> <li>• BPS Nasional</li> </ul>
--	--	--	---	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kesempatan kerja</li> <li>• Informasi dan pendapat dari responden dalam lingkup indikator dan variabel yang digunakan dalam penelitian</li> </ul>	Data primer	Wawancara dan kuisisioner	Hasil wawancara dan kuisisioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda Kab. Bangkalan</li> <li>• BPKAD Kab. Bangkalan</li> <li>• Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Bangkalan</li> <li>• Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Bangkalan</li> <li>• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bangkalan</li> <li>• Pelaku usaha</li> <li>• Akademisi ahli daya saing daerah</li> </ul>
--	-------------	---------------------------	---------------------------------	--

### Lampiran 3. Pengumpulan Data

**Tabel L.3 Pengumpulan Data**

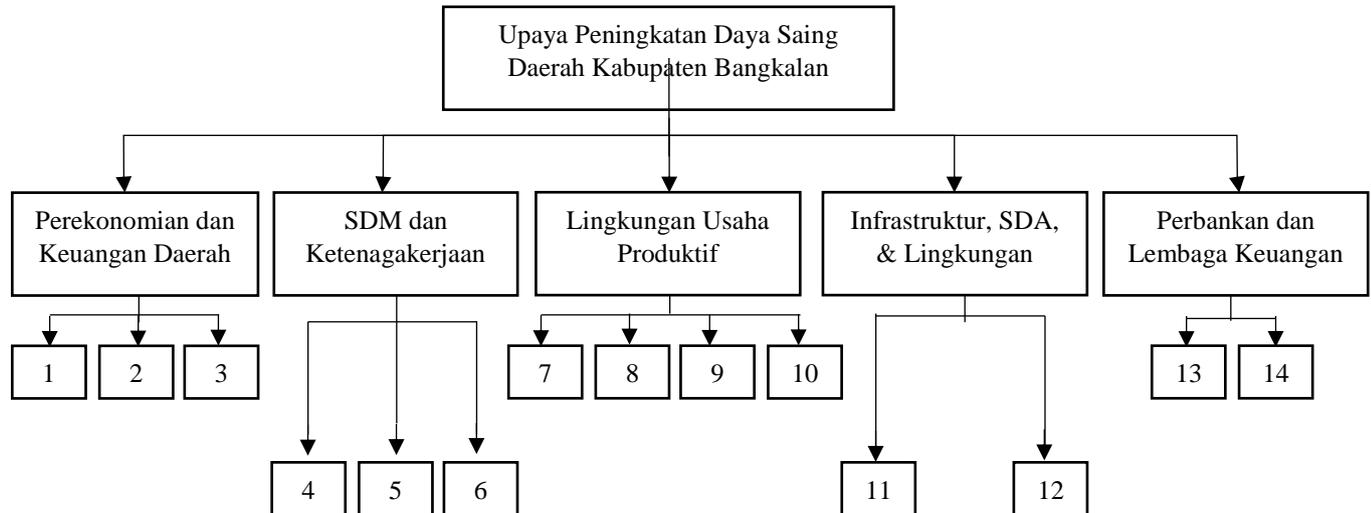
Data	Jenis Data	Metode Pengumpulan Data
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas fiskal daerah</li> <li>• Data terkait pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan/data terkait ukuran pemerintahan</li> </ul>	Data sekunder	Survei instansi

<p><i>(government size)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja pelayanan publik Kabupaten Bangkalan</li> <li>• Rasio ketergantungan</li> <li>• Rata-rata lama sekolah penduduk</li> <li>• Angka harapan hidup</li> <li>• Nilai tambah sektor pengangkutan per kapita</li> <li>• Kondisi jalan kategori baik</li> <li>• Presentase penduduk pengguna HP</li> <li>• Total investasi per kapita</li> <li>• <i>Firm density</i></li> <li>• Presentase penduduk dengan pendidikan tinggi universitas</li> <li>• Tingkat kepadatan penduduk</li> <li>• Rasio nilai volume usaha terhadap koperasi aktif</li> <li>• Nilai tambah sektor keuangan per kapita</li> <li>• PDRB per kapita</li> <li>• Produktivitas tenaga kerja</li> <li>• Tingkat kesempatan kerja</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi dan pendapat dari responden dalam lingkup</li> </ul>	Data primer	Wawancara dan kuisioner

indikator dan variabel yang digunakan dalam penelitian		
--	--	--

Sumber : Analisis Penulis, 2019

#### Lampiran 4. Kuisisioner AHP INDIKATOR INPUT



**Keterangan:**

1 : Kapasitas fiskal daerah

2 : *Government size*

3 : Belanja pelayanan publik per kapita

4 : Rasio ketergantungan

5 : Rata-rata lama sekolah

6 : Angka harapan hidup

7 : Total investasi per kapita

8 : *Firm density*

9 : Presentase penduduk dengan pendidikan tertinggi universitas

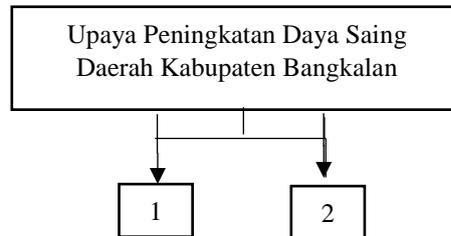
10 : Tingkat kepadatan penduduk

11 : Nilai tambah sektor pengangkutan per kapita

12 : Kondisi jalan dengan kategori baik

13 : Rasio nilai volume usaha terhadap koperasi aktif

14 : Nilai tambah sektor keuangan per kapita

**INDIKATOR OUTPUT****Keterangan**

1 : Produktivitas tenaga kerja

2 : PDRB per kapita



## KUISIONER

### ***ANALISIS PROSES HIERARKI UNTUK MENENTUKAN INDIKATOR DAN VARIABEL PRIORITAS DALAM PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH KABUPATEN BANGKALAN***

#### **PENDAHULUAN**

Bapak/Ibu responden yang saya hormati.

Sehubungan dengan penyusunan tugas akhir, saya **Ummu Bariroh** selaku mahasiswa mata kuliah Tugas Akhir Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berkenan menjadi responden dalam penelitian saya yang berjudul:

***“Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Bangkalan”***

#### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Daya saing daerah adalah kemampuan suatu daerah yang menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dan berkelanjutan namun tetap terbuka pada persaingan domestik maupun global, yang direfleksikan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tingginya daya tarik investasi pada daerah tersebut. Persaingan antar daerah dapat menyebabkan kesenjangan

pertumbuhan ekonomi antar daerah sehingga setiap daerah dituntut untuk meningkatkan daya saingnya. Karena daerah yang tidak berdaya saing semakin lama dapat berpengaruh ke pertumbuhan ekonominya yang terus menurun.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang berdaya saing rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu penting adanya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Dalam upaya peningkatan tersebut, perlu mempertimbangkan indikator didalamnya yaitu meliputi indikator input maupun output. Indikator input meliputi perekonomian dan keuangan daerah; sumber daya manusia dan ketenagakerjaan; infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan; lingkungan usaha produktif, serta perbankan dan lembaga keuangan. Sedangkan indikator output meliputi PDRB per kapita, tingkat kesempatan kerja, dan produktivitas tenaga kerja.

### **TUJUAN KUISIONER**

Tujuan kuisisioner ini adalah untuk menjangkau penilaian responden terhadap indikator dan variabel prioritas dalam peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan.

### **DATA RESPONDEN**

Pihak :  
 Nama Lengkap :  
 Pekerjaan :  
 Instansi :  
 Jabatan :  
 Pendidikan Terakhir :

**PETUNJUK PENGISIAN**

Beri penilaian (1/2/3/4/5/6/7/8/9) atas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini pada kolom perbandingan berpasangan antara dua indikator dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>Angka</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Penjelasan</b>
1	Kedua elemen Sama pentingnya	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama besarnya terhadap tujuan
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting	Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan elemen pasangannya
5	Elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya	Satu elemen sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata, dibandingkan dengan elemen pasangannya
7	Satu elemen jelas sangat penting daripada elemen lainnya	Satu elemen terbukti sangat disukai dan secara praktis sangat mendominasi, dibandingkan dengan elemen pasangannya
9	Satu elemen mutlak lebih penting daripada elemen lainnya	Satu elemen mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan tertinggi
2,4,6,8	Nilai-nilai tengah diantara dua pendapat yang berdam-pingan	Nilai-nilai ini diperlukan suatu kompromi diantara dua pilihan

Bapak/Ibu diharapkan dapat memberikan penilaian berdasarkan kisaran angka di atas dan berkenan menjamin keakuratan jawaban yang diberikan untuk mendukung penelitian yang bersifat penilaian akademik ini.

Saya sampaikan terimakasih atas partisipasi Bapak/Ibu.

### CONTOH PENGISIAN

Dalam pengambilan keputusan untuk menentukan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan seberapa pentingkah Bapak/Ibu mempertimbangkan kriteria di bawah ini:

Perekonomian dan Keuangan Daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sumber Daya manusia dan Ketenagakerjaan
													X					

Jika anda memberi tanda (X) pada angka 5 dikolom Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan, maka artinya Sumber Daya Manusia dan Ketenaga Kerjaan lebih penting dibandingkan dengan Perekonomian dan Keuangan Daerah.

## DAFTAR PERTANYAAN

### PEMBOBOTAN ANTAR INDIKATOR INPUT LEMAHNYA DAYA SAING DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

Dalam memutuskan atau menentukan upaya pening-katan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan, menurut pen-dapat Bapak/Ibu/Saudara/i mana yang lebih penting antar indi-kator input daya saing daerah di bawah ini.

Perekonomian dan keuangan daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan
Perekonomian dan keuangan daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur, SDA, dan Lingkungan
Perekonomian dan keuangan daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lingkungan Usaha Produktif
Perekonomian dan keuangan daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Perbankan dan Lembaga Keuangan
Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Infrastruktur, SDA, dan Lingkungan
Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lingkungan Usaha Produktif
Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Perbankan dan Lembaga Keuangan
Infrastruktur, SDA, dan Lingkungan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lingkungan Usaha Produktif
Infrastruktur, SDA, dan Lingkungan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Perbankan dan Lembaga Keuangan
Lingkungan Usaha	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Perbankan dan Lembaga

Produktif																			Keuangan
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

### PEMBOBOTAN ANTAR VARIABEL DALAM INDIKATOR OUTPUT LEMAHNYA DAYA SAING DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

Dalam memutuskan atau menentukan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan, menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i mana yang lebih penting antar indikator output daya saing daerah di bawah ini.

PDRB kapita	per																		Produk tivitas Tenaga Kerja
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

### PEMBOBOTAN ANTAR VARIABEL DALAM INDIKATOR INPUT LEMAHNYA DAYA SAING DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

Dalam memutuskan atau menentukan upaya peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan, menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i mana yang lebih penting antar sub indikator input daya saing daerah di bawah ini.

### INDIKATOR PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN DAERAH:

Kapasitas Fiskal Daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<i>Governemen size</i>
Kapasitas Fiskal Daerah	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Belanja pelayanan publik per kapita
<i>Governemen size</i>	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Belanja pelayanan publik per kapita

### INDIKATOR SDM DAN KETENAGAKERJAAN

Rasio ketergantungan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Rata-rata lama sekolah penduduk
Rasio ketergantungan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Angka harapan hidup
Rata-rata lama sekolah penduduk																		Angka harapan hidup

### INDIKATOR LINGKUNGAN USAHA PRODUKTIF

Total investasi per kapita	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<i>Firm density</i>
Total investasi per kapita	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Presentase penduduk dengan pendidikan tinggi universitas
Total investasi per kapita	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tingkat kepadatan penduduk
<i>Firm density</i>	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Presentase penduduk dengan pendidikan tinggi universitas
<i>Firm density</i>	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tingkat kepadatan penduduk
Presentase penduduk dengan pendidikan tinggi	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tingkat kepadatan penduduk

universitas																		
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### INDIKATOR INFRASTRUKTUR, SDA, & LINGKUNGAN

Nilai tambah sektor pengangkutan per kapita	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kondisi jalan dengan kategori baik
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------------

### INDIKATOR INFRASTRUKTUR PERBANKAN & LEMBAGA KEUANGAN

Rasio nilai volume usaha terhadap koperasi aktif	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Nilai tambah sektor keuangan per kapita
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Lampiran 5. Hasil Wawancara dengan Stakeholder

### Wawancara dengan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)



Pihak : Pemerintah  
 Nama Lengkap : Jemmi Tria Sukmana, S.E., M.M.  
 Pekerjaan : PNS  
 Instansi : DPMPTSP Kabupaten Bangkalan  
 Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal  
 Pendidikan Terakhir : S-2

S=Peneliti

N=Narasumber

- S** : Perkenalkan pak, saya Ummu, mahasiswa dari ITS Surabaya sedang melakukan penelitian skripsi tentang daya saing daerah  
**N** : Iya mbak, silahkan duduk  
**S** : Iya pak  
**N** : Dari jurusan apa mbak?  
**S** : PWK pak, Perencanaan Wilayah dan Kota  
**N** : Oh planologi ya?  
**S** : Iya pak, baik pak saya langsung saja, jadi disini saya ingin melakukan wawancara sekaligus kuisisioner pak. Ini kuisisionernya (sambil menyerahkan ke narasumber), jadi pak disini penelitian saya merupakan penelitian lanjutan. Dalam

penelitian sebelumnya, hasilnya, bahwa daya saing daerah Kabupaten Bangkalan termasuk rendah dalam lingkup Jawa Timur. Nah, dalam penelitian tersebut, disebutkan beberapa hal yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah, hal-hal tersebut yang saya teliti lagi pak dalam penelitian ini. Jadi langsung saja ya pak

- N** : Iya mbak silahkan (sambil membaca kuisisioner)
- S** : Bagaimana menurut bapak terkait investasi yang ada di Kabupaten Bangkalan?
- N** : Jadi gini mbak, ada fungsi pendapatan nasional, perekonomian keuangan daerah kan bisa sama dengan fungsi pendapatan nasional ataupun fungsi pendapatan daerah. Jadi fungsi *Y* ini fungsi pendapatan ya, *Y* adalah fungsi *consumption, investment, government expenditure*, ditambah ekspor min impor. Ini, ini fungsi pendapatan nasional. Ini kebetulan saya di bidang penanaman modal ya
- S** : Iya pak
- N** : Jadi saya pengen menjelaskan kedudukan saya disini atau saya mewakili urusan pemerintahan dibidang penanaman modal kan, investasi. Jadi fungsi pendapatan nasional, akumulasinya, agregatnya itu adalah fungsi konsumsi masyarakat ditambah investasi yang masuk, ditambah belanja pemerintah, tambah ekspor dikurangi impor secara nasional. Ini, ini fungsi pendapatan nasional. Jadi, jadi kami *ngomong* perekonomian, kalo *ngomong* perekonomian daerah itu, kami kok nggak ada disini (kuisisioner), investasi daerah, ada dimana?
- S** : Investasi disini masuknya masuknya dalam indikator lingkungan usaha produktif pak
- N** : Oh ya, ini ini berarti, nah makanya ini kan saya tadi nggak lihat, indikator-indikatornya apa. Sebenarnya kalo masalah agregat itu ini, fungsi pendapatan nasional (GDP), angka GDP itu *Y*, eh, GNP ya, *sorry*, kalo di belanja pemerintah ini kan, ini saya sekilas saja ya, saya juga udah lupa. Tapi sekilas saja. *Government expenditure* ini kan nggak terbatas, kalo di daerah itu APBD kalo di tingkat pusat itu APBN. Kemampuan fiskal pemerintah ya nggak terlalu, nggak bisa maksimal, jadi sangat diperlukan investasi dan konsumsi. Konsumsi itu dari aktivitas-aktivitas perekonomian

masyarakat, akhirnya mereka belanja, jadi ya sekian persen rumah tangga membelanjakan sekian persen penghasilannya, sisanya kan di *saving*, *saving internal*, nah jadi investasi lebih cepat untuk meningkatkan fungsi Y tadi fungsi pendapatan. Kuncinya di investasi sebenarnya. Jadi seperti kami di daerah Bangkalan ini, kami *consumptionnya* di Bangkalan ini bagus. Karena saya pernah dapat informasi, kalo Bangkalan ini kuat dari ini dari lemitasi

**S** : Lemitasi itu apa pak?

**N** : Lemitasi itu kiriman uang dari luar. Jadi penduduk Bangkalan ini kan bisa dikatakan 1 juta ya, kalo *nggak* salah 1 koma sekian juta, maksimal 1,2 lah, atau anggap 1 juta lah, 1 juta masyarakat Bangkalan itu *nggak* semuanya kerja di Bangkalan, banyak di luar. Ini yang sangat, sangat mendukung pendapatan. Nah itu hasilnya darimana, bukan dari Bangkalan sendiri, tapi lemitasi kiriman uang. Ini saya bisa menjamin akurasinya, memang iya. Kalo perekonomian disini sendiri ya, bisa lihat sendiri mbak kalo pertaniannya juga stagnan, *nggak* banyak orang tanem, kalo industri juga kita *nggak* banyak, kalo boleh tau aja, disini ada PMDN, investasi itukan penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri tambah satu lagi penanaman modal daerah. Penanaman modal daerah itu seluruh akumulasi seluruh perijinan yang kita keluarkan, SIUP, TDP ya, usaha lokal, usaha masyarakat sendiri yang berusaha di daerah. Itu nilainya *nggak* besar, kami setahun paling cuman 300 milyar, dibawah 300 lah. Tapi ada kalanya meningkat. Ya itu, penanaman modal daerah sendiri *nggak* begitu besar, penanaman modal asing itu sampai tahun ini kita hanya punya 6, eh 3. Penanaman modal asing itu cuman 3, skalanya itu kecil

**S** : Itu selama berapa tahun pak 3 itu?

**N** : 3 itu sampe sekarang. Jadi baru ada itu tahun 2016 kalo *gak* salah, 2017 itu baru muncul PMA, nilainya juga 1 juta dolar-an. Kalo PMDN yang penanaman modal besar itu, itu bisa dihitung dengan tangan. Jadi kami juga hanya ada 4 atau 5. Ada 2 galangan kapal, 1 industri fosfat, 1 lagi AMDK, air minum dalam kemasan. Hanya itu, satunya lagi apa ya, ya meskipun sudah ada yang kecil menengah juga ada.

Galangan kapal juga ada, 2 yang menengah kelasnya. Ya itu PMDN juga. Tapi kalo dilihat secara makro, sepertinya ekonomi Bangkalan ini cukup kuat. Itu dasarnya dari kiriman uang itu, lemitasi. Ini unik memang, saya sampaikan ini unik. Investasinya di kita nggak begitu besar, sampai hari ini rata-rata penanaman modal daerah hanya 300 an milyar, kemudian *consumption* nya ini yang tinggi sebenarnya. Asalnya dari mana *consumption* nya itu, nggak dihasilkan dari Bangkalan sepenuhnya, tapi kiriman uang dari luar. Terus *government expenditure* kami itu kalo nggak salah ya, kalo nggak salah tahun ini sudah angkanya sekitar 2 T, 2,5 kalo nggak salah 2,5 T. Ya, kasarannya gitu. 2 T itu kan juga kalo GDP Bangkalan sendiri, saya nggak punya datanya, bisa dilihat atau googling ya. Ekspor impor nggak begitu tinggi. Ya ekspornya itu nggak melalui, nggak langsung dari kita. Inu fungsi pendapatan, fungsi pendapatan itu seperti ini. Jadi kita itu sangat penting, untuk mempercepat pertumbuhan daerah, pertumbuhan pendapatan daerah maupun pertumbuhan pendapatan nasional itu investasi. Karena itu kami ada. Pemerintah, negara menugaskan kami, kalo di tingkat pusat ada PKPM, kalo di daerah ada DPMPTSP untuk mengurus semua urusan pemerintahan dibidang penanaman modal. Kalo dasarnya, UU no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Jadi kami ini, kami ini diperintah untuk mulai dari mempromosikan, mempromosikan potensi investasi yang ada di daerah, supaya mereka sebanyak-banyaknya masuk ke Bangkalan. Itu promosi. Kemudian disebut juga pengembangan iklimnya, kita nyiapkan sarana-sarana, prasarana, alat-alat promosinya, kita nunjukin semaksimal mungkin. Tapi kan juga sampai hari ini, semua ivestasi itu masih ada di Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, ya masih di Jawa. Mbak dari Gresik ya?

**S** : Iya pak hehehe

**N** : Ya memang, banyak variabelnya kalo soal itu. Jadi ya, saat investasi itu masuk, Y ini akan meningkat lebih tinggi. Kalo kita stagnan, kecil sekali. 300 milyar itu kalo Surabaya cuman bangun dua hotel bintang tiga. Padahal Surabaya tiap tahun bisa puluhan hotel bintang tiga itu. Itu masih satu

sektor saja, sektor pariwisata. Belum sektor industri. Contohnya kalo seandainya, nanti kalo ada galangan kapal yang masuk investasi, PMDN, itu nilainya nggak ratusan milyar langsung, untuk bangun satu ya. Harapan kami ini bisa, bisa memasukkan investasi sebanyak-banyaknya. Tapi ya variabelnya banyak juga. Sampai hari ini ya gini-gini aja, satu dua sudah mulai masuk.

- S** : Kalo terkait upaya untuk menarik investor itu seperti apa pak upaya yang sudah dilakukan?
- N** : Kebetulan ini saya di promosi, jadi DPMPTSP itu mulai dari promosi, menyiapkan *software* nya, dan perda aturan regulasi yang apa, yang mendukung iklim penanaman modal. Kemudian ada fungsi pelayanan perijinan, mereka yang memberikan ijin, memfasilitasi, melayani, saat mereka (investor) masuk untuk berinvestasi, kita siapkan perijinannya di bidang perijinan. Saat *running*, sudah operasional nanti ada bidang ketiga ini bidang informasi dan pengendalian, yang akan memeriksa apakah investasi yang masuk ini, tujuannya investasi itu jelas satu meningkatkan pendapatan, ya tujuannya utama sih untuk mensejahterahkan masyarakat Bangkalan ya. Jangan sampai investasi yang masuk ini ternyata membawa dampak buruk. Itu fungsi dari pada bidang pengendalian ini. Jadi kalau mereka ketemu masalah saat masuk juga kita bantu lewat bidang pengendalian. Dan juga kalau mereka membawa masalah juga ke bidang pengendalian. Investasi masuk itu pasti akan menciptakan *multiplier effect*, menciptakan tenaga kerja, memacu pertumbuhan perekonomian di lingkungannya. Contohnya pada saat tahun 2012, kami punya Bangkalan Plaza itu, saat operasional dulu itu kan pinggir sawah dulu itu. Saat dia masuk ke situ, ada Matahari, ada Hypermart, lingkungan sekitarnya juga ikut tumbuh. Ada perputaran uang, jadi uang masyarakat Bangkalan ini nggak harus dikonsumsi ke Tunjungan Plaza untuk beli baju, cukup disini saja. Ya itu, akan menciptakan pertumbuhan didalam. Itu secara umum, jadi kami menjaga ini mengendalikan, mempromosikan, dan melayani, pelayanan masyarakat, pelayanan kepada industri, kepada investor, terkait dengan penanaman modal. Jadi kalau, kalau upaya promosi kami,

promosi nya itu bisa *offline* bisa *online*. Jadi kalo *online* kami menggunakan *website*. Kita menggunakan system informasi lah, social media, seperti facebook, twitter. Itu kami menggunakan itu, terus e-mail. Itu kami mengontak luar lebih cepet. Dengan e-mail kan sekarang, gampang. Kedua yang *offline*. Itu kami mengikuti pameran-pameran. Pameran-pameran terkait investasi, kemudian menghadiri forum-forum investasi, yang dilaksanakan oleh PKPM sebagai Lembaga vertical diatas kami. Seringkali kan ada kunjungan dari grup-grup itu dari luar dimana, dimana kita diundang untuk mempresentasikan. Mereka kan ingin investasi dengan uang sekian, atau juga mau diusahakan di daerah mana. Kita harus ngerjar itu. Jadi kita juga hadir disana, jadi kayak kontes.

**S** : Jadi kayak memilih gitu ya pak?

**N** : Iya. Iya memilih. Mereka seumpama, saya ingin membuat industri kemaritiman, perkapalan. Nah, kami maju duluan. Senjata kami ini ya alat-alat peraga, seperti brosur, booklet, kita punya *website* juga. Kemudian yang paling penting kita nyiapkan *software*nya, infrastruktur, seperti peraturan daerah tentang penanaman modal, kemudian rencana umum penanaman modal. Hal tersebut untuk mempercepat pengembangan iklim ivestasi di daerah. Dan yang paling utama sekarang kami sudah menjual potensi yang ada di Bangkalan ini, kami jadikan sebagai pre-FS (Pre-Feasibility Study). Jadi kami sudah membentuk. Dari berapa tahun disini itu kami sudah punya pre FS industri kemaritiman, pariwisata, pelabuhan. Karena anggaran kami kecil, nggak cukup buat FS. Jadi kita buat pre FS. Untuk potensinya itu, dibanding kabupaten kota di Jawa Timur, kami lebih siap. Karena saat investor datang, kalau mau membuat industri apa, kami sodorkan pre FS kami. Jadi secara perhitungan bisnis itu paling nggak sudah ada. Daerah lain belum buat, kami sudah duluan. Pre FS itu. Alat-alat kami seperti itu. Dan responnya juga bagus, sudah 1-2 laku juga. Jadi kalau lihat disini seperti KFC, atau apa. Itukalau nggak ditarik kesini juga nggak masuk. Jadi memang ya itu, kami harus komunikasi, kita harus hadir kesana.

**S** : Untuk kendalanya sendiri dalam hal menarik investor dari

luar ke dalam daerah ini agar berinvestasi seperti apa pak?

**N** : Kalau kendala..ndak ada. Kalau saya ngomong kendala anggaran kecil, itu kendala umum ya. Bahkan kita ini, dibanding yang lain paling kecil. Nggak ada persoalan khusus, jadi kita tetap lakukan apa yang bisa dilakukan. Jadi masalah investasi itu, kita bisa berupaya tapi kita nggak bisa ngontrol juga. Contohnya, di Bangkalan ini sudah banyak lahan-lahan yang dibeli grup-grup besar. Dan kita sudah komunikasi ke mereka, mau diapakan, kapan. Bisnis itu gutu, kita nggak bisa ngontrol, saat menurut mereka sudah waktunya menguntungkan, mereka pasti jalan. Bukan karena ekonomi biaya tinggi ataupun pungli. Terkait dengan perencanaan ya, planologi. Bangkalan ini juga masuk WPS 13.

**S** : WPS 13 pak?

**N** : Iya, Wilayah Pengembangan Strategis 13. WPS 13 itu Malang, Surabaya, Bangkalan. Tapi Bangkalannya bukan di kota, tapi diujung sana rencana pelabuhan Tanjung Bumi Bandar. Itu di kecamatan Klampis. Nantinya itu ada pelabuhan yang lebih besar daripada perak, jadi ngikuti kebutuhan juga. Itu pelabuhan baru. Pelabuhan itu nanti dibuat distribusi logistic di Jawa Timur. Untuk investasi yang masuk ke Jawa Timur, kebetulan Bangkalan nggak dapet. Yang luar biasa itu dari Singapura, investasi manufaktur. Manufaktur utamanya bahan makanan, tekstil. Karena apa, Singapura sendiri sudah berpikir jangka Panjang. Bahwa dia harus memproduksi di Jawa Timur. Distribusi logistiknya nanti nggak akan bisa mampu ditampung oleh perak ataupun Teluk Lamong. Harus dibentuk pelabuhan baru. Karena apa, alur laut untuk Perak sendiri ada kendala juga. Dibawahnya itu kan ada pipa gas, pipa dari Madura ini banyak dibawa ke Gresik. Jadi di Gresik dibagi. Untuk Petro, Semen. Itu gas nya dari kami, dari Bangkalan. Kedalamannya itu kan maksimal cuman 12 meter. Dulu awalnya dari 8 meter mau diturunkan maunya 16 meter, tapi ternyata bisanya Cuma 12 meter. Kapal yang lewat disitu Cuma kapal-kapal generasi ke-3 saja. Yang isinya paling 300 Trius. Padahal kapal-kapal sekarang itu sampe 10.000 trius, yang generasi ke-7 itu. Artinya kalau

pelabuhannya disana, di Klampis, kapal-kapal mulai generasi ke-5 dari Bangkalan bisa langsung ke Eropa, nggak perlu ke Singapura dulu. Kapal-kapal yang lewat ke Perak itu terbatas, Cuma kapal generasi ke-3. Kalau WPS 13 itu mulai start 2025. Tapi secara perencanaan sudah matang sekali. Itu kalau gambaran umumnya seperti itu. Adanya Suramadu digratiskan itu juga baru-baru ini property sudah menggeliat masuk kesini.

- S** : Untuk harapan maupun saran peningkatan kapasitas fiskal seperti apa pak?
- N** : Harapan kapasitas fiskal daerah ya, semakin tinggi semakin bagus. Kenyataannya kita tidak terlalu kuat. Inginnya optimal namun PAD kita kecil. Tapi kita punya migas, terus lebih kuat di bagi hasil dalam bidang itu dengan pemerintah provinsi.
- S** : Untuk harapan maupun saran peningkatan *government size* seperti apa pak?
- N** : Terkait *government size* harapannya dengan dengan fiskal yang kuat, kita bisa memberikan fungsi pelayanan public yang besar. Tapi ya kenyataannya sekali lagi seperti ini
- S** : Untuk harapan maupun saran peningkatan belanja pelayanan publik per kapita seperti apa pak?
- N** : Untuk belanja pelayanan publik 50:50 ya, kita termasuk bagus. Kalo tingkat harapannya ya kita sebisanya lebih banyak pada belanja pelayanan publik.
- S** : Untuk harapan maupun saran terhadap rasio ketergantungan seperti apa pak?
- N** : Saya kurang referensi ya kalau itu
- S** : Untuk harapan maupun saran terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah apa pak?
- N** : Harapannya SDM untuk ditingkatkan, namun disini kita juga punya PTN. Peningkatan dengan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ada. Rata-rata lama sekolah, kan daerah tau sendiri lah. Kan masyarakat itu kadang SMA saja sudah cukup
- S** : Untuk harapan maupun saran terhadap peningkatan angka harapan hidup seperti apa pak?
- N** : Kalo angka harapan hidup saya juga nggak terlalu banyak preferensi ya

- S** : Untuk harapan maupun saran terhadap nilai tambah sektor pengangkutan per kapita seperti apa pak?
- N** : Nilai tambah sektor pengangkutan nggak begitu signifikan
- S** : Untuk harapan maupun saran terhadap peningkatan kondisi jalan dengan kategori baik seperti apa pak?
- N** : Kondisi jalan sudah mulai bagus, mungkin perlu peningkatan pada beberapa titik lagi
- S** : Untuk harapan maupun saran terhadap peningkatan total investasi per kapita seperti apa pak?
- N** : Harapan untuk investasi masuk sebanyak-banyaknya, tapi kenyatannya ya itu jumlah PMA/PMDN/penanaman modal di kita ya masih kecil. Upaya lebih seperti tadi ke promosi
- S** : Jika terkait *firm density* pak?
- N** : Untuk *firm density* sendiri kita masih kecil ya cuma 4 itu mbak, kita belum banyak disini
- S** : Sarannya bapak terkait tingkat kepadatan penduduk untuk meningkatkan iklim investasi seperti apa pak?
- N** : Investasi kurang banyak yang masuk kita juga ga bisa ngomong banyak. Tapi sekarang suramadu kan gratis, dulu kalo orang mau kesini aja jugamikir mikir karena masih bayar.
- S** : Untuk harapan maupun saran terhadap peningkatan volume usaha koperasi seperti apa pak?
- N** : Koperasi disini tidak terlalu, lebih baik kalo manufaktur yang masuk jadi lebih cepat untuk pertumbuhan ekonomi daerah
- S** : Untuk harapan maupun saran terhadap peningkatan pdrb per kapita, maupun produktivitas tenaga kerja seperti apa pak?
- N** : Untuk PDRB per kapita, tidak terlalu tinggi  
Untuk tenaga kerja sudah bagus dari *consumption* tadi

## Wawancara dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan



Pihak : Pemerintah  
 Nama Lengkap : Eko Prasetyo  
 Pekerjaan : PNS  
 Instansi :Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan  
 Jabatan : Kasi MONEV dan Pelaporan Data Koperasi  
 Pendidikan Terakhir : S-2

**S=Peneliti**

**N=Narasumber**

- S** : Iya pak perkenalkan nama saya Ummu mahasiswa dari PWK ITS. Ini saya ingin mewawancarai bapak terkait peningkatkan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan berupa wawancara dan kuisioner. Jadi, penelitian saya ini termasuk penelitian lanjutan pak. Jadi penelitian sebelumnya itu menghasilkan bahwa Bangkalan termasuk salah satu kabupaten yang memiliki daya saing daerah yang rendah dalam lingkup Jawa Timur. Kemudian disitu disebutkan beberapa bidang lemahnya. Kemudian bidang lemahnya itu yang saya teliti lebih lanjut dalam penelitian saya itu. Ada beberapa hal yang dibahas, nah itu bisa dilihat di kuisioner saya pak. Jadi pak untuk wawancara yang pertama, gambaran terkait kelembagaan koperasi di Bangkalan seperti apa pak?
- N** : Secara kelembagaan perlu ditata ulang kalau menurut saya. Karena, pertama secara data kita masih berantakan. Itu dasar ya, karena dasar menata itu datanya dulu. Kemudian regulasi, secara

regulasi perlu pemahaman lebih lanjut. Karena kalau saya lihat ini terkait dengan sumber daya manusia juga kan. Kalau saya bicara sumber daya manusia, di Bangkalan ini ya masih menengah kebawah. Bukan berarti saya mendeskripsikan Bangkalan rendah, cuma memang kondisinya seperti itu. Mengenai pemahaman kelembagaan itu tadi. Pertama, data. Kemudian yang kedua itu pemahaman regulasi tentang SDM

- S** : Tadi disebutkan adanya data yang berantakan ya pak?
- N** : Ya
- S** : Maksudnya itu seperti apa pak data yang berantakan?
- N** : Berantakan itu, pertama mengenai ee masih tumpang tindih. Artinya tumpang tindih itu, data yang *real* dengan data yang di lapangan itu ada perbedaan yang sangat jauh. Kalo saya berbicara tentang data koperasi di Bangkalan itu sekitar 600an sampai 700an kalau tidak salah. Kebetulan saya yang memegang datanya. Kemudian yang aktif itu, sekitar separuhnya. Kemudian ada yang melaksanakan itu separuhnya lagi.
- S** : Yang melaksanakan apa pak?
- N** : RAT (Rapat Anggota Tahunan). Jadi ada miskomunikasi pengertian aktif dengan yang melaksanakan RAT. Kalau pribadi saya mengatakan bahwa yang melaksanakan RAT itu yang aktif. Tapi data yang saya terima yang termasuk aktif itu separuhnya 300 berapa gitu. Ternyata yang melaksanakan RAT selama dua tahun terakhir itu sekitar 100an. Nah itu yang saya bilang masih tumpang tindih. Sementara itu yang perlu ditata ulang. Termasuk ditata dan didata ulang. Kalo terkait pendataan itu, pengennya saya memang mendata ulang, Cuma terkendala dari anggaran itu. Kan kita tahu sendiri kan, anggaran itu, keinginan gede tapi fasilitas apa adanya. Sementara itu yang perlu diperbaiki secara kelembagaan.
- S** : Kalau terkait SDM nya sendiri bagaimana pak minatnya dengan kelembagaan koperasi?
- N** : Kalau minat dari SDM ya, kalau kita berbicara minat itu ada 2 versi bagi saya. Yang pertama minat karena dia memang ingin mendalami berkoperasi lebih lanjut atau dari sisi pengetahuan lah. Atau, minat karena segi finansial. Orang kan macem-macam tuh, ada yang secara keilmuan pengen saya berkoperasi, ingin mendalami, mau tidak mau harus terlibat disitu. Yang kedua, minat secara finansial, koperasi itu menguntungkan bagi mereka. Saya

kira itu.

- S** : Kalau minat secara finansial di Bangkalan seperti apa pak?
- N** : Contoh begini, minat secara finansial di koperasi itu kan tidak seperti bank. Prinsip koperasi itu kan dari anggota untuk anggota, seperti itu kan ya. Jadi apa yang kita kerjakan itu akan kembali kita. Contoh mengenai simpan pinjam, memang ada jasa disitu, beda kan dengan lembaga keuangan lainnya. Bukan jasa, tapi bunga kalo dilainnya. Nah kalo finansial itu kan nanti juga akan kembali ke kita. Daripada saya pinjam ke bank, kena bunga, tapi manfaatnya cuma sekedar saat itu juga. Kalo dikoperasi kan kemabli ke kita kan. Bentuknya kan ada macem-macem, ada E-Saku, dana pendidikan dan lainnya. Jadi itu yang dibilang secara finansial.
- S** : Kalau tadi pak, terkait regulasi SDM nya itu seperti apa?
- N** : Regulasi itu, jadi pemahaman regulasi. Kalau dari SDM yang ada di Bangkalan itu, kurangnya keinginan untuk memahami. Kita kan nggak bisa asal jalan kan, pasti ada aturannya. Kadang itu mereka tidak ingin pengen tahu lebih lanjut aturannya seperti apa, yang penting ikut dan menguntungkan bagi dia, ya selesai. Sementara itu kan ada regulasinya juga. Jadi untuk memahami, untuk orang belajar secara keilmuan, tentang regulasi-regulasi itu kurang. Ya mungkin itu pengaruhnya, makanya kenapa koperasi yang dikatakan tidak aktif dan koperasi yang melaksanakan RAT itu rendah perbandingannya. Kalau mau dikatakan aktif itu kan kita harus melaksanakan RAT. RAT itu kan penting, dimana itu sebagai pertanggung jawaban kepada anggota. Kalau tidak ada pertanggung jawaban dipertanyakan kemana jalannya uang itu. Padahal kalau secara aturan, tidak melaksanakan RAT itu ada sanksinya. Contoh, kita kan punya Nomer Induk Koperasi. Itu wajib. Ketika dalam kedepan, dari pusat, kami tidak melaksanakan RAT dan NIK. Karena syarat NIK itu kan melaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, nah ini kurangnya pemahaman dari mereka. Asal bendera koperasi tetap ada, mereka tetap jalan itu kalau kondisinya sekarang. Dia kan sudah bermodalkan badan hokum dari notaris itu ya, padahal bukan seperti itu. Kalau tidak melaksanakan RAT dan sebagainya itu akan terhapus dengan sendirinya. Itu secara SDM nya tidak sampai kesitu. Mungkin beda, makanya kita kan ada berbagai macam koperasi. Yang paling

aktif itu, sebagian besar itu KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia), nah secara implisit, itu menggambarkan bahwa SDM menentukan. KPRI kan isinya orangnya pegawai-pegawai negeri tuh. Secara regulasi dia ngikuti terus. Itu makanya SDM kan pengaruhnya kesitu. Kalau yang ada di pelosok kayak KSP itu kan asal bendera mereka masih ada dianggap masih ada. Beda pemahaman terkait koperasi.

- S** : Tadi itu terkait kendala-kendalanya ya pak, kalau terkait upaya-upayanya yang sedang/akan/sudah dilakukan itu seperti apa pak?
- N** : Yang pertama ingin mendata ulang, dari ratusan sekian koperasi itu kenapa kok yang aktif sedikit dan yang melakukan RAT lebih sedikit lagi. Sebenarnya saya pengen bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini LPPM. Karena kalau mendata sekian banyak itu kan tenaga kita nggak ada. Kalau dana APBD itu kita usahakan. Ingin bekerja sama dengan LPPM untuk mendata ulang. Jadi kalau di LPPM kan bisa untuk menggerakkan tenaga mahasiswa nya. Untuk mendapat ulang, kira-kirakoperasi itu masih ada nggak, secara fisik, secara SDM, secara keuangan, kemudian secara laporan itu masih ada nggak, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin walaupun ini tidak bidang saya, koperasi yang masuk kategori aktif maupun yang tidak aktif, kita memberikan bantuan untuk melaksanakan RAT.
- S** : Bantuan seperti apa pak yang dimaksud?
- N** : Bantuan itu bantuan finansial sama bantuan pemikiran. Kita kan nggak tahu, dibawah itu ada kendala apa. Apa kendala uangnya habis, atau kendala dia nggak tahu aturannya melaksanakan RAT bagaimana, RAT itu kan harus membuat laporan keuangan, nah takutnya mereka ndak ngerti gitu. Bikin laporan keuangan seperti apa. Jadi istilahnya yang mati suri itu pengen kita gerakkan lagi. Entah biasanya masalah finansial itu juga, mungkin karena kendala APBD ya, mau melaksanakan RAT mungkin uangnya sudah dibawa kabur jadi nggak bisa melaksanakan RAT. Yang ketiga itu, ini masuk di program saya sendiri. Percepatan pemberian Nomer Induk Koperasi. Bentuknya seperti apa, sementara kita masih sosialisasi. Sosialisasi pentingnya Nomer Induk Koperasi. Nomer Induk Koperasi itu kan gaungnya sebatas kita sebagai Pembina, sementara digerakan belum semuanya tau. Belum semuanya punya Nomer Induk Koperasi. Dari *update*, terakhir kemarin dari 100an yang melaksanakan RAT, yang punya Nomer Induk Koperasi baru

sekitar 80 sampai 90an, 10 sisanya belum. Itu kita *door to door*. Biasanya pas kita diundang RAT, kita akan menjelaskan iniloh pentingnya Nomer Induk Koperasi. Jai ada tiga itu ya.

- S** : Kemudian tadi yang dimaksud untuk kendalanya, itu bagaimana yang bapak maksud?
- N** : Kendala utama kita itu APBD. Kalau keinginan besar, tapi masalahnya dituruti nggak. Khusus seksi saya sebenarnya sudah ada reng-reng an, 200 juta keatas, ternyata 2019 APBD diabolkan sama dewan nggak sampe separuhnya. Jadi ya kerjakan apa yang saya bisa dulu. Yang jelas sekarang focus saya di percepatan Nomer Induk Koperasi, itu tok. Yang kedua, sumber daya manusia. Tenaga kita kurang, secara fisik, secara keilmuan iya. Ya sama-sama belajar lah, sama seperti saya. Baru disini 2 tahunan.
- S** : Kalau terkait volume usaha pak, sebenarnya tinggi rendahnya volume usaha itu menandakan apa?
- N** : Kalau kita berbicara koperasi, saya melihat secara garis besar, volume usaha koperasi itu menandakan secara langsung “kesehatan” koperasi itu. Tapi memang perlu diversifikasi lagi. Kembali lagi ke pemahaman, bahwa koperasi itu kalau mau membentuk usaha itu tidak hanya simpan pinjam, kebanyakan pemahaman koperasi itu simpan pinjam aja. Padahal masih perlu perluasan pemahaman. Masih banyak, contoh untuk usaha toko foto kopi, kemudian ada yang sewa kendaraan, kemudian pengadaan sambilan bahan pokok dan sebagainya. Masalahnya *mindsetnya* tentang koperasi. Kalo bicara volume, semakin tinggi volume usaha koperasi , semakin menandakan koperasi itu sehat. Ya logika nya, sih begitu emang
- S** : Tinggi rendahnya volume usaha koperasi itu berdampak seperti pak?
- N** : Berdampak terhadap kesejahteraan anggota koperasi. Jika volume usaha besar, tingkat partisipasi anggota besar, otomatis kan jasa yang terkumpul kan semakin besar.
- S** : Kemudian sebelumnya tadi pak kan saya cerita bahwa penelitian saya ini lanjutan dari penelitian tahun 2014 yang menyebutkan bahwa daya saing daerah Bangkalan rendah. Nah, bagaimana pengaruhnya daya saing daerah yang rendah tersebut terhadap kelembagaan koperasi maupun volume usaha yang ada?
- N** : Kalo terkait dari tahun 2014 mohon maaf, karena saya baru disini 2018 mbak. Jadi kalo perbedaan dari 2018 itu saya belum

merasakan real

- S** : Kemudian kalau pengaruhnya daya saing daerah yang rendah itu ada tidak pak ke kelembagaan koperasi yang ada?
- N** : Pengaruh. Pengaruh dalam artian gini, kita kan berbicara ekonomi secara global ya. Karena ada pengaruhnya dengan pendapatan per kapita. Kalau penduduk pendapatan perkapitanya rendah. Otomatis semangat ber koperasi itu rendah. Ngerti maksudnya kan? Pendapatan perkapita itu kuncinya. Kan ada itu selain daya saing daerah rendah, mungkin *sampeyan* punya data pendapatan per kapita Bangkalan itu terendah di Jawa Timur. Jadi pengaruhnya daya saing itu ke pendapatan koperasi, akhirnya ke koperasi juga rendah. Walaupun sebenarnya misi koperasi itu meningkatkan kesejahteraan.
- S** : Kemudian terkait peran koperasi di Bangkalan sendiri saat ini seperti apa pak?
- N** : Karena tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan anggota, jadi penting dalam perekonomian daerah. Disitu kan ada beberapa sector usaha, kalau berbicara benar benar tentang koperasi. Bidang koperasi itu tidak hanya simpan pinjam tapi perdagangan juga. Disitu kan ada perputaran uang juga, semakin besar koperasi semakin besar perputaran uang. Apalagi bidang usahanya tidak 1 macam saja.
- S** : Untuk saran maupun harapan bapak seperti apa untuk peningkatan variabel-variabel lemahnya daya saing daerah seperti yang ada pada kuisioner?
- N** : Peningkatkan kapasitas fiskal saya yang lain aja. Karena kurang paham. Kalo terkait pengeluaran pemerintah, efesiensi. Karena program pemerintah sekarang itu, korupsi itu pengaruh kan ya. Pengeluaran pemerintah daerah itu kalau ndak ditingkatkan lagi efisiensinya, semakin banyak anggaran yang terbuang sia-sia. Kalau bicara anggaran terbuang sia-sia itu kan banyak macemnya. Bisa jadi karena kurang tepat sasaran, bisa jadi karena korupsi. Secara umum ya ini. Untuk belanja pelayanan publik per kapita, sama ya efisiensi. Itu umum sudah. Penyakitnya kita itu kurang efisiensi, perlu diperbaiki lagi. Rasio ketergantungan: peningkatan keterampilan. Ketika masa-masa menjelang tidak produktif, paling nggak mengasah keterampilan untuk bekal. Jadi perlu peningkatan keterampilan. Untuk rata-rata lama sekolah, yang pertama pendapatan per kapita dulu. Pemerintah bagaimana biar pendapatan

per kapita dulu. Lama ndaknya sekolah itu kan dari ekonomi berpengaruh. Kebanyakan itu kan menengah ke bawah. Yang kedua, pemerataan fasilitas pendidikan. Kan macem macem, fisik maupun tenaga kerja nya. Untuk angka harapan hidup perlu pemerataan dan peningkatan fasilitas kesehatan. Nilai tambah sektor pengangkutan per kapita dengan perbaikan dan peningkatan infrastruktur. Hampir sama dengan kondisi jalan jawabannya. Peningkatan total investasi per kapita itu perluasan kesempatan investasi dari luar daerah, kemudian perlu juga dalam hal kemudahan pelayanan perizinan investasi. Untuk firm density sarannya kita itu ada kendala investor takut masuk untuk masuk ke Bangkalan karena kemudahan berinvestasi rendah. Itu terkait dengan birokrasinya., birokrasinya dipermudah. Secara umum masih sulit. Terkait presentase penduduk tinggi. Sarannya, kalo kita berbicara angka memang masih rendah, daripada tahun sebelumnya. Cuma kita perlu untuk perubahan mindset secara personal. Kadang-kadang pola pikirnya masih tradisional. Mereka berpikir tidak perlu perlu sekolah, belajar yang sebenarnya itu di lapangan. Langsung praktek. Ini terkait dengan prinsipnya orang Madura. Kadang-kadang mereka malu untuk bekerja di tempat mereka sekolah. Sehingga banyak yang bekerja dimana-mana. Perlu adanya perubahan *mindset*.

Tingkat kepadatan penduduk terlalu sentral. Mungkin masih berpikir sumbernya untuk bertahan hidup. Jadi yang sekiranya peluang kerja, perputaran uang lebih tinggi. Itu yang menyebabkan orang berkumpul disatu titik Saran peningkatan volume usaha terhadap koperasi aktif itu seperti yang sudah dijelaskan awal-awal tadi ya, diperlukan update data koperasi, terus juga bantuan pelaksanaan RAT, pemahaman koperasi yang kaitan utama tadi dengan sumberdaya manusia, sama perlu menggerakkan lagi koperasi yang mati. Peningkatan PDRB per kapita, peningkatan SDM. Kuncinya di SDM. Karena saya lihat tenaga kerja professional banyak dari luar, sementara yang asli sedikit. Kalaupun yang ada disini kualitasnya rata-rata. Untuk produktivitas tenaga kerja lebih diperlukan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja maupun sejenisnya.

## Wawancara BPKAD Kabupaten Bangkalan



Pihak : Pemerintah  
 Nama Lengkap : Darussalam, S.H., M. Akun.  
 Pekerjaan : PNS  
 Instansi : BPKAD Kabupaten Bangkalan  
 Jabatan : Kasubid Pendapatan dan Pembiayaan  
 Pendidikan Terakhir : S-2

S= Peneliti

N= Narasumber

- S** : Perkenalkan pak saya Ummu mahasiswa dari ITS sedang melakukan penelitian terkait peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan, disini saya ingin wawancara dan kuisioner. Mungkin saya mau minta identitas responden dulu pak
- N** : Iya mbak saya Darussalam, S.H.,M. Akun. Kasubid pendapatan dan pembiayaan
- S** : Jadi penelitian saya terkait peningkatan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Dimana termasuk penelitian lanjutan. Dimana dipenelitian sebelumnya, daya saing daerah Kabupaten Bangkalan itu merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam daya saing daerahnya rendah dalam lingkup Jawa Timur. Habis itu disitu dibebarkan hasil penelitiannya, yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah itu apa saja. Nah hal-hal yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah itu saya teliti lebih lanjut pak. Itu terdiri dari beberapa variabel yang saya gunakan dalam penelitian saya kali ini.

- N** : Iya mbak, ini kapasitas fiskal daerah ya. Jadi kebanyakan emang kalo PAD itu hanya pajak dan retribusi. Itu PAD yang murni. Sedangkan bagian laba, itu kan kecil. Artinya BUMD ita kecil karena tidak berkembang disini.
- S** : Biasanya itu BUMD nya tidak berkembang disebabkan oleh apa pak?
- N** : Ya karena kurang inovatif aja. Jadi pengembangan usaha nya masih di bidang ATK saja, sumberdaya aja. Cuma sebetulnya tahun berapa itu juga ke migas. Tapi paling cuma pengadaan ATK dan sewa alat berat aja. Karena memang belum dikelola secara professional.
- S** : Yang kapasitas fiskal nya itu kan pak dari PAD nya dengan yang DAK dan DAU kok kayaknya jauh pak?
- N** : Iya, jomplang. Memang fiskalnya kita bisa melihat bahwa kemampuan keuangan pemda masih tergantung dari pusat.
- S** : Sebenarnya kendalanya itu di apa pak? Kenapa bisa jomplang seperti itu dan masih mengandalkan dari pusat?
- N** : Potensi PAD di Bangkalan masih kurang, hotel aja masih hotel melati bukan bintang. Industri skala yang besar juga kurang.
- S** : Kalau seperti industri galangan kapal dan fosfat pak?
- N** : Ya masih kurang, yang di industri galangan kapal aja kita cuma kena retribusi di jaringan listrik. Jadi meskipun potensi masih disini, belum tentu masuk ke daerah.
- S** : Apakah ada industri lain yang menyumbangkan besar ke daerah pak?
- N** : Belum ada, bisa sampeyan lihat di PAD. PAD yang besar itu PBB di perkotaan, perdesaan, pajak parkir. Jadi yang besar itu Cuma pajak dan retribusi.
- S** : Kemudian menurut bapak upaya untuk meningkatkan PAD seperti apa pak?
- N** : Sepengetahuan saya, upaya nya seharusnya potensi nya Bangkalan apa memang sudah 100%. Upaya yang seharusnya dilakukan kepada target, yang belum tercapai. Artinya semua potensi PAD agar bisa diraih dan direalisasikan semua. Upayanya kesitu. Kedua, harusnya mengembangkan sektor-sektor yang menunjang PAD, misal pariwisata. Karena pariwisata disini sangat kecil, karena yang dikelola hanya taman kota saja. Tempat rekreasi kota. Kalau Jeddih itu milik swasta, mercusuar juga milik swasta, yang mbah Kholil itu pribadi. Memang sektor pariwisata itu yang perlu

dikembangkan. Karena UU 28 sudah dibatasi, mana saja pungutan yang bisa ditarik.

- S** : Kemudian ini pak, sebenarnya kan pasti kapasitas fiskal ini berpengaruh pada perekonomian daerah ya pak. Menurut bapak, bagaimana pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Bangkalan terkait kapasitas fiskal yang rendah?
- N** : Kalau masalah pendapatan kan ini di APBD, implementasinya kan juga ke Bangkalan juga. Dilakukan untuk pembangunan. Menurut saya ya hanya sebagai stimulus saja menurut saya. Mendorong pelaku ekonomi yaitu masyarakat. Tidak 100% komisi PAD itu berbanding lurus dengan perekonomian di masyarakat, karena nilai APBD sendiri disini masih kecil. Kan APBD juga untuk pembangunan jalan misalnya, untuk memperlancar roda perekonomian, hanya sebagai stimulus. Jadi peran swasta dan masyarakat memang dibutuhkan. Karena sifatnya kita regulator, kayak perijinan kita permudah dalam bentuk program dan kegiatan di APBD. Sifatnya hanya mendukung.
- S** : Menurut bapak, pengeluaran pemerintah terdiri dari apa saja?
- N** : Secara umum untuk membayar pelayanan dan pembangunan. Kalau pengeluaran itu belanja dan pembiayaan. Secara umum belanja ada yang sifatnya hanya membayar gaji seperti belanja pegawai di belanja tidak langsung. Belanja langsung lebih berat dalam mendukung pelayanan. Pengeluaran pemerintah juga tergantung dari pendapatannya juga.
- S** : Menurut bapak, adakah harapan agar belanja untuk efisien ataupun lainnya?
- N** : Menurut saya belum efisien. Dari program kayaknya meskipun sudah di pilah, saya belum melihat program dan kegiatan saling mendukung antara satu dengan lainnya. Mungkin kalo terintegrasi, pembangunan lebih optimal. Sebatas program OPD terlaksana. Jadi hasilnya tidak terlihat. Disamping itu ada program kegiatan yang seharusnya tidak butuh anggaran karena merupakan kegiatan, itu ada anggaran. Karena kurang efisiensi itu. Harusnya tergantung kebutuhan.
- S** : Kemudian untuk belanja pelayanan publik, apakah ada kendala-kendala tertentu ataukah menurut bapak hasil belanja publik sudah terlihat di masyarakat?
- N** : Belanja pelayanan publik. Contoh pelayanan pendidikan, pendidikan antara kebutuhan pendanaan dan real nya masih kurang sekali.

Banyak bangunan sekolah dasar yang belum memenuhi syarat. Selama bertahun-tahu sumbernya dari DAK saja. Untuk pembangunan Gedung. Untuk BOS sudah dari pusat. Kalau dari APBD masih kecil. Banyak kegiatan yang pendanaan masih dari pusat langsung turun ke SD misalnya.

- S** : Untuk peningkatan belanja pelayanan publik, upaya apa yang perlu dilakukan menurut bapak?
- N** : Karena memang tugasnya pemerintah, disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Ya dioptimalkan saja tugas fungsinya SKPD nya sehingga pelayanan publik lebih maksimal
- S** : Kalau kendala terkait belanja pelayanan publiknya apa ada pak?
- N** : Karena masih tergantung pusat, pendanaan jelas kurang untuk pelayanan. Juga dari SDM nya perlu ditingkatkan kapasitasnya. Misal peningkatan kualitas guru, tapi juga kadang anggarannya atau pendanaannya masih kurang. Jadi perlu peningkatan anggaran, kapasitas.
- S** : Kemudian pak, bagaimana saran maupun harapan menurut bapak terkait peningkatan variabel-variabel penelitian dalam kuisioner tersebut dalam rangka peningkatan daya saing daerah Bangkalan?
- N** : Kapasitas fiskal inginnya ada peningkatan. Rasio ketergantungan anggaran tinggi, harapannya peningkatan PAD agar dapat ditingkatkan. Sehingga ketergantungan dari pusat semakin kecil. Perlu peningkatan dalam hal SDM, kapasitas, kualitas, sesuai dengan tupoksi OPD. Dengan membuka sektor-sektor potensi yang dapat meningkatkan PAD. Rata-rata lama sekolah harapannya minimal SMA. Karena sekarang SD sudah banyak yang berhenti. Karena kategori masih kabupaten miskin, salah satunya keteringgalan di pendidikan seperti tamatan SD. Berarti nggak sampe 12 tahun, 6 tahun itu belum banyak yang genap. Angka harapan hidup, harapan peningkatan kesehatan. Apalagi sekarang ada BPJS. Masyarakat miskin itu setiap tahun ditingkatkan untuk pelayanan gratis di kita. Nilai tambah sektor pengangkutan sekarang ada suramadu, paling tidak lancar, meskipun jalan antar kecamatan perlu ditingkatkan. Perlu perbaikan jalan, tapi kadang belum sampai 2 tahun sudah rusak. Investasi per kapita, investasi sangat penting, membuka daya saing usaha daerah, menyerap tenaga kerja. Investasi masih sedikit, perhotelan, pabrik kayak gitu. Kemudahan perijinan dibutuhkan, tapi juga akses tempat dan lahan juga diperhatikan.

Firm density perlu kemudahan perijinan, juga akses tempat dan lahan yang perlu diperhatikan. Penduduk dengan tamatan tinggi universitas, disini masih kurang. Semakin tinggi, daya saing daerah juga semakin tinggi nanti pengaruhnya.

Rasio volume usaha koperasi, koperasi disini banyak yang tidak aktif, memang penting. Perlu ada pembinaan, bukan hanya pengelolaan koperasi, terkait dengan jenis usaha. Jangan simpan pinjam saja. Ke anggota juga perlu pembinaan, permodalan misalnya. Dikasih tentang pelatihan manajemen koperasinya.

Nilai tambah sektor keuangan per kapita, bertambahnya nilai pendapatan perkapita berpengaruh untuk daya saing mbak. Sektor usahanya masih sektor pertanian, lebih banyak yang masih menggantungkan pertanian. Untuk meningkatkan itu diperlukan pelatihan yang dapat membantu masyarakat jika bukan musim tanam. PDRB per kapita, hampir sama yang nilai tambah sektor keuangan per kapita. Produktivitas kerja peningkatannya terkait dengan jenjang pendidikan juga. Perlu peningkatan keterampilan, masih banyak yang buruh bukan tenaga terampil.

## **Wawancara Bappeda Kabupaten Bangkalan**



Pihak	: Pemerintah
Nama Lengkap	: Suhartatik
Pekerjaan	: PNS
Instansi	: Bappeda Kabupaten Bangkalan
Jabatan	: Kasubid Perdagangan, Perindustrian, dan
Tenaga Kerja	
Pendidikan Terakhir	: S-1

S = Peneliti

N = Narasumber

- S** : Perkenalkan bu saya Ummu Mahasiswa ITS, ingin melakukan wawancara dan kuisisioner terkait daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya ini merupakan penelitian lanjutan bu, jadi daya saing daerah Kabupaten Bangkalan rendah dalam lingkup Jawa Timur. Dalam penelitian tersebut disebutkan hal hal yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Hal hal itu yang saya teliti lebih lanjut, seperti yang tertera pada kuisisioner. Pertanyaan saya bu yang terkait peningkatan variabel-variabel ini seperti apa menurut ibu?
- N** : Menurut saya peningkatan kapasitas fiskal daerah lebih ke perlu adanya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, industri, dan perdagangan dan jasa. Pertumbuhan ekonomi sendiri didukung oleh penciptaan iklim investasi yang kondusif. Penerimaan daerah Bangkalan sendiri dari pendapatan sektor pajak dan retribusi daerah belum optimal. Jadi perlu peningkatan pada area itu. Kalau gov size dan belanja publik saya kurang tau ya mbak karena saya kurang paham kondisi di lapangan nya seperti apa
- S** : Oh iya bu, lalu untuk saran dan harapan ibu terhadap peningkatan variabel-variabel dalam indikator sumber daya manusia seperti rasio ketergantungan, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup seperti apa bu?
- N** : Kalau rasio ketergantungan saya kurang paham. Tapi kalau rata-rata lama sekolah perlu adanya peningkatan dari kualitas pendidikan itu sendiri, baik tenaga kerja pendidikan ataupun fasilitas yang ada. Untuk angka harapan hidup, lebih pada peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan pendapatan penduduk juga perlu ya karena ekonomi ada pengaruhnya ke kualitas hidup masyarakat
- S** : Kemudian untuk saran maupun harapan ibu terhadap peningkatan variabel nilai tambah sektor pengangkutan per kapita dan kondisi jalan dengan kategori baik seperti apa bu?
- N** : Untuk nilai tambah sektor pengangkutan per kapita disini kuncunya adalah lancarnya retribusi barang dan jasa, jadi kayak aksesibilitasnya ya. Nah hal itu didukung oleh peningkatan penyediaan infrastruktur yang ada. Kalau terkait dengan kondisi jalan dengan kategori baik itu penting ya dalam

peningkatan daya saing, karena dapat memperlancar semua urusan untuk pertumbuhan ekonomi baik di sektor pertanian, perdagangan, dan sebagainya. Sehingga perlu ada peningkatan kualitas jalan itu sendiri.

- S** : Kalau untuk sarana dan harapan terhadap peningkatan variabel total investasi per kapita, firm density, presentase penduduk dengan pendidikan tinggi, dan tingkat kepadatan penduduk seperti apa bu?
- N** : Penting ya untuk investasi dalam peningkatan daya saing daerah, tentu kemudahan perizinan kalo di Bangkalan perlu ditingkatkan lagi. Untuk firm density ini menurut saya lebih pada peningkatan kualitas dari produktivitas masyarakat sendiri sehingga dapat memicu pembangunan sektor industri potensial. Kemudian juga diperlukan peningkatan jumlah industri kecil menengah atau menjadi skala yang lebih besar. Terkait penduduk dengan tamatan pendidikan tinggi, akan mempengaruhi semua dalam perencanaan pembangunan daerah. Sehingga berpengaruh dalam peningkatan daya saing daerah. Dengan peningkatan kepadatan penduduk sendiri akan berpengaruh dalam pembangunan daerah
- S** : Kemudian bagaimana terkait peningkatan rasio volume usaha terhadap koperasi aktif dan nilai tambah sektor keuangan per kapita dalam peningkatan daya saing daerah Bangkalan bu?
- N** : Menurut saya kalau tentang perkoperasian lebih kepada urusan pemahaman ya. Karena masyarakat kurang memahami atau kurang wawasan tentang perkoperasian. Sedangkan untuk nilai tambah sektor keuangan per kapita yaitu disini kurangnya masyarakat dalam mengembangkan usahanya.
- S** : Untuk saran maupun harapan terhadap peningkatan PDRB per kapita dan produktivitas tenaga kerja dalam peningkatan daya saing daerah menurut ibu bagaimana bu?
- N** : Kalau peningkatan PDRB per kapita belum maksimal ya, kalau terkait produktivitas tenaga kerja disini masalahnya lebih kepada keterampilan dan kreativitas tenaga kerja yang kurang.

## Wawancara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan



Pihak : Pemerintah  
 Nama Lengkap : Ir. R. Siswanto, MM  
 Pekerjaan : PNS  
 Instansi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
 Kabupaten Bangkalan  
 Jabatan : Kepala Bidang Industri Agro  
 Pendidikan Terakhir : S-2

S = Peneliti

N = Narasumber

- S** : Perkenalkan pak saya Ummu Mahasiswa ITS, ingin melakukan wawancara dan kuisisioner terkait daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya ini merupakan penelitian lanjutan pak, jadi daya saing daerah Kabupaten Bangkalan rendah dalam lingkup Jawa Timur. Dalam penelitian tersebut disebutkan hal hal yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Hal hal itu yang saya teliti lebih lanjut. Termasuk bidang industri dan ketenagakerjaan. Pertanyaan saya pak yang pertama, terkait gambaran umum dan tenaga kerja di Bangkalan itu seperti apa pak?
- N** : Jadi di Bangkalan itu sudah banyak industri yang bermunculan. Hamper mayoritas industri kecil menengah. Yang besar hanya 4 ada galangan kapal, dan madura guano itu industri fosfat. Produknya ekspor ke Jepang, Korea, Taiwan. Yang galangan

kapal, memperbaiki/dok kapal. Sisanya kepada menengah sekitar 11 industri menengah. Banyak juga tersebar industri non formal, yang formal Cuma sedikit tercatat di data sekitar 500an. Awalnya 4 industri besar, setelah memakai peraturan kementerian perindustrian tentang penetapan klasifikasi itu, berubah akhirnya.. tapi jika memakai uu no 20 tahun 2008, industri besarnya ada 4. Setelah memakai kementerian perindustrian no 64 tahun 2016, industri besarnya hanya 1. Industri besar itu didasarkan nilai investasi. Dari segi asset industri yang diatas 19 milyar. Terserah mbak mau memakai acuan apa, itu hanya berdasarkan permintaan dan aturan yang ada. Karena dari kementerian minta coba dihitung berdasarkan peraturan kementerian itu. Industri ini membantu perekonomian di daerah. Industri ini salah satu ukm yaitu ikm istilahnya ya. Istilah ukm di bidang KB yaitu program keluaran harapan. Jadi ibu ibu yang mandiri diberi pembelajaran untuk menjadi usaha mandiri. Diberi pelatihan. Setelah menghasilkan produk, harus siap masuk pasar. Kalau dijual katakanlah dodol atau apa ya apa adanya. Tapi kalau mau masuk mall, toko-toko harus memenuhi standar industri, sehingga harus dikemas. Sehingga menjadi produk industri.

- S** : kemudian bagaimana pengaruh daya saing rendah terhadap kegiatan industri yang ada di Bangkalan pak?
- N** : Sekarang itu, sudah global. Atau online semua. Daerah dituntut untuk kreatif dan inovasi. Jadi dasar pembinaan di industri sendiri sesuai uu no 3 tahun 2014, pertama atas dasar sumber daya alam, potensi daerahnya apa. Selain itu juga sumber daya manusia serta inovasi dan kreativitas. Tanpa itu akan sulit. Setelah itu atas dasar kemampuan teknologinya, apakah lokal atau modern. Yang akan mempengaruhi produktivitas, kalau nggak kreatif mau bersaing bagaimana. Misalkan produk kentang bumbu disingkat KenBu, seperti itu perlu kreativitas. Memang dituntut itu sekarang. Memasuki era industri ke-4 ya itu.
- S** : Untuk kreativitas itu sendiri apa dari pemerintah Bangkalan sudah menerapkan dari dulu atau bagaimana pak?
- N** : Jadi uu industri no 3 tahun 2014 tentang dimunculkan inovasi kreativitas itu. Agar produk di daerah ini harus punya brand. Jadi sesuai dengan memasuki era sekarang sudah global. Ingin

mengarahkan setiap desa punya produk yang sesuai potensi alamnya. Misal batu akik, di Tragih muncul ada pengerajin batu akik. Walaupun batunya tidak sebagus Tuluangagung, tapi SDM nya bagus. Seperti Tanjungbumi dikenal batik tulis, tapi bahan bakunya kayak kain, malam dari luar. Tapi SDM jalan.

- S** : Dalam bidang industri sendiri pak, apakah ada masalah atau kendala tertentu?
- N** : Namanya informasi pengetahuan itu tidak semua orang tahu mbak. Misalkan mereka membuat suatu barang, atau produksi barang. Tapi apa yang mereka lakukan nggak ngerti. Kekurangan informasi dan pengetahuan. Jadi kita melakukan bimtek ke lapangan, menyampaikan informasi terkait bagaimana cara meningkatkan nilai tambah produk yang ada. Setelah itu baru pelatihannya. Peran kita menjembatani.
- S** : Selain kreativitas apa ada lagi pak terkait peningkatan dalam kegiatan industri yang ada?
- N** : Jadi selain bimtek langsung ke desa. Mengadakan pelatihan. Pelatihan olahan buah misalnya, 1 kecamatan saya ambil 2. Sesuai dengan potensi lokalnya, missal manga, belimbing, dan lainnya. Itu diberi pelatihan membuat misal manga, untuk sari manga, sirup manga, dodol manga. Sekarang ada pelatihan menjahit, dulu terkait masalah kerajinan tas dari anyaman untuk tas sekolah dan lainnya. Setelah pelatihan, kita melakukan pendampingan/fasilitasi menggiring pengerajin yang menghasilkan produk, misal didaftarkan merknya, dilakukan uji lab kandungan nutrisi.
- S** : Berarti untuk tenaga kerja nya sendiri seperti apa pak?
- N** : Kemudian masalah tenaga kerja ya, disini mengadakan pelatihan agar bisa masuk ke ranah industri. Hampir mayoritas yang ikut baru lulusan SMA, diharapkan dia nanti diberi keterampilan, kompetensi, dapat sertifikat, dan masuk ke industri. Begitu juga kami memberikan pelatihan itu untuk menumbuhkan wirausaha. Jadi pelaku usaha. Kadang ada yang ragu-ragu, apa yang mau dia usahakan itu belum terpikir. Lain lagi kalau kita ke desa, ibu ibu misalnya, dia kan gambarannya lain. Dia menciptakan produk dan mencari uang sendiri. Bukan ingin masuk ke ranah perusahaan. Kadang banyak yang masih belum siap untuk terjun wirausaha, dominasi masih ingin mengejar untuk masuk ke perusahaan. Karena mayoritas anak muda,

gambarannya beda dengan dengan ibu-ibu. Jadi perlu menciptakan tenaga kerja yang terampil sehingga dapat masuk maupun bersaing yaitu bekerja dalam perusahaan-perusahaan yang ada.

**S** : Di Bangkalan sendiri potensi industri yang paling menonjol apa pak?

**N** : Jadi di industri besar yang tadi ya, kemudian ada air dalam kemasan. Ada sumber air untuk air mineral disini. Industri menengah ada industri tahu, terus ada industri batik, meubel, industri pengolahan ikan, kecap, jamu. Itu yang menengah yang menonjol di Bangkalan. Untuk yang sentra, ada perwira (perkumpulan ibu ibu wirausaha) bergerak di bidang macam-macam.

**S** : Kemudian pak, bagaimana saran dan harapan bapak terhadap peningkatan variabel-variabel lemahnya daya saing ini dalam peningkatan daya saing Bangkalan?

**N** : Kapasitas fiskal daerah, perlu pertumbuhan industri dan kontribusi di daerah, pertumbuhan industri kita 2,5%. Harapannya semakin banyak orang berinvestasi, menjadi jalan keluar ketenagakerjaan. Atau memunculkan wirausaha baru, sehingga bisa membuka lapangan kerja. Gov size, harapannya ada kemudahan regulasi dan kebijakan terutama dari daerah. Belanja pelayanan publik per kapita, sebenarnya kurang belanja pelayanan publik disini. Harus besar, minimal 50% untuk masyarakat. Rasio ketergantungan, dalam bidang industry mayoritas 75% berasal dari potensi local. Kalo yang tidak berbasis potensi local 50:50. Misal batik, bahannya tidak dari sini, tapi keterampilan nya ada. Angkatan kerja perlu kita latih untuk di lapangan. Jawa Timur itu turun di bidang inovasinya terkait SDMnya. Maksudnya SDM untuk berinovasi. Rata rata lama sekolah, pelaku usaha disini rata-rata masih lulusan SMP atau SMA tapi motivasi untuk jadi pelaku usaha tinggi. Karena tahu suaminya penghasilannya rendah jadi untuk mencari tambahan penghasilan. Tapi masih kurang ya, jadi harapannya tamatan pendidikannya lebih tinggi, kalau bisa perguruan tinggi. Kan nanti juga berpengaruh ke kualitasnya, selain inovasi tadi. Angka harapan hidup, terkait itu beda dengan luar negeri. Tingkat kelayakan hidup bidang kesehatan itu dijamin. Kalo disini mayoritas 60 sampai 65. Untuk 70 masih jarang. Tingkat

pendapatan mungkin juga berpengaruh, kemudian kekayaan daerah untuk pelayanan kesehatan. Jadi semakin banyak perusahaan yang berkontribusi, mungkin pelayanan kesehatannya akan semakin baik. Nilai tambah sektor pengangkutan, sekarang sudah ada gojek ya, grab kayak gitu. Semakin berkembang dunia aktivitas pengetahuan transportasi. Kondisi jalan dengan kategori baik, mayoritas sudah bagus. Paling ya kurang 5% lah masih kurang. Kelemahannya jalan itu kalau sudah musim hujan banyak aspal mengelupas. Tapi kalau jalan nasional, mayoritas sudah bagus. Ketersediaan infrastruktur, air dan listrik berpengaruh terhadap masuknya investasi disuatu daerah. Total investasi per kapita, disini masih kurang ya. Semakin banyak wirausaha/pelaku usaha, semakin banyak membangun daerahnya. Itu semakin banya yang menginvestasikan untuk daerahnya. Firm density, masih kurang. Dipengaruhi oleh kemudahan investasinya untuk masuk ke daerah ya. Sarannya agar investor bisa diinvestasi di Bangkalan. Kesiapan daerah untuk pelayanan terhadap investor perlu ditingkatkan, termasuk kemudahan perizinan dan lainnya yang juga dipengaruhi oleh birokrasi. Penduduk dengan pendidikan tinggi univ, kalau disini masih kurang ya. Kebanyakan pencari kerja yang disini juga SMA ataupun SMP. Kepadatan penduduk, kadang investor mencari daerah yang padat penduduk untuk berinvestasi. Tapi kadang juga malah diarahkan pada yang jarang penduduknya. Rasio volume usaha thd koperasi aktif, sistem manajemen pengelolaan koperasi perlu diperhatikan kembali. PDRB per kapita, perlu pada peningkatan IPM, keterbelakangan berpengaruh dalam meningkatkan pdrb per kapita. Atau kualiatas dari SDM untuk meningkatkan pendapatan per kapitanya. Produktivitas tenaga kerja, mayoritas produktivitas tinggi. Termasuk pekerja keras. Tinggal bagaimana mengasah skill nya supaya mempunyai daya saing

## Wawancara Pelaku Usaha PT. Madura Guano



Pihak : Pelaku Usaha  
 Nama Lengkap : Agus Cahyono U.  
 Pekerjaan : Swasta  
 Instansi : PT. MADURA GUANO  
 Jabatan : Kabag Export  
 Pendidikan Terakhir : SLTA

**S** = Peneliti  
**N** = Narasumber

- S** : Perkenalkan pak saya Ummu Mahasiswa ITS, ingin melakukan wawancara dan kuisisioner terkait daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya ini merupakan penelitian lanjutan pak, jadi daya saing daerah Kabupaten Bangkalan rendah dalam lingkup Jawa Timur. Dalam penelitian tersebut disebutkan hal hal yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Hal hal itu yang saya teliti lebih lanjut
- N** : Gimana apa yang bisa saya bantu?
- S** : Perusahaan ini mulai berinvestasi di Kabupaten Bangkalan pak?
- N** : Tahun 1990
- S** : Kan perusahaan ini perusahaan pengolahan ya pak, apakah bahan baku yang digunakan berasal dari Kabupaten Bangkalan sendiri atau dari luar daerah?
- N** : Bahan bakunya dari Bangkalan dan luar daerah mbak. Sebenarnya

nggak dari Bangkalan saja mbak, potensinya banyak dari wilayah Madura juga. Bangkalan juga ada, se Madura juga ada

**S** : Yang menyebabkan investasi di Bangkalan sendiri itu apa pak?

**N** : Dulu awalnya itu gini, dulu itu kan Madura terkenal fosfatnya, tapi terus citranya Madura rusak karena masalah fosfat itu, istilahnya kadarnya itu kualitasnya tidak sesuai dengan standar. Jadi citranya itu jelek, sebenarnya untuk memperbaiki citranya itu. Juga untuk wilayah Bangkalan khususnya, untuk perusahaan seperti ini belum ada. Kebanyakan perusahaan kecil, seperti home industri.

**S** : Kalau terkait waktu berinvestasi di Bangkalan apakah ada kendala-kendala tertentu pak?

**N** : Dulu itu belum ada, kebetulan waktu itu bupatinya dari ABRI masihan. Kan belum pemilihan seperti sekarang yang pemilu. Kebetulan, perusahaan ini yang mendirikan dokter angkatan laut, jadi seperti ijin ijin dipermudah. Apalagi perusahaan di Bangkalan waktu itu belum ada. Otomatis untuk mengurangi pengangguran khususnya di wilayah ini, dibangunlah perusahaan ini.

**S** : Untuk memperbaiki citra tadi maksudnya seperti apa pak?

**N** : Jadi untuk citra kualitas tidak sesuai dengan yang ada. Istilahnya gini, orang pesan keramik itu kan kw 1 misalnya, tapi yang dikirim itu kw 3, otomatiskan citranya jelek mbak. Ini perusahaan ekspor semua kebetulan

**S** : Kalau ekspor kemana saja pak?

**N** : Ke Australi, New Zealand, Filipina, Malaysia, Vietnam

**S** : Kalo wilayah sendiri local ada pak?

**N** : Tidak ada, karena kebanyakan petani petani local kan menginginkan yang instan. Kayak pupuk kimia gitu, kalo kita kan organik ini

**S** : Jadi kendalanya tadi masih belum ada?

**N** : Iya belum ada, mulai dari yang bukan TNI itu yang mulai sulit. Sulit di ijinnya. Sekarang bisa dilihat aja Suramadu istilahnya 10 tahun, tapi perkembangannya yang mantap belum terlihat, istilahnya gitu.

**S** : Apakah ada saran agar perusahaan perusahaan lain masuk ke Bangkalan?

**N** : Dari kebijakan daerah, seperti ijinnya. SDM nya ada “kolot” nya juga. Seperti Jeddih, itu sebenarnya bagus tapi untuk perkembangan belum ada karena masih dikelola swasta/pribadi. Jadi kurang berkembang

- S** : Untuk tenaga kerja nya disini dari mana pak? Dominannya  
**N** : Kebanyakan dari sini, kualitasnya juga sudah cukup baik

## Wawancara Akademisi



- Pihak : Akademisi  
 Nama Lengkap : Dr. Sutikno, S.E., M.E.  
 Pekerjaan : PNS  
 Instansi : Universitas Trunojoyo Madura  
 Jabatan : Dosen dan Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi  
 Universitas Trunojoyo Madura  
 Pendidikan Terakhir : S-3

**S** = Peneliti

**N** = Narasumber

- S** : Perkenalkan pak saya Ummu Mahasiswa ITS, ingin melakukan wawancara dan kuisisioner terkait daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya ini merupakan penelitian lanjutan pak, jadi daya saing daerah Kabupaten Bangkalan rendah dalam lingkup Jawa Timur. Dalam penelitian tersebut disebutkan hal hal yang menyebabkan lemahnya daya saing daerah Kabupaten Bangkalan. Hal hal itu yang saya teliti lebih lanjut. Pertama apa boleh saya meminta identitas bapak terlebih dahulu?
- N** : Langsung saja mbak, nanti identitasnya belakang ya
- S** : Baik pak. Yang pertama, bagaimana pendapat bapak terkait pentingnya daya saing daerah dalam pembangunan daerah. Terutama mengapa daya saing daerah itu perlu ditingkatkan, pendapat bapak seperti apa?

- N : Kalau bagi saya kenapa daya saing daerah itu penting, ini kita kan konteksnya bicara dalam konteks Bangkalan kan ya. Kita lihat memang dari daya saingnya, Bangkalan itu rendah memang dari daya saingnya. Dan sebenarnya Bangkalan berlokasi di daerah yang strategis karena dekat dengan pusat pertumbuhan Jawa bagian timur, yaitu Surabaya dan sekitarnya. Jadi kalau Bangkalan tidak meningkatkan daya saingnya, maka sumber daya-sumber daya pembangunan yang ada di Bangkalan ini, akan terhisap ke pusat-pusat itu, seperti yang ada di *trickle down effect* itu. Tinggal, kita kan sebenarnya daya saing itu bagaimana daerah itu mampu “menghisap” sumber daya daerah sekitarnya misalkan modal, manusia, atau bahkan bisa *resource* alam. Tapi kalau kita lihat daya saing Bangkalan kalah dibandingkan dengan pusat pertumbuhan kota Surabaya, maka justru lebih banyak sumber daya apalagi dengan adanya jembatan Suramadu malah Bangkalan yang sumber daya nya terhisap ke luar daerahnya. Itu pentingnya kenapa, Bangkalan itu perlu meningkatkan daya saingnya.
- S : Kemudian, untuk pendapat bapak terkait kondisi di lapangan, waktu itu kan ada penelitian yang saya lanjutkan ini, karena penelitian ini termasuk penelitian lanjutan. Dimana penelitian tersebut tahun 2014, penelitian terkait pemetaan daya saing daerah lingkup di seluruh Jawa Timur, kemudian hasilnya Bangkalan ini rendah. Kemudian mengingat lagi tahun 2017 juga ada penelitian lagi terkait daya saing daerah, hasilnya pun Bangkalan masih dalam daerah yang berdaya saing daerah rendah. Terkait hal tersebut, bagaimana pendapat bapak keadaan yang mencolok selama rentang waktu tersebut terkait daya saing daerah Bangkalan yang rendah?
- N : Kalau saya melihat kenapa kita masih rendah karena sumber daya manusia kita. Makanya perlunya peran perguruan tinggi ya. Bangkalan itu dari tingkat pendidikannya masih rendah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan lingkungan masyarakat. Masyarakat yang belum kondusif terhadap misalkan investasi dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara tentang daya saing itu kan bagaimana pasar bisa buka. Kemudian bagaimana industri itu bisa masuk. Selama lingkungan masih kurang kondusif, terutama bagian keamanan, itu akan sulit untuk daya saing Bangkalan bisa meningkat.

- S** : Berarti untuk kendalanya lebih ke sumber daya manusia ya pak.
- N** : Iya, karena kalau infrastruktur kita sudah mulai baik. Sumber daya alam juga Bangkalan tidak terlalu berbeda dengan kabupaten lain. Punya minyak juga kan, migas, gas alam juga.
- S** : Kemudian apakah ada saran dari bapak sendiri terkait solusi dari kendala tersebut?
- N** : Kalo SDM, perlu ada penyadaran di SDM Bangkalan agar bagaimana kita memberikan kesadaran pentingnya SDM bagi pembangunan. Jadi kalau masyarakatnya belum siap, investor sulit untuk masuk. Terutama peran perguruan tinggi ya. Kalau di ekonomi pembangunan ini kita kan ada namanya laboratorium desa ya. Jadi mahasiswa kita itu, begitu masuk diberikan satu desa. *One class one village*. Harapannya kita itu kalau empat tahun, bagaimana merubah desa tertinggal menjadi desa yang mandiri. Itu bagaimana mengatasi *gap*, kita istilahnya mengirim sumber daya manusia kesana yaitu ke masyarakat desa di sekitar kita. Itu peran secara *real*. Karena kita menganggap bahwa di daerah kita ini sumber daya manusia nya yang kurang. Banyak ilmu yang kita transfer lah istilahnya dalam pembangunan masyarakat desa itu.
- S** : Kemudian pak, bagaimana saran maupun harapan bapak terhadap peningkatan variabel-variabel ini terhadap peingkatan daya saing daerah?
- N** : Kapasitas fiskal daerah, lemahnya pada identifikasi objek pajak. Misalkan, kos-kosan. *Government size*, harapannya ini kan pengeluaran rutin ya. Harapan kita bisa dinaikkan, agar pelayanan terhadap publik bisa maksimal. Ada semacam tunjangan kinerja. Sama dengan adanya tunjangan itu akan berdampak perbaikan layanan. Belanja pelayanan publik per kapita, harapan kita dinaikkan. Belanja pelayanan publik per kapita itu menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap publik. Terutama berkaitan dengan indikator SDM. Rasio ketergantungan, penduduk Bangkalan memiliki penduduk usia kerja yang tinggi. Namun daya saing tidak dilihat dari itu saja, tapi tidak punya skill penduduknya itu kurang bisa meningkatkan daya saing. Rata-rata lama sekolah, penting. Masih dibawah SD. Perlu ada peningkatan. Nilai tambah sektor pengangkutan, terutama di pedesaan harapannya bagaimana wilayah pedesaan itu bisa terbuka. Tidak terisolir, dapat

ditingkatkan aksesibilitasnya. Kondisi jalan, sebenarnya sudah cukup baik. Total investasi per kapita dan firm density, kemudahan perijinan dan birokrasi. Penduduk universitas, harapannya ada bantuan beasiswa untuk perguruan tinggi. Tingkat kepadatan penduduk, sudah cukup. Rasio volume usaha terhadap koperasi aktif, kegiatan koperasi belum banyak pembinaan dan pendampingan. Nilai tambah sektor keuangan, sudah bagus keadaannya. PDRB per kapita, pembukaan umkm atau sektor potensi lokal. Kita kan karakternya banyak yang bermigrasi ke Surabaya. Sehingga pengelolaan potensi lokal Bangkalan ditingkatkan agar bisa menyerap tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja, adanya pelatihan.

### **Lampiran 6. Posisi Variabel Lemahnya Daya Saing Kabupaten Bangkalan terhadap Penelitian Terdahulu**

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan posisi variabel-variabel kelemahan daya saing daerah Kabupaten Bangkalan tahun terakhir terhadap kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur berdasarkan penelitian terdahulu “Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur” (2014). Berdasarkan penelitian tersebut, penentuan variabel termasuk dalam kategori kelemahan/keunggulan/rata-rata adalah sebagai berikut:

<b>Nilai Standarisasi Variabel</b>	<b>Kategori Variabel</b>
Lebih besar dari batas keunggulan	Keunggulan
Antara batas kelemahan dan keunggulan	Rata-rata
Kurang dari batas kelemahan	Kelemahan

- batas kelemahan dihitung dari  $\rightarrow$  rata-rata  $- 0,5$ \*standar deviasi
- batas keunggulan dihitung dari  $\rightarrow$  rata-rata  $+ 0,5$ \*standar deviasi

*Government size* dan rasio ketergantungan memiliki makna kebalikan terhadap peningkatan daya saing daerah sesuai yang telah dijelaskan pada bab tinjauan pustaka.

### Kapasitas Fiskal Daerah

No	Kabupaten/Kota	Kapasitas Fiskal Daerah (rupiah/orang)	Nilai Standarisasi Kapasitas Fiskal Daerah
<b>Data Penelitian Terdahulu (2014)</b>			
1	Kabupaten Bangkalan	340,97	0,59
2	Kabupaten Banyuwangi	1136,86	1,97
3	Kabupaten Blitar	292,6	0,51
4	Kabupaten Bojonegoro	517,83	0,90
5	Kabupaten Bondowoso	424,86	0,74
6	Kabupaten Gresik	528,94	0,92
7	Kabupaten Jember	310,13	0,54
8	Kabupaten Jombang	312,71	0,54
9	Kabupaten Kediri	278,73	0,48
10	Kabupaten Lamongan	384,33	0,67
11	Kabupaten Lumajang	370,94	0,64
12	Kabupaten Madiun	410,27	0,71
13	Kabupaten Magetan	391,23	0,68
14	Kabupaten Malang	299,38	0,52
15	Kabupaten Mojokerto	388,58	0,67
16	Kabupaten Nganjuk	360,18	0,62
17	Kabupaten Ngawi	293,85	0,51
18	Kabupaten Pacitan	412,18	0,71
19	Kabupaten Pamekasan	391,86	0,68
20	Kabupaten Pasuruan	352,29	0,61
21	Kabupaten Ponorogo	265,23	0,46

No	Kabupaten/Kota	Kapasitas Fiskal Daerah (rupiah/orang)	Nilai Standarisasi Kapasitas Fiskal Daerah
22	Kabupaten Probolinggo	399,99	0,69
23	Kabupaten Sampang	352,25	0,61
24	Kabupaten Sidoarjo	481,12	0,83
25	Kabupaten Situbondo	448,97	0,78
26	Kabupaten Sumenep	442,52	0,77
27	Kabupaten Trenggalek	406,39	0,70
28	Kabupaten Tuban	289,52	0,50
29	Kabupaten Tulungagung	413,06	0,71
30	Kota Batu	1015,01	1,76
31	Kota Blitar	178,9	3,09
32	Kota Kediri	1146,65	1,98
33	Kota Madiun	1229,03	2,13
34	Kota Malang	658,59	1,14
35	Kota Mojokerto	2036,56	3,52
36	Kota Pasuruan	772,07	1,34
37	Kota Probolinggo	869,39	1,50
38	Kota Surabaya	746,41	1,29
<b>Total</b>		21955,38	
<b>Rata-Rata</b>		577,77	
<b>Standar Deviasi</b>			0,71
<b>Batas Keunggulan</b>			1,36
<b>Batas Kelemahan</b>			0,64
<b>Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bangkalan (2014)</b>		Kategori kelemahan	

No	Kabupaten/Kota	Kapasitas Fiskal Daerah (rupiah/orang)	Nilai Standarisasi Kapasitas Fiskal Daerah
<b>Data Penelitian Saat Ini (2019)</b>			
Kabupaten Bangkalan		635,24	1,10
<b>Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bangkalan (2019)</b>		Kategori rata-rata	

### *Government Size*

No	Kabupaten/Kota	<i>Government Size</i> (ribu rupiah)	Nilai Standarisasi <i>Government Size</i>
<b>Data Penelitian Terdahulu (2014)</b>			
1	Kabupaten Bangkalan	0,238	1,44
2	Kabupaten Banyuwangi	0,108	0,65
3	Kabupaten Blitar	0,155	0,94
4	Kabupaten Bojonegoro	0,116	0,70
5	Kabupaten Bondowoso	0,184	1,11
6	Kabupaten Gresik	0,059	0,36
7	Kabupaten Jember	0,116	0,70
8	Kabupaten Jombang	0,145	0,88
9	Kabupaten Kediri	0,13	0,78
10	Kabupaten Lamongan	0,14	0,84
11	Kabupaten Lumajang	0,162	0,98
12	Kabupaten Madiun	0,198	1,19

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Government Size (ribu rupiah)</b>	<b>Nilai Standarisasi Government Size</b>
13	Kabupaten Magetan	0,222	1,34
14	Kabupaten Malang	0,08	0,48
15	Kabupaten Mojokerto	0,07	0,42
16	Kabupaten Nganjuk	0,066	0,40
17	Kabupaten Ngawi	0,235	1,42
18	Kabupaten Pacitan	0,448	2,70
19	Kabupaten Pamekasan	0,429	2,59
20	Kabupaten Pasuruan	0,149	0,90
21	Kabupaten Ponorogo	0,272	1,64
22	Kabupaten Probolinggo	0,151	0,91
23	Kabupaten Sampang	0,25	1,51
24	Kabupaten Sidoarjo	0,052	0,31
25	Kabupaten Situbondo	0,196	1,18
26	Kabupaten Sumenep	0,231	1,39
27	Kabupaten Trenggalek	0,279	1,68
28	Kabupaten Tuban	0,123	0,74
29	Kabupaten Tulungagung	0,14	0,84
30	Kota Batu	0,056	0,34
31	Kota Blitar	0,253	1,53
32	Kota Kediri	0,025	0,001
33	Kota Madiun	0,182	1,10
34	Kota Malang	0,04	0,24
35	Kota Mojokerto	0,192	1,16
36	Kota Pasuruan	0,199	1,20

No	Kabupaten/Kota	<i>Government Size</i> (ribu rupiah)	Nilai Standarisasi <i>Government Size</i>
37	Kota Probolinggo	0,187	1,13
38	Kota Surabaya	0,019	0,11
<b>Total</b>		6,297	
<b>Rata-Rata</b>		0,17	
<b>Standar Deviasi</b>			0,59
<b>Batas Keunggulan</b>			1,29
<b>Batas Kelemahan</b>			0,70
<i>Government Size</i> <b>Kabupaten Bangkalan (2014)</b>		Kategori kelemahan	
<b>Data Penelitian Saat Ini (2019)</b>			
Kabupaten Bangkalan		0,13	0,79
<i>Government Size</i> <b>Kabupaten Bangkalan (2019)</b>		Kategori rata-rata	

### Belanja Pelayanan Publik per Kapita

No	Kabupaten/Kota	Belanja Pelayanan Publik per Kapita (rupiah/oran g)	Nilai Standarisa si Belanja Pelayanan Publik per Kapita
<b>Data Penelitian Terdahulu (2014)</b>			
1	Kabupaten Bangkalan	11,08	0,23
2	Kabupaten Banyuwangi	79,80	1,80
3	Kabupaten Blitar	6,75	0,14

4	Kabupaten Bojonegoro	76,02	1,56
5	Kabupaten Bondowoso	26,85	0,55
6	Kabupaten Gresik	130,09	2,67
7	Kabupaten Jember	99,80	2,05
8	Kabupaten Jombang	15,65	0,32
9	Kabupaten Kediri	141,46	2,91
10	Kabupaten Lamongan	63,39	1,30
11	Kabupaten Lumajang	22,36	0,46
12	Kabupaten Madiun	29,41	0,60
13	Kabupaten Magetan	37,86	0,78
14	Kabupaten Malang	36,98	0,76
15	Kabupaten Mojokerto	49,51	1,02
16	Kabupaten Nganjuk	12,48	0,26
17	Kabupaten Ngawi	32,94	0,68
18	Kabupaten Pacitan	5,51	0,11
19	Kabupaten Pamekasan	12,86	0,26
20	Kabupaten Pasuruan	61,14	1,26
21	Kabupaten Ponorogo	3,45	0,07
22	Kabupaten Probolinggo	8,14	0,17
23	Kabupaten Sampang	3,92	0,08
24	Kabupaten Sidoarjo	96,01	1,97
25	Kabupaten Situbondo	54,57	1,12
26	Kabupaten Sumenep	9,51	0,20
27	Kabupaten Trenggalek	5,64	0,12
28	Kabupaten Tuban	13,38	0,27
29	Kabupaten Tulungagung	11,49	0,24
30	Kota Batu	47,16	0,97
31	Kota Blitar	15,52	0,32
32	Kota Kediri	25,77	0,53

33	Kota Madiun	81,23	1,67
34	Kota Malang	122,73	2,52
35	Kota Mojokerto	129,48	2,66
36	Kota Pasuruan	107,55	2,21
37	Kota Probolinggo	17,04	0,35
38	Kota Surabaya	144,97	2,98
<b>Total</b>		184,5	
<b>Rata-Rata</b>		48,67	
<b>Standar Deviasi</b>			0,92
<b>Batas Keunggulan</b>			1,46
<b>Batas Kelemahan</b>			0,55
<b>Belanja Pelayanan Publik per Kapita Kabupaten Bangkalan (2014)</b>		Kategori kelemahan	
<b>Data Penelitian Saat Ini (2019)</b>			
Kabupaten Bangkalan		342,55	7,04
<b>Belanja Pelayanan Publik per Kapita Kabupaten Bangkalan (2019)</b>		Kategori keunggulan	

#### Rasio Ketergantungan

No	Kabupaten/Kota	Rasio Ketergantungan (persen)	Nilai Standarisasi Rasio Ketergantungan
<b>Data Penelitian Terdahulu (2014)</b>			
1	Kabupaten Bangkalan	0,56	1,20
2	Kabupaten Banyuwangi	0,5	1,07
3	Kabupaten Blitar	0,51	1,09

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rasio Ketergantungan (persen)</b>	<b>Nilai Standarisasi Rasio Ketergantungan</b>
4	Kabupaten Bojonegoro	0,45	0,96
5	Kabupaten Bondowoso	0,51	1,09
6	Kabupaten Gresik	0,44	0,94
7	Kabupaten Jember	0,5	1,07
8	Kabupaten Jombang	0,49	1,05
9	Kabupaten Kediri	0,5	1,07
10	Kabupaten Lamongan	0,46	0,98
11	Kabupaten Lumajang	0,47	1,00
12	Kabupaten Madiun	0,49	1,05
13	Kabupaten Magetan	0,52	1,11
14	Kabupaten Malang	0,49	1,05
15	Kabupaten Mojokerto	0,43	0,92
16	Kabupaten Nganjuk	0,49	1,05
17	Kabupaten Ngawi	0,48	1,03
18	Kabupaten Pacitan	0,51	1,09
19	Kabupaten Pamekasan	0,47	1,00
20	Kabupaten Pasuruan	0,42	0,90
21	Kabupaten Ponorogo	0,48	1,03
22	Kabupaten Probolinggo	0,47	1,00
23	Kabupaten Sampang	0,44	0,94
24	Kabupaten Sidoarjo	0,42	0,90
25	Kabupaten Situbondo	0,43	0,92

No	Kabupaten/Kota	Rasio Ketergantungan (persen)	Nilai Standarisasi Rasio Ketergantungan
26	Kabupaten Sumenep	0,44	0,94
27	Kabupaten Trenggalek	0,46	0,98
28	Kabupaten Tuban	0,44	0,94
29	Kabupaten Tulungagung	0,49	1,05
30	Kota Batu	0,47	1,00
31	Kota Blitar	0,47	1,00
32	Kota Kediri	0,45	0,96
33	Kota Madiun	0,45	0,96
34	Kota Malang	0,4	0,85
35	Kota Mojokerto	0,45	0,96
36	Kota Pasuruan	0,47	1,00
37	Kota Probolinggo	0,48	1,03
38	Kota Surabaya	0,38	0,81
<b>Total</b>		17,78	
<b>Rata-Rata</b>		0,47	
<b>Standar Deviasi</b>			0,08
<b>Batas Keunggulan</b>			1,04
<b>Batas Kelemahan</b>			0,96
<b>Rasio Ketergantungan Kabupaten Bangkalan (2014)</b>		Kategori kelemahan	
<b>Data Penelitian Saat Ini (2019)</b>			
Kabupaten Bangkalan		0,53	1,13
<b>Rasio Ketergantungan Kabupaten Bangkalan (2019)</b>		Kategori kelemahan	

**Rata-Rata Lama Sekolah**

No	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Nilai Standarisasi Rata-Rata Lama Sekolah
<b>Data Penelitian Terdahulu (2014)</b>			
1	Kabupaten Bangkalan	5,74	0,76
2	Kabupaten Banyuwangi	7,25	0,96
3	Kabupaten Blitar	7,2	0,95
4	Kabupaten Bojonegoro	6,67	0,88
5	Kabupaten Bondowoso	5,94	0,78
6	Kabupaten Gresik	8,98	1,18
7	Kabupaten Jember	6,24	0,82
8	Kabupaten Jombang	8,04	1,06
9	Kabupaten Kediri	7,62	1,01
10	Kabupaten Lamongan	7,59	1,00
11	Kabupaten Lumajang	6,18	0,82
12	Kabupaten Madiun	7,3	0,96
13	Kabupaten Magetan	7,85	1,04
14	Kabupaten Malang	7,08	0,93
15	Kabupaten Mojokerto	7,94	1,05
16	Kabupaten Nganjuk	7,61	1,00
17	Kabupaten Ngawi	6,76	0,89
18	Kabupaten Pacitan	6,71	0,89
19	Kabupaten Pamekasan	6,32	0,83
20	Kabupaten Pasuruan	6,83	0,90
21	Kabupaten Ponorogo	7,18	0,95
22	Kabupaten Probolinggo	5,94	0,78

No	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Nilai Standarisasi Rata-Rata Lama Sekolah
23	Kabupaten Sampang	4,12	0,54
24	Kabupaten Sidoarjo	9,92	1,31
25	Kabupaten Situbondo	5,81	0,77
26	Kabupaten Sumenep	5,35	0,71
27	Kabupaten Trenggalek	7,31	0,96
28	Kabupaten Tuban	6,53	0,86
29	Kabupaten Tulungagung	7,95	1,05
30	Kota Batu	8,32	1,10
31	Kota Blitar	9,37	1,24
32	Kota Kediri	9,8	1,29
33	Kota Madiun	10,24	1,35
34	Kota Malang	10,6	1,40
35	Kota Mojokerto	10,11	1,33
36	Kota Pasuruan	9,05	1,19
37	Kota Probolinggo	8,67	1,14
38	Kota Surabaya	9,96	1,31
<b>Total</b>		288,08	
<b>Rata-Rata</b>		7,58	
<b>Standar Deviasi</b>			0,20
<b>Batas Keunggulan</b>			1,10
<b>Batas Kelemahan</b>			0,899
<b>Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangkalan (2014)</b>		Kategori kelemahan	
<b>Data Penelitian Saat Ini (2019)</b>			
Kabupaten Bangkalan		5,14	0,68

No	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Nilai Standarisasi Rata-Rata Lama Sekolah
<b>Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangkalan (2019)</b>		Kategori kelemahan	

### Angka Harapan Hidup

No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Nilai Standarisasi Angka Harapan Hidup
<b>Data Penelitian Terdahulu (2014)</b>			
1	Kabupaten Bangkalan	63,64	0,93
2	Kabupaten Banyuwangi	68,12	0,99
3	Kabupaten Blitar	71,19	1,04
4	Kabupaten Bojonegoro	67,35	0,98
5	Kabupaten Bondowoso	63,79	0,93
6	Kabupaten Gresik	71,35	1,04
7	Kabupaten Jember	63,22	0,92
8	Kabupaten Jombang	70,32	1,02
9	Kabupaten Kediri	70,25	1,02
10	Kabupaten Lamongan	68,45	1,00
11	Kabupaten Lumajang	67,56	0,98
12	Kabupaten Madiun	69,22	1,01
13	Kabupaten Magetan	71,5	1,04
14	Kabupaten Malang	69,44	1,01
15	Kabupaten Mojokerto	70,53	1,03

No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Nilai Standarisasi Angka Harapan Hidup
16	Kabupaten Nganjuk	69,24	1,01
17	Kabupaten Ngawi	70,47	1,03
18	Kabupaten Pacitan	71,58	1,04
19	Kabupaten Pamekasan	66,54	0,97
20	Kabupaten Pasuruan	64,47	0,94
21	Kabupaten Ponorogo	70,48	1,03
22	Kabupaten Probolinggo	61,52	0,89
23	Kabupaten Sampang	63,66	0,93
24	Kabupaten Sidoarjo	70,99	1,03
25	Kabupaten Situbondo	63,55	0,92
26	Kabupaten Sumenep	65,1	0,95
27	Kabupaten Trenggalek	72,02	1,05
28	Kabupaten Tuban	68,24	0,99
29	Kabupaten Tulungagung	71,8	1,04
30	Kota Batu	69,92	1,02
31	Kota Blitar	72,71	1,06
32	Kota Kediri	70,78	1,03
33	Kota Madiun	71,36	1,04
34	Kota Malang	70,82	1,03
35	Kota Mojokerto	71,85	1,05
36	Kota Pasuruan	67,14	0,98
37	Kota Probolinggo	70,68	1,03
38	Kota Surabaya	71,38	1,04
<b>Total</b>		2612,23	

No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Nilai Standarisasi Angka Harapan Hidup
<b>Rata-Rata</b>		68,74	
<b>Standar Deviasi</b>			0,04
<b>Batas Keunggulan</b>			1,02
<b>Batas Kelemahan</b>			0,98
<b>Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangkalan (2014)</b>		Kategori kelemahan	
<b>Data Penelitian Saat Ini (2019)</b>			
Kabupaten Bangkalan		69,82	1,02
<b>Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangkalan (2019)</b>		Kategori rata-rata	

### Kondisi Jalan Menurut Kualitas Jalan

No	Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Menurut Kualitas Jalan (km)	Nilai Standarisasi i Kondisi Jalan Menurut Kualitas Jalan
<b>Data Penelitian Terdahulu (2014)</b>			
1	Kabupaten Bangkalan	48490	0,19
2	Kabupaten Banyuwangi	213550	0,86
3	Kabupaten Blitar	41067	0,17
4	Kabupaten Bojonegoro	444599	1,79
5	Kabupaten Bondowoso	16597	0,07
6	Kabupaten Gresik	328133	1,32

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Kondisi Jalan Menurut Kualitas Jalan (km)</b>	<b>Nilai Standarisasi Kondisi Jalan Menurut Kualitas Jalan</b>
7	Kabupaten Jember	604305	2,43
8	Kabupaten Jombang	294874	1,19
9	Kabupaten Kediri	202089	0,81
10	Kabupaten Lamongan	563138	2,26
11	Kabupaten Lumajang	586261	2,36
12	Kabupaten Madiun	103433	0,42
13	Kabupaten Magetan	231495	0,93
14	Kabupaten Malang	513857	2,07
15	Kabupaten Mojokerto	607333	2,44
16	Kabupaten Nganjuk	376252	1,51
17	Kabupaten Ngawi	269308	1,08
18	Kabupaten Pacitan	93469	0,38
19	Kabupaten Pamekasan	192004	0,77
20	Kabupaten Pasuruan	211847,86	0,85
21	Kabupaten Ponorogo	10051,09	0,04
22	Kabupaten Probolinggo	20362	0,08
23	Kabupaten Sampang	103854	0,42
24	Kabupaten Sidoarjo	432496	1,74
25	Kabupaten Situbondo	71224	0,29
26	Kabupaten Sumenep	52946	0,21
27	Kabupaten Trenggalek	41067	0,17
28	Kabupaten Tuban	419668	1,69
29	Kabupaten Tulungagung	92936	0,37

No	Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan Menurut Kualitas Jalan (km)	Nilai Standarisasi Kondisi Jalan Menurut Kualitas Jalan
30	Kota Batu	51108	0,21
31	Kota Blitar	272613	1,10
32	Kota Kediri	233009	0,94
33	Kota Madiun	110247	0,44
34	Kota Malang	438435	1,76
35	Kota Mojokerto	101129	0,41
36	Kota Pasuruan	167458	0,67
37	Kota Probolinggo	187188	0,75
38	Kota Surabaya	707184	2,84
<b>Total</b>		9455076,9 5	
<b>Rata-Rata</b>		248817,81	
<b>Standar Deviasi</b>			0,80
<b>Batas Keunggulan</b>			1,40
<b>Batas Kelemahan</b>			0,60
<b>Kondisi Jalan Menurut Kualitas Jalan Kabupaten Bangkalan (2014)</b>		Kategori kelemahan	
<b>Data Penelitian Saat Ini (2019)</b>			
Kabupaten Bangkalan		312363	1,26
<b>Kondisi Jalan Menurut Kualitas Jalan Kabupaten Bangkalan (2019)</b>		Kategori rata-rata	

### Nilai Tambah Sektor Pengangkutan per Kapita

No	Kabupaten/Kota	Nilai Tambah Sektor Pengangkutan per Kapita (km)	Nilai Standarisasi Nilai Tambah Sektor Pengangkutan per Kapita
<b>Data Penelitian Terdahulu (2014)</b>			
1	Kabupaten Bangkalan	319,982	0,19
2	Kabupaten Banyuwangi	585,757	0,35
3	Kabupaten Blitar	218,417	0,13
4	Kabupaten Bojonegoro	854,104	0,52
5	Kabupaten Bondowoso	145,062	0,09
6	Kabupaten Gresik	964,802	0,58
7	Kabupaten Jember	458,761	0,28
8	Kabupaten Jombang	761,569	0,46
9	Kabupaten Kediri	371,976	0,23
10	Kabupaten Lamongan	1097,864	0,66
11	Kabupaten Lumajang	325,685	0,20
12	Kabupaten Madiun	622,414	0,38
13	Kabupaten Magetan	173,809	0,11
14	Kabupaten Malang	829,163	0,50
15	Kabupaten Mojokerto	1987,039	1,20
16	Kabupaten Nganjuk	296,959	0,18
17	Kabupaten Ngawi	392,763	0,24
18	Kabupaten Pacitan	203,32	0,12
19	Kabupaten Pamekasan	328,107	0,20
20	Kabupaten Pasuruan	1006,16	0,61

No	Kabupaten/Kota	Nilai Tambah Sektor Pengangkuatan per Kapita (km)	Nilai Standarisasi Nilai Tambah Sektor Pengangkuatan per Kapita
21	Kabupaten Ponorogo	357,382	0,22
22	Kabupaten Probolinggo	736,824	0,45
23	Kabupaten Sampang	111,865	0,07
24	Kabupaten Sidoarjo	1326,517	0,80
25	Kabupaten Situbondo	611,435	0,37
26	Kabupaten Sumenep	96,558	0,06
27	Kabupaten Trenggalek	209,65	0,13
28	Kabupaten Tuban	723,994	0,44
29	Kabupaten Tulungagung	601,074	0,36
30	Kota Batu	1404,575	0,85
31	Kota Blitar	8035,929	4,86
32	Kota Kediri	5071,493	3,07
33	Kota Madiun	5287,233	3,20
34	Kota Malang	3398,122	2,06
35	Kota Mojokerto	10695,361	6,47
36	Kota Pasuruan	6445,606	3,90
37	Kota Probolinggo	4324,196	2,62
38	Kota Surabaya	1392,577	0,84
<b>Total</b>		62774,104	
<b>Rata-Rata</b>		1651,95	
<b>Standar Deviasi</b>			1,47
<b>Batas Keunggulan</b>			1,74

No	Kabupaten/Kota	Nilai Tambah Sektor Pengangkutan per Kapita (km)	Nilai Standarisasi Nilai Tambah Sektor Pengangkutan per Kapita
<b>Batas Kelemahan</b>			0,26
<b>Nilai Tambah Sektor Pengangkutan per Kapita (2014)</b>		Kategori kelemahan	
<b>Data Penelitian Saat Ini (2019)</b>			
Kabupaten Bangkalan		236,7921	0,14
<b>Nilai Tambah Sektor Pengangkutan per Kapita (2019)</b>		Kategori kelemahan	

### Total Investasi per Kapita

No	Kabupaten/Kota	Total Investasi per Kapita (ribu rupiah)	Nilai Standarisasi Total Investasi per Kapita
<b>Data Penelitian Terdahulu (2014)</b>			
1	Kabupaten Bangkalan	861,7	0,43
2	Kabupaten Banyuwangi	2959,34	1,47
3	Kabupaten Blitar	1110,79	0,55
4	Kabupaten Bojonegoro	1726,98	0,86
5	Kabupaten Bondowoso	441,91	0,22
6	Kabupaten Gresik	2187,17	1,08
7	Kabupaten Jember	2069,83	1,03
8	Kabupaten Jombang	1278,89	0,63

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Total Investasi per Kapita (ribu rupiah)</b>	<b>Nilai Standarisasi Total Investasi per Kapita</b>
9	Kabupaten Kediri	991,53	0,49
10	Kabupaten Lamongan	3988,36	1,98
11	Kabupaten Lumajang	835,1	0,41
12	Kabupaten Madiun	695,02	0,34
13	Kabupaten Magetan	487,39	0,24
14	Kabupaten Malang	3749,58	1,86
15	Kabupaten Mojokerto	1817,72	0,90
16	Kabupaten Nganjuk	318,02	0,16
17	Kabupaten Ngawi	395,24	0,20
18	Kabupaten Pacitan	265,37	0,13
19	Kabupaten Pamekasan	521,76	0,26
20	Kabupaten Pasuruan	3616,23	1,79
21	Kabupaten Ponorogo	488,25	0,24
22	Kabupaten Probolinggo	508,25	0,25
23	Kabupaten Sampang	462,35	0,23
24	Kabupaten Sidoarjo	6627,64	3,28
25	Kabupaten Situbondo	1027,43	0,51
26	Kabupaten Sumenep	446,87	0,22
27	Kabupaten Trenggalek	972,32	0,48
28	Kabupaten Tuban	2010,54	1,00
29	Kabupaten Tulungagung	490,18	0,24
30	Kota Batu	7342,77	3,64
31	Kota Blitar	1294,73	0,64
32	Kota Kediri	2082,89	1,03
33	Kota Madiun	1206,15	0,60

No	Kabupaten/Kota	Total Investasi per Kapita (ribu rupiah)	Nilai Standarisasi Total Investasi per Kapita
34	Kota Malang	6283,99	3,11
35	Kota Mojokerto	2577,22	1,28
36	Kota Pasuruan	1507,72	0,75
37	Kota Probolinggo	2017,28	1,00
38	Kota Surabaya	9002,63	4,46
<b>Total</b>		76667,14	
<b>Rata-Rata</b>		2017,56	
<b>Standar Deviasi</b>			1,05
<b>Batas Keunggulan</b>			1,52
<b>Batas Kelemahan</b>			0,48
<b>Total Investasi per Kapita Kabupaten Bangkalan (2014)</b>		Kategori kelemahan	
<b>Data Penelitian Saat Ini (2019)</b>			
Kabupaten Bangkalan		288,98307	0,14
<b>Total Investasi per Kapita Kabupaten Bangkalan (2019)</b>		Kategori kelemahan	

*Firm Density*

No	Kabupaten/Kota	<i>Firm Density</i> (jumlah industri atau perusahaan/km <sup>2</sup> )	Nilai Standarisasi <i>i Firm Density</i>
<b>Data Penelitian Terdahulu (2014)</b>			
1	Kabupaten Bangkalan	11,72	0,45

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b><i>Firm Density</i> (jumlah industri atau perusahaan/km<sup>2</sup>)</b>	<b>Nilai Standarisasi <i>Firm Density</i></b>
2	Kabupaten Banyuwangi	17,8	0,68
3	Kabupaten Blitar	18,48	0,71
4	Kabupaten Bojonegoro	10,73	0,41
5	Kabupaten Bondowoso	11,96	0,46
6	Kabupaten Gresik	40,64	1,55
7	Kabupaten Jember	10,21	0,39
8	Kabupaten Jombang	20,89	0,80
9	Kabupaten Kediri	11	0,42
10	Kabupaten Lamongan	19,44	0,74
11	Kabupaten Lumajang	7,72	0,29
12	Kabupaten Madiun	37,71	1,44
13	Kabupaten Magetan	36,74	1,40
14	Kabupaten Malang	46,22	1,77
15	Kabupaten Mojokerto	46,92	1,79
16	Kabupaten Nganjuk	9,34	0,36
17	Kabupaten Ngawi	10,89	0,42
18	Kabupaten Pacitan	19,75	0,75
19	Kabupaten Pamekasan	17,35	0,66
20	Kabupaten Pasuruan	59,46	2,27
21	Kabupaten Ponorogo	11,73	0,45
22	Kabupaten Probolinggo	8,08	0,31
23	Kabupaten Sampang	7,32	0,28
24	Kabupaten Sidoarjo	50,69	1,94
25	Kabupaten Situbondo	7,75	0,30

No	Kabupaten/Kota	<i>Firm Density</i> (jumlah industri atau perusahaan/km <sup>2</sup> )	Nilai Standarisasi <i>Firm Density</i>
26	Kabupaten Sumenep	13,27	0,51
27	Kabupaten Trenggalek	26,8	1,02
28	Kabupaten Tuban	29,04	1,11
29	Kabupaten Tulungagung	27,26	1,04
30	Kota Batu	16,29	0,62
31	Kota Blitar	36,48	1,39
32	Kota Kediri	26,25	1,00
33	Kota Madiun	44,38	1,69
34	Kota Malang	49,89	1,91
35	Kota Mojokerto	38,65	1,48
36	Kota Pasuruan	53,24	2,03
37	Kota Probolinggo	38,27	1,46
38	Kota Surabaya	44,69	1,71
<b>Total</b>		995,05	
<b>Rata-Rata</b>		26,19	
<b>Standar Deviasi</b>			0,60
<b>Batas Keunggulan</b>			1,30
<b>Batas Kelemahan</b>			0,70
<i>Firm Density</i> Kabupaten Bangkalan (2014)		Kategori kelemahan	
<b>Data Penelitian Saat Ini (2019)</b>			
Kabupaten Bangkalan		40,79	1,56
<i>Firm Density</i> Kabupaten Bangkalan (2019)		Kategori keunggulan	

**Presentase Penduduk dengan Tamatan Pendidikan Tinggi Universitas**

No	Kabupaten/Kota	Presentase Penduduk dengan Tamatan Pendidikan Tinggi Universitas (persen)	Nilai Standarisasi Presentase Penduduk dengan Tamatan Pendidikan Tinggi Universitas
<b>Data Penelitian Terdahulu (2014)</b>			
1	Kabupaten Bangkalan	0,017	0,36
2	Kabupaten Banyuwangi	0,022	0,47
3	Kabupaten Blitar	0,027	0,57
4	Kabupaten Bojonegoro	0,018	0,38
5	Kabupaten Bondowoso	0,037	0,78
6	Kabupaten Gresik	0,062	1,31
7	Kabupaten Jember	0,017	0,36
8	Kabupaten Jombang	0,035	0,74
9	Kabupaten Kediri	0,032	0,68
10	Kabupaten Lamongan	0,034	0,72
11	Kabupaten Lumajang	0,014	0,30

12	Kabupaten Madiun	0,036	0,76
13	Kabupaten Magetan	0,065	1,38
14	Kabupaten Malang	0,021	0,44
15	Kabupaten Mojokerto	0,034	0,72
16	Kabupaten Nganjuk	0,22	4,66
17	Kabupaten Ngawi	0,029	0,61
18	Kabupaten Pacitan	0,026	0,55
19	Kabupaten Pamekasan	0,035	0,74
20	Kabupaten Pasuruan	0,029	0,61
21	Kabupaten Ponorogo	0,045	0,95
22	Kabupaten Probolinggo	0,024	0,51
23	Kabupaten Sampang	0,016	0,34
24	Kabupaten Sidoarjo	0,072	1,53
25	Kabupaten Situbondo	0,023	0,49
26	Kabupaten Sumenep	0,017	0,36
27	Kabupaten Trenggalek	0,018	0,38
28	Kabupaten Tuban	0,017	0,36
29	Kabupaten Tulungagung	0,032	0,68
30	Kota Batu	0,064	1,36
31	Kota Blitar	0,113	2,39
32	Kota Kediri	0,085	1,80
33	Kota Madiun	0,081	1,72
34	Kota Malang	0,1	2,12
35	Kota Mojokerto	0,05	1,06
36	Kota Pasuruan	0,067	1,42
37	Kota Probolinggo	0,091	1,93
38	Kota Surabaya	0,069	1,46
<b>Total</b>		1,794	
<b>Rata-Rata</b>		0,05	

<b>Standar Deviasi</b>		0,83	
<b>Batas Keunggulan</b>		1,41	
<b>Batas Kelemahan</b>		0,59	
<b>Presentase Penduduk dengan Tamatan Pendidikan Tinggi Universitas Kabupaten Bangkalan (2014)</b>		Kategori kelemahan	
<b>Data Penelitian Saat Ini (2019)</b>			
Kabupaten Bangkalan		0,025	0,53
<b>Presentase Penduduk dengan Tamatan Pendidikan Tinggi Universitas Kabupaten Bangkalan</b>		Kategori kelemahan	

### Tingkat Kepadatan Penduduk

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Kepadatan Penduduk (orang/km <sup>2</sup> )	Nilai Standarisasi Tingkat Kepadatan Penduduk
<b>Data Penelitian Terdahulu (2014)</b>			
1	Kabupaten Bangkalan	701,53	0,40
2	Kabupaten Banyuwangi	435,1	0,25
3	Kabupaten Blitar	638,05	0,36
4	Kabupaten Bojonegoro	522,68	0,30
5	Kabupaten Bondowoso	478,19	0,27
6	Kabupaten Gresik	956,13	0,54
7	Kabupaten Jember	710,28	0,40
8	Kabupaten Jombang	1076,32	0,61
9	Kabupaten Kediri	987,05	0,56
10	Kabupaten Lamongan	677,23	0,38
11	Kabupaten Lumajang	559,33	0,32

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Kepadatan Penduduk (orang/km <sup>2</sup> )	Nilai Standarisasi Tingkat Kepadatan Penduduk
12	Kabupaten Madiun	590,89	0,33
13	Kabupaten Magetan	880,41	0,50
14	Kabupaten Malang	711,22	0,40
15	Kabupaten Mojokerto	1060,69	0,60
16	Kabupaten Nganjuk	788,78	0,45
17	Kabupaten Ngawi	588,05	0,33
18	Kabupaten Pacitan	379,52	0,21
19	Kabupaten Pamekasan	1007,55	0,57
20	Kabupaten Pasuruan	1026,16	0,58
21	Kabupaten Ponorogo	603,66	0,34
22	Kabupaten Probolinggo	641,54	0,36
23	Kabupaten Sampang	725,19	0,41
24	Kabupaten Sidoarjo	2743,9	1,55
25	Kabupaten Situbondo	392,65	0,22
26	Kabupaten Sumenep	503,24	0,28
27	Kabupaten Trenggalek	540,01	0,31
28	Kabupaten Tuban	566,51	0,32
29	Kabupaten Tulungagung	862,5	0,49
30	Kota Batu	964,04	0,55
31	Kota Blitar	3744,79	2,12
32	Kota Kediri	4054,55	2,29
33	Kota Madiun	5069,15	2,87
34	Kota Malang	7537,22	4,26
35	Kota Mojokerto	6082,25	3,44
36	Kota Pasuruan	4961,71	2,81

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Kepadatan Penduduk (orang/km <sup>2</sup> )	Nilai Standarisasi Tingkat Kepadatan Penduduk
37	Kota Probolinggo	3930,11	2,22
38	Kota Surabaya	8459,88	4,79
<b>Total</b>		67158,06	
<b>Rata-Rata</b>		1767,32	
<b>Standar Deviasi</b>			1,20
<b>Batas Keunggulan</b>			1,60
<b>Batas Kelemahan</b>			0,40
<b>Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangkalan (2014)</b>		Kategori kelemahan	
<b>Data Penelitian Saat Ini (2019)</b>			
Kabupaten Bangkalan		849,6	0,48
<b>Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangkalan (2019)</b>		Kategori rata-rata	

### Rasio Volume Usaha terhadap Koperasi Aktif

No	Kabupaten/Kota	Rasio Volume Usaha terhadap Koperasi Aktif	Nilai Standarisasi Rasio Volume Usaha terhadap Koperasi Aktif
<b>Data Penelitian Terdahulu (2014)</b>			
1	Kabupaten Bangkalan	80625512,4 4	0,18
2	Kabupaten Banyuwangi	512845370,	1,15

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Rasio Volume Usaha terhadap Koperasi Aktif</b>	<b>Nilai Standarisa si Rasio Volume Usaha terhadap Koperasi Aktif</b>
		9	
3	Kabupaten Blitar	173617471, 9	0,39
4	Kabupaten Bojonegoro	83168834,8 9	0,19
5	Kabupaten Bondowoso	218169497, 6	0,49
6	Kabupaten Gresik	108891943 1	2,44
7	Kabupaten Jember	424834070, 7	0,95
8	Kabupaten Jombang	277631777, 4	0,62
9	Kabupaten Kediri	743263902, 7	1,67
10	Kabupaten Lamongan	111844288 4	2,51
11	Kabupaten Lumajang	261368875, 6	0,59
12	Kabupaten Madiun	494081859	1,11
13	Kabupaten Magetan	299225608, 8	0,67
14	Kabupaten Malang	113761912 7	2,55
15	Kabupaten Mojokerto	810051407, 07	1,82
16	Kabupaten Nganjuk	58454973,8 8	0,13
17	Kabupaten Ngawi	157569499,	0,35

No	Kabupaten/Kota	Rasio Volume Usaha terhadap Koperasi Aktif	Nilai Standarisasi Rasio Volume Usaha terhadap Koperasi Aktif
		3	
18	Kabupaten Pacitan	202297311,4	0,45
19	Kabupaten Pamekasan	170953183,2	0,38
20	Kabupaten Pasuruan	885536492,1	1,99
21	Kabupaten Ponorogo	64323839,6	0,14
22	Kabupaten Probolinggo	443755072,7	1,00
23	Kabupaten Sampang	104243138,3	0,23
24	Kabupaten Sidoarjo	708889578,9	1,59
25	Kabupaten Situbondo	382618435,6	0,86
26	Kabupaten Sumenep	72531950,4	0,16
27	Kabupaten Trenggalek	258244982,4	0,58
28	Kabupaten Tuban	784782701	1,76
29	Kabupaten Tulungagung	511795286,7	1,15
30	Kota Batu	803013494,6	1,80
31	Kota Blitar	403435784,6	0,91
32	Kota Kediri	233080735,	0,52

No	Kabupaten/Kota	Rasio Volume Usaha terhadap Koperasi Aktif	Nilai Standarisasi Rasio Volume Usaha terhadap Koperasi Aktif
		4	
33	Kota Madiun	647896015, 2	1,45
34	Kota Malang	715617135, 4	1,61
35	Kota Mojokerto	428003864, 7	0,96
36	Kota Pasuruan	123321691, 3	0,28
37	Kota Probolinggo	449292699, 6	1,01
38	Kota Surabaya	593303463	1,33
<b>Total</b>		169268269 60	
<b>Rata-Rata</b>		445442814, 7	
<b>Standar Deviasi</b>			0,71
<b>Batas Keunggulan</b>			1,35
<b>Batas Kelemahan</b>			0,65
<b>Rasio Volume Usaha terhadap Koperasi Aktif Kabupaten Bangkalan (2014)</b>		Kategori kelemahan	
<b>Data Penelitian Saat Ini (2019)</b>			
Kabupaten Bangkalan		250671260	0,56
<b>Rasio Volume Usaha terhadap Koperasi Aktif Kabupaten Bangkalan (2019)</b>		Kategori kelemahan	

### Nilai Tambah Sektor Keuangan per Kapita

No	Kabupaten/Kota	Nilai Tambah Sektor Keuangan per Kapita	Nilai Standarisasi Nilai Tambah Sektor Keuangan per Kapita
<b>Data Penelitian Terdahulu (2014)</b>			
1	Kabupaten Bangkalan	132,32	0,20
2	Kabupaten Banyuwangi	631,9	0,96
3	Kabupaten Blitar	279,02	0,42
4	Kabupaten Bojonegoro	397,92	0,61
5	Kabupaten Bondowoso	182,47	0,28
6	Kabupaten Gresik	917	1,40
7	Kabupaten Jember	708,2	1,08
8	Kabupaten Jombang	93,48	0,14
9	Kabupaten Kediri	391,31	0,60
10	Kabupaten Lamongan	1279	1,95
11	Kabupaten Lumajang	344,39	0,52
12	Kabupaten Madiun	37	0,06
13	Kabupaten Magetan	332,75	0,51
14	Kabupaten Malang	960	1,46
15	Kabupaten Mojokerto	979,66	1,49
16	Kabupaten Nganjuk	195,33	0,30
17	Kabupaten Ngawi	237,31	0,36
18	Kabupaten Pacitan	289,17	0,44
19	Kabupaten Pamekasan	265,6	0,40
20	Kabupaten Pasuruan	834,01	1,27

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai Tambah Sektor Keuangan per Kapita</b>	<b>Nilai Standarisa si Nilai Tambah Sektor Keuangan per Kapita</b>
21	Kabupaten Ponorogo	313	0,48
22	Kabupaten Probolinggo	147,95	0,23
23	Kabupaten Sampang	29,92	0,05
24	Kabupaten Sidoarjo	959,71	1,46
25	Kabupaten Situbondo	69,6	0,11
26	Kabupaten Sumenep	231,79	0,35
27	Kabupaten Trenggalek	283,56	0,43
28	Kabupaten Tuban	836	1,27
29	Kabupaten Tulungagung	410,6	0,62
30	Kota Batu	435,35	0,66
31	Kota Blitar	1016,83	1,55
32	Kota Kediri	1717,68	2,61
33	Kota Madiun	1063,74	1,62
34	Kota Malang	2055,49	3,13
35	Kota Mojokerto	1250,66	1,90
36	Kota Pasuruan	672,61	1,02
37	Kota Probolinggo	1039,74	1,58
38	Kota Surabaya	2943	4,48
<b>Total</b>		24965,07	
<b>Rata-Rata</b>		656,98	
<b>Standar Deviasi</b>			0,93
<b>Batas Keunggulan</b>			1,47
<b>Batas Kelemahan</b>			0,53

No	Kabupaten/Kota	Nilai Tambah Sektor Keuangan per Kapita	Nilai Standarisasi Nilai Tambah Sektor Keuangan per Kapita
Nilai Tambah Sektor Keuangan per Kapita (2014)		Kategori kelemahan	
<b>Data Penelitian Saat Ini (2019)</b>			
Kabupaten Bangkalan		296,32	0,45
Nilai Tambah Sektor Keuangan per Kapita (2019)		Kategori kelemahan	

### Produktivitas Tenaga Kerja

No	Kabupaten/Kota	Produktivitas Tenaga Kerja	Nilai Standarisasi Produktivitas Tenaga Kerja
<b>Data Penelitian Terdahulu (2014)</b>			
1	Kabupaten Bangkalan	11772,21	0,37
2	Kabupaten Banyuwangi	19491,04	0,61
3	Kabupaten Blitar	14548,5	0,45
4	Kabupaten Bojonegoro	24393,91	0,76

No	Kabupaten/Kota	Produkti vitas Tenaga Kerja	Nilai Standari sasi Produkti vitas Tenaga Kerja
5	Kabupaten Bondowoso	14074,99	0,44
6	Kabupaten Gresik	50131,95	1,57
7	Kabupaten Jember	16845,55	0,53
8	Kabupaten Jombang	15880,49	0,50
9	Kabupaten Kediri	15870,65	0,50
10	Kabupaten Lamongan	17922,89	0,56
11	Kabupaten Lumajang	14803,59	0,46
12	Kabupaten Madiun	15308,99	0,48
13	Kabupaten Magetan	14099,1	0,44
14	Kabupaten Malang	21712,6	0,68
15	Kabupaten Mojokerto	32121,58	1,00
16	Kabupaten Nganjuk	36820,66	1,15
17	Kabupaten Ngawi	12008,29	0,38
18	Kabupaten Pacitan	6016,47	0,19
19	Kabupaten Pamekasan	5887,25	0,18
20	Kabupaten Pasuruan	14419,97	0,45
21	Kabupaten Ponorogo	9520,39	0,30
22	Kabupaten Probolinggo	13916,06	0,44
23	Kabupaten Sampang	8747,65	0,27
24	Kabupaten Sidoarjo	47660,94	1,49
25	Kabupaten Situbondo	15480,1	0,48
26	Kabupaten Sumenep	9316,48	0,29
27	Kabupaten Trenggalek	9490,34	0,30

No	Kabupaten/Kota	Produktivitas Tenaga Kerja	Nilai Standarisasi Produktivitas Tenaga Kerja
28	Kabupaten Tuban	19977,34	0,62
29	Kabupaten Tulungagung	18544,52	0,58
30	Kota Batu	88131,19	2,76
31	Kota Blitar	31714,53	0,99
32	Kota Kediri	170426,25	5,33
33	Kota Madiun	43767,19	1,37
34	Kota Malang	85438,46	2,67
35	Kota Mojokerto	43610,16	1,36
36	Kota Pasuruan	27341,82	0,85
37	Kota Probolinggo	30949,88	0,97
38	Kota Surabaya	167220,3	5,23
<b>Total</b>		1215384,28	
<b>Rata-Rata</b>		31983,80	
<b>Standar Deviasi</b>			1,18
<b>Batas Keunggulan</b>			1,59
<b>Batas Kelemahan</b>			0,41
<b>Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan (2014)</b>		Kategori kelemahan	
<b>Data Penelitian Saat Ini (2019)</b>			
Kabupaten Bangkalan		38219,2	1,19
<b>Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan (2019)</b>		Kategori rata-rata	

**PDRB per Kapita**

No	Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita	Nilai Standarisasi PDRB per Kapita
<b>Data Penelitian Terdahulu (2014)</b>			
1	Kabupaten Bangkalan	5520,06	0,34
2	Kabupaten Banyuwangi	10451,63	0,65
3	Kabupaten Blitar	7882,14	0,49
4	Kabupaten Bojonegoro	12573,95	0,78
5	Kabupaten Bondowoso	7336,65	0,45
6	Kabupaten Gresik	21800,53	1,35
7	Kabupaten Jember	7755,94	0,48
8	Kabupaten Jombang	7551,4	0,47
9	Kabupaten Kediri	7952,9	0,49
10	Kabupaten Lamongan	8847,18	0,55
11	Kabupaten Lumajang	7237,21	0,45
12	Kabupaten Madiun	7941,45	0,49
13	Kabupaten Magetan	7621,73	0,47
14	Kabupaten Malang	11021,86	0,68
15	Kabupaten Mojokerto	16300,2	1,01
16	Kabupaten Nganjuk	18011,03	1,12
17	Kabupaten Ngawi	5883,56	0,36
18	Kabupaten Pacitan	3697,9	0,23
19	Kabupaten Pamekasan	3265,28	0,20

No	Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita	Nilai Standaris asi PDRB per Kapita
20	Kabupaten Pasuruan	7088,34	0,44
21	Kabupaten Ponorogo	5296,56	0,33
22	Kabupaten Probolinggo	7672,16	0,48
23	Kabupaten Sampang	4593,74	0,28
24	Kabupaten Sidoarjo	22231,7 3	1,38
25	Kabupaten Situbondo	8066,67	0,50
26	Kabupaten Sumenep	5491,01	0,34
27	Kabupaten Trenggalek	5514,34	0,34
28	Kabupaten Tuban	9734,21	0,60
29	Kabupaten Tulungagung	9797,32	0,61
30	Kota Batu	44914,6 5	2,79
31	Kota Blitar	16072,5 8	1,00
32	Kota Kediri	98623,8	6,12
33	Kota Madiun	19838,9 8	1,23
34	Kota Malang	39378,2 4	2,44
35	Kota Mojokerto	21561,8 4	1,34
36	Kota Pasuruan	12983,7 6	0,81
37	Kota Probolinggo	14580,5 6	0,90
38	Kota Surabaya	80723,0 4	5,01

No	Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita	Nilai Standarisasi PDRB per Kapita
<b>Total</b>		612816,13	
<b>Rata-Rata</b>		16126,74	
<b>Standar Deviasi</b>			1,23
<b>Batas Keunggulan</b>			1,61
<b>Batas Kelemahan</b>			0,39
<b>PDRB per Kapita Kabupaten Bangkalan (2014)</b>			Kategori kelemahan
<b>Data Penelitian Saat Ini (2019)</b>			
Kabupaten Bangkalan		16506,74	1,02
<b>PDRB per Kapita Kabupaten Bangkalan (2019)</b>			Kategori rata-rata

## BIODATA PENULIS



**Ummu Bariroh**, lahir di Gresik pada tanggal 26 November 1996, merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal di TK Dharma Wanita Persatuan Randuagung Gresik, SMPN 1 Gresik, SMAN 1 Gresik, dan terdaftar sebagai mahasiswa di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota FADP ITS Surabaya pada tahun 2015 dengan NRP 08211540000034.

Selama perkuliahan, penulis aktif sebagai staff himpunan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS pada tahun 2016/2017 dan pada tahun 2017/2018. Selain itu penulis juga aktif diberbagai kepanitiaan tingkat departemen maupun institut dan perlombaan olahraga bola voli tingkat fakultas maupun institut. Penulis juga pernah menjuarai tingkat 3 nasional karya studio terbaik oleh ASPI (Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia) bersama dengan tujuh orang lainnya yang diadakan di Lombok, NTB pada tahun 2017.

Diskusi seputar topik tugas akhir ini, dengan senang hati akan diterima penulis. Penulis dapat dihubungi melalui email [aribariroh11@gmail.com](mailto:aribariroh11@gmail.com) atau nomor telepon 081331608681.